

**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN MIKRO
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN PADA
PROGRAM GERDU - TASKIN
(Studi Kasus UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

Oleh :

INDRIE KURNIAWATI



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROBISNIS
MALANG
2008**

**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN MIKRO
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN PADA
PROGRAM GERDU - TASKIN
(Studi Kasus UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)**

Oleh :

INDRIE KURNIAWATI

0410442007-44



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROBISNIS
MALANG
2008**



**PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN MIKRO
DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN PADA
PROGRAM GERDU - TASKIN**

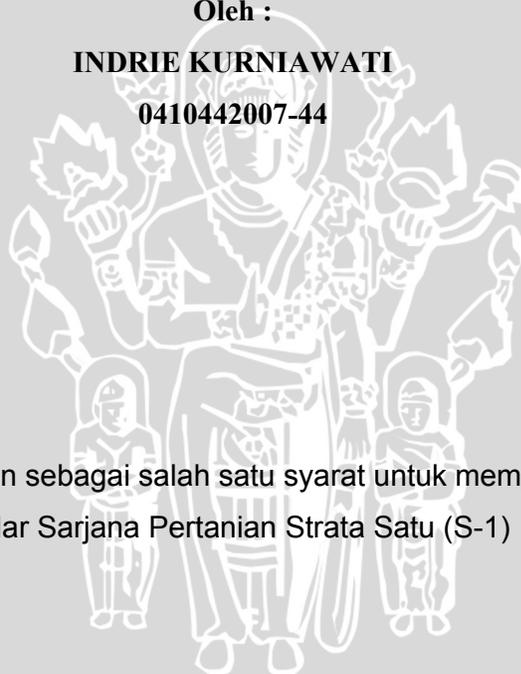
(Studi Kasus UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu)

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Oleh :

INDRIE KURNIAWATI

0410442007-44



Disampaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Pertanian Strata Satu (S-1)

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS PERTANIAN
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGROBISNIS
MALANG
2008**

RINGKASAN

INDRIE KURNIAWATI. 0410442007-44. PERAN MODAL SOSIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN MIKRO DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN PENDUDUK MISKIN PADA PROGRAM GERDU - TASKIN (Studi Kasus UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu). Di bawah bimbingan Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS dan Hery Toiba, SP. MP.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka masih belum terbebas dari kemiskinan, itu terjadi hingga saat ini. Semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia, terutama di Propinsi Jawa Timur sejak krisis ekonomi melanda pada tahun 1997. Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam pengentasan kemiskinan yaitu dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro yang merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif atau disebut dengan Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP). Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam pengentasan kemiskinan yaitu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) dengan programnya yaitu program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN). Program ini melalui pendekatan TRI DAYA yakni pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan, yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Program Gerdu-Taskin dimulai tahun 2002 s/d 2005. Program ini telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan keuangan mikro kecil yaitu berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan Program Gerdu-Taskin yang bersifat ekonomi produktif sebagai Dana Bergulir (*revolving fund*) bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin. Bertitik tolak dari tujuan program keuangan mikro yang dimanifestasikan dalam Unit Pengelola Keuangan pada program Gerdu-Taskin dimana perannya tergantung dari besarnya jumlah pinjaman dan meningkatnya jumlah anggota maka diharapkan kesadaran anggota dalam memupuk modal melalui kegiatan program Gerdu-Taskin. Dengan adanya program Gerdu-Taskin masyarakat miskin dapat meningkatkan Pendapatan usahanya dan kemampuannya untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi yang merupakan salah satu modal sosial yang mana kekuatan modal sosial itu bertumpu pada jaringan dan sumberdaya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (*Research Question*) sebagai berikut:

1. Bagaimana peran UPK terhadap Pokmas sebagai sumber pembiayaan mikro.
2. Bagaimana peran modal sosial (*Social Capital*) terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
3. Bagaimana peran modal sosial (*Social Capital*) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Sejalan dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian adalah:

1. Mendiskripsikan sejauh mana peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro dapat mengatasi keterbatasan modal keuangan yang dihadapi oleh masyarakat miskin di Desa Pandanrejo.
2. Menganalisis peran modal sosial (*Social Capital*) terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
3. Menganalisis peran modal sosial (*Social Capital*) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*puossible*) yaitu di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Propinsi Jawa Timur. Dalam penelitian ini penetapan kelompok sampel dilakukan secara sengaja (*puossible*), yaitu pada kelompok masyarakat usaha ekonomi produktif (Pokmas UEP) yang telah menjadi anggota pada Unit Pengelola Keuangan “Gempar” baik yang telah menjadi anggota pada program reguler maupun pada program penguatan. Metode pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode skoring dengan bantuan skala Likert dan metode analisis data regresi dan korelasi.

Hasil penelitian yang di dapat adalah antara lain:

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui secara umum tingkat pengetahuan anggota Pokmas UPK “Gempar” terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro

- cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat pengetahuan anggota tentang struktur kelompok, tujuan kelompok, fungsi tugas, dan kekompakan kelompok lebih jauh lagi tingkat pengetahuan ini juga dapat terlihat dari meningkatnya jumlah masyarakat yang ingin menjadi anggota Pokmas UPK “Gempar”.
2. Dari hasil penelitian, Modal Sosial telah memainkan peran yang cukup baik dalam peningkatan kinerja UPK “Gempar”. Hal ini tergambar dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dari anggota. Hasil analisis korelasi atau Multiple R pada UPK program reguler dan penguatan diperoleh sebesar 0.826 dan 0.909 menyatakan bahwa kondisi hubungan antara Modal Sosial terhadap Tingkat Kolektibilitas secara bersama-sama sebesar 82.60% dan 90.90% yang menunjukkan kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas (modal sosial) terhadap variabel tak bebas (tingkat kolektibilitas). Dari hasil analisa regresi pada UPK program reguler dan penguatan yaitu pada variabel modal sosial, dapat diketahui bahwa Kepercayaan (X_1), secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kolektibilitas dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar -0.480 di UPK reguler ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 0.517, variabel Jaringan Sosial (X_2) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 1.229 di UPK reguler ini menunjukkan lebih tinggi dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar -0.262 sedangkan untuk variabel Norma (X_3) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 6.125 di UPK reguler dan 9.269 di UPK penguatan. Artinya tingkat kolektibilitas lebih dipengaruhi oleh norma yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban anggota sebagai peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Ini sesuai dengan hirarki tindakan kolektif menurut Lawang menunjuk pada tindakan yang terorganisir bersama-sama orang miskin dalam suatu kelompok dengan atau tanpa fasilitas dari pemerintah. Dengan dasar asumsi bahwa kerja sama dalam kelompok lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan keswadayaan.
 3. Modal Sosial yang ada di Pokmas UPK “Gempar” telah berperan dalam peningkatan pendapatan anggotanya. Hal ini terlihat dari peningkatan pendapatan anggota Pokmas UPK “Gempar” baik pada program reguler maupun pada program penguatan. Kinerja keuangan mikro yang dilihat dari tingkat pendapatan (variabel Y) pada UPK program reguler dan penguatan dipengaruhi sebesar 81.1% dan 75.4% oleh variabel bebas (X_1, X_2, X_3), sedangkan sisanya 18.9% dan 24.6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 3 variabel yang diteliti. Yang berarti setiap 100% perubahan pada variabel bebas, akan diikuti oleh perubahan tingkat kolektibilitas pada masing-masing program sebesar 81.1% dan 75.4%. Modal Sosial (X_1), secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pendapatan dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 3.244 di UPK reguler ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 3.319, variabel Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga (X_2) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 3.667 di UPK reguler ini menunjukkan lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 3.821 sedangkan untuk variabel Tingkat Pendidikan (X_3) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 0.093 di UPK reguler dan 2.406 di UPK penguatan. Selisih pendapatan antara program reguler dengan program penguatan sangat kecil ini disebabkan karena sistem pemberian pinjaman tidak sesuai sasaran artinya mereka yang memperoleh program reguler seharusnya memperoleh pinjaman lagi sebagai tambahan modal dari program penguatan namun pelaksanaannya pinjaman pada program penguatan diberikan pada anggota baru. Bila dilihat dari kurva produksi seharusnya pada program reguler yang masih akan menuju taraf pertumbuhan tidak tercapai akibat tidak adanya tambahan modal kerja berupa modal finansial, sehingga anggota tidak dapat meningkatkan produktivitas, tidak mencapai kemandirian dan tidak dapat meningkatkan pada kondisi kehidupan yang lebih layak (kesejahteraan). Pengentasan kemiskinan melalui program Gerdu-Taskin yang diatasi melalui peningkatan modal sosial yang tertambat pada struktur sosial mikro saja akan berdampak kurang efektif. Jaringan pemasaran dan kerjasama yang lebih luas dengan struktur sosial yang lebih luas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhannahu wata'ala yang telah memberkati hidup dan kehidupan kita semua, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Peran Modal Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Mikro dalam Peningkatan Pendapatan Penduduk miskin pada Program Gerdu-Taskin” (Studi Kasus pada UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu) walaupun dengan segala keterbatasan yang ada.

Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat yang harus penulis tempuh untuk menyelesaikan studi S-1 (Strata Satu) pada program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tiada terkira kepada:

1. Dr. Ir. Abdul Wahib Muhaimin, MS dan Hery Toiba, SP. MP. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan, arahan, ilmu dan pengetahuan.
2. Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian dan Ketua Program Studi Agribisnis Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pertanian atas kepemimpinannya.
3. Bapak Bambang Triono, SP. selaku ketua UPK “Gempar” yang telah memberikan fasilitas dan bantuan selama penelitian.
4. Seluruh Dosen dan Staf pengajaran di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya yang selalu kooperatif.
5. Mama dan seluruh keluarga besar Adi Soemarto yang telah begitu sabar dalam ihtiar dan do'a serta dukungannya meski penulis terkadang mengecewakan.
6. Seluruh mahasiswa Fakultas Pertanian khususnya teman-teman SAP 2004 Agribisnis maupun PKP.

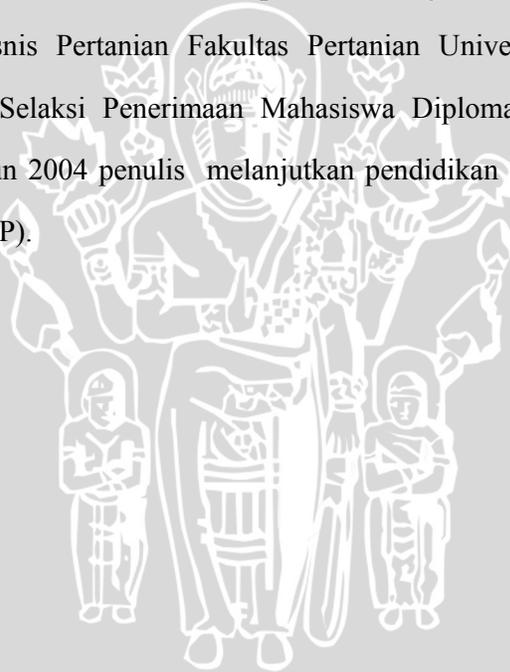
Menyadari adanya keterbatasan pengetahuan, referensi dan pengalaman, penyusun mengharapkan saran dan masukan demi lebih baiknya skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun maupun semua pihak yang membutuhkan.

Malang, April 2008

Penyusun

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Malang pada tanggal 17 Januari 1982 dari Ayah bernama Kristianto Abu Mansyur dan Ibu Sulistyaningsih. Pada tahun 1986 penulis masuk sekolah Taman Kanak-kanak PGRI 01, kemudian pada tahun 1988 penulis masuk sekolah dasar di SDN Jatimulyo V Malang, kemudian pada tahun 1994 penulis masuk sekolah lanjutan tingkat pertama SLTP Negeri 18 Malang. Lulus tahun 1997 penulis melanjutkan pendidikan di SMU Negeri 9 Malang hingga lulus tahun 2000. Pada tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan pada Program D-3 Agribisnis Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya melalui jalur masuk Selaksi Penerimaan Mahasiswa Diploma (SPMD), lulus tahun 2003. Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan S-1 melalui jalur Studi Alih Profesi (SAP).



DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu	8
2.2. Tinjauan Umum Tentang Modal Sosial (<i>Social Capital</i>)	10
2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro (<i>Microfinance</i>)	14
2.4. Tinjauan Teoritis Pendapatan	17
2.5. Pemahaman Terhadap Konsep Kemiskinan	19
2.6. Tinjauan Umum Program GERDU-TASKIN	24
2.7. Tinjauan Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK)	27
III. KERANGKA TEORITIS	
3.1. Kerangka Pemikiran	32
3.2. Hipotesis	38
3.3. Batasan Masalah	38
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	38
IV. METODE PENELITIAN	
4.1. Jenis Penelitian	47
4.2. Metode Penentuan Lokasi	47
4.3. Metode Penentuan Responden	47
4.4. Metode Pengumpulan Data	48
4.5. Metode Analisis Data	49
V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
5.1. Letak Geografis dan Administratif	61
5.2. Keadaan Penduduk	61
5.3. Gambaran Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK)	67
5.4. Keadaan Kelompok Masyarakat (Pokmas)	72

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

6.1. Tingkat Pengetahuan reponden terhadap Peran UPK sebagai Sumber Pembiayaan Mikro 79

6.2. Analisis Peran Modal Sosial (*Social Capital*) terhadap Kinerja UPK dari Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman 99

6.3. Analisis Peran Modal Sosial (*Social Capital*) dalam Peningkatan Pendapatan 128

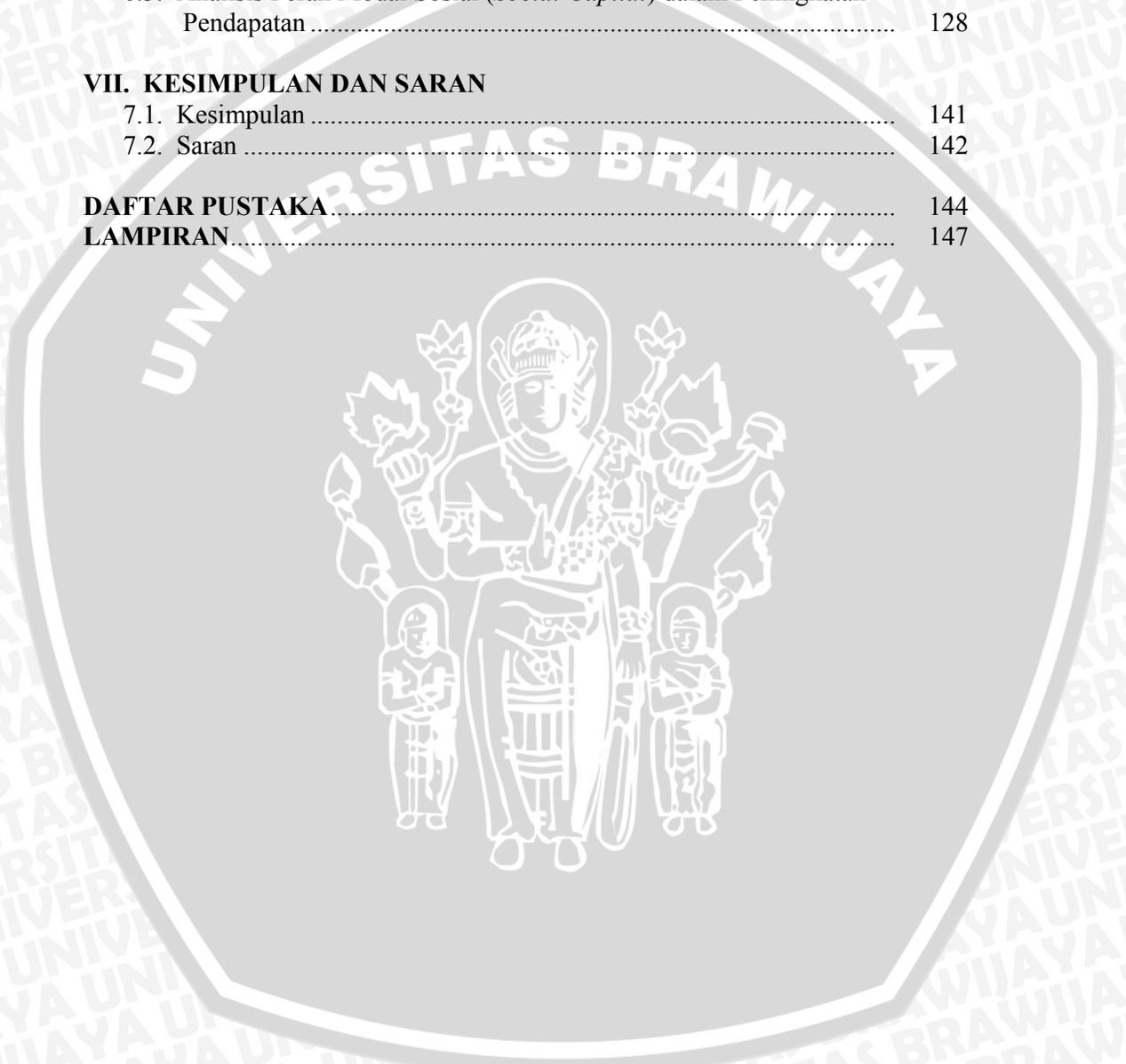
VII. KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan 141

7.2. Saran 142

DAFTAR PUSTAKA 144

LAMPIRAN 147



DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Distribusi Pendapatan di Indonesia.....	21
2.	Pengukuran Kelembagaan Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP).....	41
3.	Pengukuran Modal Sosial (<i>Social Capital</i>) sebagai Variabel Dependen (Y).....	43
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu	62
5.	Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu	63
6.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Umur di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji, Kota Batu	64
7.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandanrejo	65
8.	Struktur Mata Pencaharian Penduduk Desa Pandanrejo.....	66
9.	Kondisi UPK “Gempar” Program Reguler dan Program Penguatan	68
10.	Jumlah Anggota Pokmas UPK “Gempar” Sampel Desa Pandanrejo.....	73
11.	Data Anggota Pokmas Sampel pada program Reguler.....	74
12.	Data Anggota Pokmas Sampel pada program Penguatan.....	75
13.	Jenis Usaha Anggota Pokmas Sampel pada Program Reguler dan penguatan	76
14.	Distribusi Tingkat Pendidikan Responden anggota Pokmas	77
15.	Distribusi Umur responden anggota Pokmas.....	78
16.	Tingkat Pengetahuan Asal Pengembangan UPK “Gempar”	81
17.	Tingkat Pengetahuan Responden terhadap struktur Pengurus Pokmas dan Kepuasan Terhadap Kinerja Pengurus Pokmas UPK “Gempar”	94

Nomor	Teks	Halaman
18.	Tingkat Pengetahuan dan Kepuasan Responden Terhadap Pencapaian Tujuan Pokmas UPK “Gempar”	95
19.	Fungsi dan Tugas di Pokmas UPK “Gempar”	96
20.	Tingkat Kekompakan Pokmas UPK “Gempar”	97
21.	Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemimpin di Pokmas UPK “Gempar”	100
22.	Kesesuaian Pendapat Anggota Kelompok di Pokmas UPK “Gempar”	102
23.	Intensitas Pertemuan Anggota Kelompok di Pokmas UPK “Gempar”	104
24.	Kemauan Bekerjasama Antar Anggota Kelompok di Pokmas UPK “Gempar”	105
25.	Struktur Kewajiban Anggota di Pokmas UPK “Gempar”	107
26.	Sanksi Kelompok di Pokmas UPK “Gempar”	108
27.	Tingkat Distribusi Umur Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar”	110
28.	Tingkat Distribusi Jumlah Anggota berdasarkan Pendapatan Anggota Kelompok UPK “Gempar”	111
29.	Tingkat Distribusi Jumlah Anggota Keluarga Responden UPK “Gempar”	112
30.	Tingkat Distribusi Jenis Usaha Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar”	113
31.	Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Kolektibilitas Pinjaman di UPK “Gempar”	114
32.	Jumlah Responden berdasarkan Besar Pinjaman yang diterima di UPK “Gempar”	114
33.	Alokasi Penggunaan Dana oleh Responden di UPK “Gempar”	115
34.	Hasil Uji Validitas pada setiap Indikator	117

Nomor	Teks	Halaman
35.	Hasil Uji Validitas.....	118
36.	Hasil Uji Reliabilitas.....	118
37.	Hasil Perhitungan Korelasi dan Regresi.....	120
38.	Hasil Uji t-Test.....	125
39.	Skor Total Modal Sosial di Pokmas UPK “Gempar”.....	128
40.	Tingkat Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Responden UPK “Gempar”.....	129
41.	Tingkat Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar”.....	131
42.	Rata-rata Pendapatan berdasarkan Jenis Usaha di UPK “Gempar”..	132
43.	Hasil Perhitungan Korelasi dan Regresi.....	133
44.	Hasil Uji t-Test.....	138



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Teks	Halaman
1.	Kerangka Konsep Penelitian Peran Modal Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Mikro Dalam Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin pada Program Gerdu-Taskin	37
2.	Struktur Organisasi UPK Penguatan di Kota Batu	69
3.	Hubungan Fungsional dan Struktural antar organisasi pengelola Program Gerdu-Taskin.....	90



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks	Halaman
1.	Data Anggota Pokmas UPK “Gempar” Desa Pandanreko, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.	147
2.	Data responden anggota kelompok Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” Program Reguler.....	150
3.	Data responden anggota kelompok Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” Program Penguatan.....	151
4.	Hasil skoring asal pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” Program Reguler.....	152
5.	Hasil skoring asal pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” Program Penguatan.....	153
6.	Hasil skoring variabel modal sosial (social capital) Hasil skoring variabel modal sosial (social capital) Program Reguler	154
7.	Hasil skoring variabel modal sosial (social capital) Program Penguatan.....	155
8.	Data Regresi UPK “Gempar” Program Reguler.....	156
9.	Data Regresi UPK “Gempar” Program Penguatan.....	157
10.	Uji Validitas Modal Sosial terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Reguler.....	158
11.	Uji Reabilitas terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Reguler	164
12.	Uji Korelasi terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Reguler	166
13.	Analisis Regresi terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Reguler	169
14.	Uji Validitas terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Penguatan	170

Nomor	Teks	Halaman
15.	Uji Reabilitas terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Penguatan	175
16.	Uji Korelasi terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Penguatan	177
17.	Analisis Regresi terhadap Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman pada Program Penguatan	180
18.	Uji Validitas Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada Program Reguler.....	181
19.	Uji Reabilitas dan Korelasi Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada pada Program Reguler.....	182
20.	Analisis Regresi Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada Program Reguler.....	183
21.	Uji Validitas Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada Program Penguatan.....	184
22.	Uji Reabilitas dan Korelasi Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada Program Penguatan	185
23.	Analisis Regresi Modal Sosial dengan Tingkat Pendapatan pada Program Penguatan.....	186
24.	Syarat Pengajuan Pinjaman UPK.....	187
25.	Rencana Usaha Anggota (RUA) UPK “Gempar”.....	188
26.	Rekapitulasi Penggunaan Dana UPK “Gempar”	189
27.	Hasil Rapat.....	190
28.	Berita Acara Musyawarah Perencanaan	191

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka masih belum terbebas dari kemiskinan, itu terjadi hingga saat ini. Bahkan kemiskinan semakin meningkat dan lebih parah akibat ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan hingga menimbulkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Kemiskinan di Indonesia semakin parah dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda hampir di seluruh negara berkembang. Krisis ekonomi yang berlangsung panjang, dikarenakan adanya faktor internal yang kurang menguntungkan, yaitu konflik kebangsaan, disintegrasi yang melanda beberapa wilayah, problem perekonomian, angka kemiskinan dan pengangguran yang tinggi ini ditunjukkan dengan jatuhnya nilai rupiah, melonjaknya inflasi, pengangguran, kekurangan pangan dan harga tinggi menyebabkan kerusuhan sosial di berbagai daerah..

Pada tahun 2002 ternyata Indonesia masih belum mampu lepas dari rantai krisis, terutama dalam hal menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 38.398.000 jiwa. Kondisi kemiskinsn tersebut yang telah memperluas krisis moneter menjadi krisis ekonomi dan politik. Sumodiningrat mengistilahkan faktor internal tersebut sebagai “masalah fundamental.” Masalah tersebut sifatnya sangat mendasar dan sudah demikian kuat mengakar dalam masyarakat.

Di Jawa Timur pada tahun 1998 persentase angka kemiskinan di daerah ini tercatat 19,53 % atau 6,8 juta jiwa dari total penduduk sekitar 35 juta jiwa. Pada tahun 2002, angka kemiskinan meningkat menjadi 20,34 % atau sekitar 7,1 juta jiwa. Lebih parah lagi, dalam matriks pengukuran kinerja kebijakan periode 1988-2002 tidak ada upaya untuk mengurangi angka penduduk miskin di Jatim. Dalam matriks yang terdapat dalam analisis indikator makro Jatim 1998-2003 itu target persentase angka kemiskinan justru bertambah menjadi 25 % (Anonymous, 2003).

Elson, 1977 (*dalam* Suharto, 2002) menyatakan bahwa dalam kegiatan pengentasan kemiskinan yang telah ada selama ini, hampir semua mengacu pada masalah kemiskinan yang bergabung pada paradigma modernisasi (*the modernisation paradigm*) and *the product cantered model* yang pelaksanaannya didasari teori pertumbuhan ekonomi kapital dan ekonomi *neoclastic orthodox*.

Secara umum, pendekatan yang dipergunakan lebih terkonsentrasi pada *individual poverty* sehingga aspek struktural dan *social poverty* menjadi kurang diperhatikan. Suharto (2002), mengemukakan *In its standarised conception of poverty, for example, the poor are seen almost as passive victims and subject of investigation rather than as human beings who have something to contribute to both the identivication of their condition and its improvement.* Hal ini dapat dilihat dari tolak ukur yang digunakan untuk melihat garis kemiskinan pada beberapa pendekatan seperti *Gross National Product (GNP)*, *Human Developmen Index (HDI)*, *Human Poverty Index (HPI)*, *Social Accounting Matrix (SAM)*, dan *Phisical Quality Life Index (PQLI)*.

Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri yaitu dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi usaha kecil dan mikro semakin besar, namun hambatan yang dihadapi sangat besar, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Menurut Robinson (2000), pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin, sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi di antara mereka, yang mencakup: (1). Masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, (2). Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan (3). Masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak. Kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena *trickle down effect* dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Wijaya, 2005). Keuangan mikro berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (usaha rumah tangga; usaha pertanian; pedagang kecil; dan kegiatan usaha skala kecil lainnya) untuk meningkatkan usahanya, sehingga usaha mereka akan

berjalan lebih lancar dan lebih besar (Boon, 2006). Indonesia mempunyai banyak pengalaman mengembangkan sistem pembiayaan dengan pola manajemen dari bawah (*grass root*) atau lebih dikenal sebagai pembiayaan mikro. Perkembangan pembiayaan mikro secara garis besar ada 2 jalur. Pertama, sistem ini lahir dan merupakan lahir dari sistem sosio-kultural masyarakat. Bentuk konkrit penerapan sistem ini diantaranya pola arisan atau gotong royong. Kedua, sistem pembiayaan mikro yang pertumbuhannya diprakarsai melalui program pemerintah. Ada kaitan kepentingan antara motif dan kepentingan pembangunan dengan pendirian lembaga keuangan mikro.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur yaitu melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) dengan programnya yaitu Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU-TASKIN). Program Gerdu-Taskin yang dirancang khusus sebagai manifestasi sikap tanggap Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jawa Timur melalui pendekatan TRI DAYA. Dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Program ini telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan keuangan mikro kecil yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK).

UPK diharapkan mampu mengelola dan mengembangkan Program Gerdu-Taskin yang bersifat ekonomi produktif sebagai Dana Bergulir (*revolving fund*) bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin di Desa/Kelurahan tersebut. Lebih jauh diharapkan UPK mampu berperan mensinergikan pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat ekonomi produktif yang masuk ke Desa/Kelurahan. Sehingga kedepan UPK bisa tumbuh dan berkembang menjadi badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengelola dan mengembangkan aset-aset perekonomian yang ada di Desa/Kelurahan (BPM, 2006).

Dalam rangka kinerja UPK sebagai lembaga pengelola kegiatan ekonomi masyarakat dan mendorong terbentuknya BUMDes, perlu dilakukan langkah-langkah strategis berupa pembinaan dan fasilitasi penguatan usaha UPK. Kegiatan Penguatan UPK ProgramGerdu-Taskin merupakan upaya memberi penghargaan (*reward*), penyehatan (*recovery*), dan penyelamatan (*rescue*) terhadap UPK. Kegiatan penghargaan diarahkan untuk terus mendorong dan memfasilitasi

pengembangan UPK menuju embrio BUMDes. Kegiatan penyehatan diarahkan untuk meningkatkan kinerja UPK sehingga diharapkan UPK tumbuh dan berkembang secara sehat dan produktif. Kegiatan penyelamatan UPK diarahkan untuk melindungi dan mempertahankan aset UPK serta memperbaiki kinerja UPK. Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memantapkan pelaksanaan program Gerdu-Taskin dari aspek kelembagaan dan usaha UPK, dan mengoptimalkan pengembangan potensi Pokmas UEP serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga pendapatan meningkat.

Dengan adanya Program Gerdu-Taskin masyarakat miskin khususnya di desa Pandanrejo diharapkan dapat mengelola dan mengembangkan usahanya, sehingga usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih “besar” serta pendapatan mereka juga akan mengalami peningkatan (Anonymous, 2006a). Selain itu diharapkan masyarakat miskin juga dapat meningkatkan kemampuannya untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi yang merupakan salah satu bentuk modal sosial. Ini sesuai dengan pernyataan Grootaert dan Basteler (2002) yang mengungkapkan ada tiga manfaat modal sosial, yaitu; (1). Partisipasi individu dan jaringan kerja sosial akan meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah; (2). Partisipasi dan jaringan kerja lokal dan sikap saling percaya akan membuat kelompok lebih mudah untuk mencapai keputusan bersama dan mengimplementasikan dalam kegiatan bersama; (3). Memperbaiki jaringan kerja dan sikap mengurangi perilaku tidak baik dari anggota. Jika disimak, titik simpul kekuatan modal sosial itu bertumpu pada dua hal: jaringan dan sumber daya.

Rasionalisasi mengapa perlu kemiskinan karena kemiskinan sebagai salah satu indikator dalam perekonomian suatu negara yaitu untuk mengukur tingkat pendapatan minimum penduduknya. Kebanyakan negara-negara di Dunia Ketiga kemiskinan merupakan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Realitas kemiskinan telah menjadi tanggung jawab global karena berkaitan dengan harapan umat manusia yang mendambakan kemakmuran dan kesejahteraan. Pernyataan perang terhadap kemiskinan sebagaimana dituangkan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) mewakili satu optimisme bahwa lingkaran kemiskinan bisa dientaskan dengan kehadiran komitmen dan kerja bersama (Todaro, 1987).

Dari uraian di atas, maka peneliti mengambil judul penelitian peran modal sosial terhadap kinerja keuangan mikro dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin, dengan alasan peneliti ingin menganalisis sejauh mana peran modal sosial terhadap kinerja keuangan mikro dalam meningkatkan pendapatan penduduk miskin di Desa Pandanrejo yang merupakan salah satu desa penerima program Gerdu-Taskin.

1.2. Perumusan Masalah

Melihat kondisi ini maka peneliti melihat akar permasalahan, bahwa untuk mengentaskan kemiskinan maka perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat miskin sendiri. Kerja sama yang dapat dilakukan antara lain pemerintah mengadakan program pengentasan kemiskinan yaitu Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dimana program ini memfasilitasi terbentuknya lembaga keuangan mikro pedesaan berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang mampu memberikan akses yang seluas-luasnya terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro dengan memberikan bantuan permodalan dengan mudah, cepat dan bunga pinjaman ringan sehingga memberikan kemudahan masyarakat miskin dalam meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya kemudahan dalam akses pembiayaan maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan modal sosial bagi masyarakat miskin sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera. Peran UPK ini sangatlah berguna bagi pengusaha kecil dan masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya. Sehingga keberadaan UPK harus dipertahankan keberlanjutannya.

Keberlanjutan UPK akan tercapai dengan adanya peningkatan kinerja UPK dengan dilaksanakannya program penguatan UPK. Program penguatan diberikan kepada UPK yang telah mendapatka program awal pembentukan atau disebut dengan program reguler. Kegiatan yang dilakukan dalam program penguatan adalah peningkatan kapasitas kelembagaan UPK, penanganan aset bermasalah, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, pengmebangan usaha UPK dan Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan adanya program penguatan diharapkan kinerja UPK semakin meningkat dan produktivitas masyarakat juga tinggi sehingga pendapatan meningkat. Untuk mempertahankan keberlanjutan UPK juga dipengaruhi oleh tingkat kolektibilitas pinjaman UPK. Permasalahan yang

terjadi pada UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo adalah masih banyaknya pinjaman dalam kategori macet. Kriteria kolektibilitas pinjaman dalam kategori macet apabila terdapat tunggakan angsuran lebih dari batas waktu pengembalian yaitu lebih dari 10 bulan. Faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pinjaman yaitu faktor sosial ekonomi anggota. Kondisi sosial ekonomi yang berbeda akan memperlihatkan respon yang berbeda. Pada suatu masyarakat tertentu kesadaran untuk mengembalikan pinjaman sangat tinggi, tetapi pada masyarakat atau sistem sosial yang lain dapat terjadi hal yang sebaliknya. Kondisi sosial ekonomi yang ada pada masyarakat miskin seperti tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas rendah, tingkat teknologi yang digunakan masih sederhana dan keterbatasan modal usaha mempengaruhi kesadaran akan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya. Dengan demikian faktor sosial ekonomi perlu diperhatikan untuk mengurangi terjadinya penunggakan.

Faktor sosial dapat ditingkatkan dengan cara pemupukan modal sosial (*Social Capital*) yang ada di masyarakat. Modal sosial (*Social Capital*) yaitu segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur utamanya seperti *trust* atau rasa saling mempercayai, keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam masyarakat. Modal sosial menunjukkan pada bagian-bagian organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan sosial yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Kepercayaan (*trust*) yaitu keyakinan atau rasa percaya pada sesuatu yang jelas sarasanya yakni disini adalah pencapaian kualitas hidup yang lebih baik, jaringan sosial yaitu ikatan antar orang atau anggota yang dihubungkan dengan media yang diikat dengan kepercayaan dan dipertahankan dengan norma yang mengikat keduanya. UPK sebagai lembaga keuangan mikro diharapkan dapat meningkatkan modal sosial rumah tangga miskin melalui kegiatan kemitraan yang terjalin antara anggota dengan UPK berdasarkan kepercayaan diantara keduanya dan berdasarkan norma yang disepakati oleh keduanya dimana menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuantungan dari suatu kegiatan tertentu.

Berdasarkan pada uraian yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian (Research Question) sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat pengetahuan anggota Pokmas terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro dalam mengatasi keterbatasan modal keuangan bagi penduduk miskin di desa Pandanrejo.
2. Bagaimana peran modal sosial (social capital) terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
3. Bagaimana peran modal sosial (social capital) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan tingkat pengetahuan anggota Pokmas terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro dapat mengatasi keterbatasan modal keuangan yang dihadapi oleh penduduk miskin di desa Pandanrejo.
2. Menganalisis peran modal sosial (*social capital*) terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
3. Menganalisis peran modal sosial (*social capital*) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih integral dan partisipatif.
2. Memberikan rekomendasi kepada pelaksana UPK apakah program tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan.
3. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan mahasiswa untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang keuangan mikro terhadap peningkatan pendapatan dan modal sosial masyarakat miskin.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab II dari penelitian ini memuat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang mendukung penelitian. Diantaranya yaitu tinjauan penelitian terdahulu, tinjauan umum tentang modal sosial, tinjauan umum tentang lembaga keuangan mikro, tinjauan teoritis pendapatan, pemahaman terhadap konsep kemiskinan, tinjauan umum tentang program gerakan terpadu pengentasan kemiskinan (Gerdu-Taskin), dan tinjauan umum tentang unit pengelola keuangan (UPK).

2.1. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu

Istilah keuangan mikro atau microfinance seringkali diperbincangkan dalam keseharian, hanya saja perbincangan tersebut saat ini masih terbatas wawancara saja. Padahal, penelitian mengenai keuangan mikro (microfinance) telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di luar negeri. Salah satu peneliti yang melakukan penelitian tentang keuangan mikro adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Asif Dowla tentang “Kami Percaya Pada Kredit: Pembangunan Modal Sosial Oleh Grameen Bank Di Bangladesh”, di tahun 2006 menunjukkan bahwa bagaimana pihak ketiga dapat memungkinkan penciptaan modal sosial dengan menggunakan studi kasus Grameen Bank di Bangladesh. Sangat benar bahwa penciptaan modal sosial bukanlah tujuan utama dari Grameen Bank. Bagaimanapun juga, dalam proses pemberian kredit pada kebanyakan wanita miskin, bank tersebut menyadari bahwa transaksi tersebut harus ditanamkan dalam konteks sosial. Dengan kata lain, untuk memastikan bahwa pengiriman kredit pada akhirnya mengarah pada perubahan kualitatif pada kehidupan anggotanya, maka bank harus menciptakan dan mengusahakan modal sosial. Makalah ini menunjukkan bahwa usaha yang sengaja untuk menciptakan kepercayaan, norma dan jaringan secara fundamental telah mengubah kehidupan anggotanya. Bagaimanapun juga, bank tersebut menunjukkan tanda dari “rasa sakit yang tumbuh.” Karena tekanan untuk mencapai daya tahan, maka beban kerja staf telah meningkat dengan sangat besar. Staf hampir tidak dapat

meneruskan pengumpulan angsuran dan menegosiasikan persoalan yang muncul dari salah pembayaran oleh beberapa peminjam. Mereka memiliki waktu yang lebih sedikit untuk menjelaskan kebijakan dan prosedur dan untuk memberi perantara sosial, yaitu, dengan memberi saran pada penggunaan pinjaman, dan sebagainya. Banyak anggota merasa bahwa bank tersebut telah kehilangan pandangan dari misinya dan telah menjadi bank untuk pengumpulan pinjaman saja. Hal ini cukup patut disayangkan karena bank tersebut kehilangan kepercayaan dari beberapa anggotanya yang mana bank tersebut telah berusaha untuk mendapatkannya.

Fakta bahwa Institusi Microfinance (MFIs) dapat menciptakan modal sosial memiliki implikasi kebijakan yang kuat. Ukuran tradisional dari keuntungan Microfinance sebagian besar melihat pada aspek ekonomi dan beberapa aspek non-ekonomi. Penelitian yang sangat sedikit telah membahas atau mencoba mengukur tingkatan modal sosial yang diciptakan oleh MFIs. Karena modal sosial merupakan kebaikan umum – dapat ditiadakan dan tidak bersaing – maka pasar tidak akan memberi kebaikan tersebut. Microfinance merupakan alat untuk memperbaiki kegagalan pasar dalam pasar kredit. Makalah ini menunjukkan bahwa microfinance memperbaiki jenis kegagalan pasar lainnya – berdasarkan pengawasan kebaikan umum. Dalam hal Grameen Bank, kebaikan umum yang diberikan adalah “kebaikan umum global”, karena modelnya digunakan diseluruh dunia. Aspek-aspek pembangunan modal sosial dari MFIs perlu dipertimbangkan dalam keseluruhan perdebatan mengenai kebutuhan akan subsidi untuk menjalankan program Microfinance yang berhasil.

Dalam makalah ini telah mengandalkan kebanyakan pada “deskripsi analitis” dari alat dimana pihak ketiga dapat menciptakan modal sosial. Di masa depan, rencananya adalah untuk mengukur dengan tepat bagaimana bank menciptakan kepercayaan, norma dan jaringan serta efek apa yang dimiliki pada produktivitas anggotanya. Lebih lanjut lagi, kami hanya membahas tentang keuntungan modal sosial. Sangat diketahui bahwa modal sosial juga memiliki sisi gelap. Misalnya, diketahui bahwa para peminjam jangka panjang dari Grameen memiliki taraf pembayaran kembali yang lebih rendah. Hal ini merupakan contoh

dari modal sosial negatif; anggota telah mengangkat modal sosial mereka untuk perbaikan ekonomi dan yang mengurangi ancaman sanksi yang menjalankan norma pembayaran kembali. Pada penelitian selanjutnya peneliti berencana untuk menggabungkan aspek-aspek negatif dari modal sosial dan menggambarkan bagaimana sisi gelap modal sosial mengurangi potensinya.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Modal Sosial (*Social Capital*)

Coleman mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal (*single entity*), tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen (1). Modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial; (2). Modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku (aktor) – baik individu maupun perusahaan – di dalam struktur tersebut (*within the structure*). Dari persepektif ini sama halnya dengan modal lainnya, modal sosial juga bersifat produktif, yakni membuat pencapaian tujuan tertentu yang tidak mungkin diraih bila keberadaannya tidak eksis (Yustika, 2006)

Menurut Putnam, kapital sosial menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan, yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi (Lawang, 2005).

Fukuyama (1996), dalam bukunya menyatakan “*Social capital can be denifed simply as set of informal values or norms shared among members of group that permits cooperation among them*”. (Modal sosial merupakan sekumpulan nilai informal yang menyebar diantara anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka).

Modal sosial yaitu segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, dan ditopang oleh nilai-nilai dan norma yang menjadi unsur-unsur utamanya seperti trust (rasa saling mempercayai), keimbal-balikan, aturan-aturan kolektif dalam suatu masyarakat dan sejenisnya (Hasbullah, 2006).

Menurut Bank Dunia ada dua versi definisi tentang kapital sosial. Yang pertama kapital sosial menunjuk pada ‘norma, institusi dan hubungan sosial yang

membentuk kualitas interaksi sosial dalam masyarakat', yang kedua modal sosial menunjuk pada 'norma, institusi dan hubungan sosial yang memungkinkan orang dapat bekerja sama'.

Pengertian modal sosial (*social capital*) dalam kajian ilmu-ilmu sosial kontemporer, terkait dalam perilaku kooperatif yang terorganisasikan secara horisontal, meski sering kali tidak formal, yang bisa mendorong pada adanya keteraturan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan negara, bukan hubungan-hubungan domonasi dan otoritarianisme.

Modal sosial (*social capital*) itu bisa ditemukan dalam unit-unit sosial di masyarakat mulai dari yang paling kecil dan sederhana seperti keluarga, rukun warga, atau jamaah pengajian, kelompok tani sampai yang paling besar dan kompleks seperti organisasi kemasyarakatan, LSM, asosiasi profesi, bahkan institusi negara.

Pada saat ini banyak dijumpai bukti empiris bahwa modal sosial (*social capital*) memberikan kontribusi yang signifikan pada perkembangan jangka panjang suatu perusahaan, dalam menumbuhkan suatu peluang, dibutuhkan suatu ketersediaan modal jangka panjang. Komposisi yang selama ini digunakan antara modal alam, modal fisik dan modal manusia perlu dikembangkan dengan menambahkan modal sosial (*social capital*). Modal sosial (*social capital*) mengacu pada nilai-nilai individu yang bersifat sosial, hubungannya dengan budaya dalam masyarakat, norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu interaksi antar individu-individu dan institusi dimanapun mereka berada. Modal sosial (*social capital*) merupakan suatu perekat yang menjaga kesatuan masyarakat, tanpa adanya modal sosial (*social capital*) dimana hubungan antar masyarakat akan runtuh, dan saat ini banyak sekali contoh mengenai krisis tersebut.

Dalam laporan tahunannya yang berjudul *Entering the 21st century*, misalnya Bank Dunia mengungkapkan bahwa tingkat modal sosial (*social capital*) memiliki dampak yang signifikan terhadap proses-proses pembangunan (*World Bank*, 2000).

Namun diingatkan oleh Tonkiss (2000), bahwa modal sosial (*social capital*) barulah bernilai ekonomis kalau dapat membantu individu atau kelompok

misalnya untuk mengakses sumber-sumber keuangan, mendapatkan informasi, menemukan pekerjaan, merintis usaha, dan meminimalkan biaya transaksi.

Modal sosial mirip dengan bentuk-bentuk modal lainnya, dalam arti modal sosial juga bersifat produktif. Modal sosial dapat dijelaskan sebagai produk relasi manusia satu sama lain, khususnya relasi yang intim dan konsisten. Modal sosial menunjukkan pada jaringan, norma dan kepercayaan yang berpotensi pada produktivitas masyarakat. Namun demikian, modal sosial berbeda dengan modal financial, karena modal sosial bersifat kumulatif dan bertambah dengan sendirinya (*self-reinforcing*) (Putnam, 2002). Modal sosial tidak akan habis jika dipergunakan, melainkan semakin meningkat. Rusaknya modal sosial lebih sering disebabkan bukan karena dipakai, melainkan karena modal sosial tidak dipergunakan. Berbeda dengan modal manusia, modal sosial juga menunjuk pada kemampuan orang untuk berasosiasi dengan orang lain. Berdasarkan pada norma-norma dan nilai bersama, asosiasi antar manusia tersebut menghasilkan kepercayaan yang pada gilirannya memiliki nilai ekonomi yang besar dan terukur (Fukuyama, 2002). Terkait ini, ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), norma-norma (*norms*) dan jaringan-jaringan (*networks*).

2.2.1. Kepercayaan (*Trust*)

Sebagaimana dijelaskan oleh Fukuyama (2002) kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma-norma yang dianut bersama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini. Kepercayaan sosial pada dasarnya merupakan produk dari modal sosial yang baik. Adanya modal sosial yang melahirkan kehidupan sosial yang harmonis (Putnam, 2002).

2.2.2. Jaringan (*Networks*)

Infrastruktur dinamis dari modal sosial berwujud jaringan-jaringan kerjasama antar manusia (Putnam, 2002). Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan

memperkuat kerjasama. Masyarakat yang sehat cenderung memiliki jaringan-jaringan sosial yang kokoh. Orang mengetahui dan bertemu dengan orang lain. Mereka kemudian membangun inter-relasi yang kental, baik bersifat formal maupun informal. Putnam (2002) beragumen bahwa jaringan-jaringan sosial sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggotanya serta manfaat-manfaat dari pertispasinya itu.

2.2.3. Norma (*Norms*)

Norma-norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai nilai, harapan-harapan dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-norma dapat bersumber dari agama, panduan moral, maupun standar-standar sekuler, seperti halnya kode etik profesional. Norma-norma dibangun dan berkembang berdasarkan sejarah kerjasama di masa lalu dan diterapkan untuk mendukung iklim kerjasama (Putnam, 2002, Fukuyama, 2002). Norma-norma dapat merupakan prakondisi maupun produk dari kepercayaan sosial.

Modal sosial memiliki beberapa konsep, konsep dasar modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma dan jaringan (*network*), sedangkan konsep tambahan terdiri dari tindakan sosial, interaksi sosial dan sikap. *Trust* yang artinya kepercayaan, keyakinan atau juga rasa percaya berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya. Jaringan (*network*) kalau ditambah dengan pengaman sosial dibelakangnya (*jaring pengaman sosial - social safety net*) menunjuk pada arti dan fungsi jaring itu dapat menyangga orang yang sedang jatuh dengan daya lentur sedemikian sehingga orang itu tidak mati karena kena benturan, dan lebih dari itu orangnya tidak jatuh terus ke bawah sehingga bisa mati. Jaringan kerja artinya kurang lebih sebagai berikut : ada ikatan antar simpul (orang atau anggota) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) yang diikat dengan kepercayaan dan dipertahankan dengan norma yang mengikat kedua belah pihak. Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Sifat norma kurang lebih sebagai berikut: norma itu muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan, artinya kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati

oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Jaringan yang terbina lama dan menjamin keuntungan kedua belah pihak secara merata, akan memunculkan norma keadilan. Yang melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras pula (Lawang, 2005).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat, khususnya dalam kegiatan kemitraan perlu adanya pemanfaatan modal sosial (*social capital*) yang ada di wilayahnya, supaya dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan tercipta dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pola kerjasama yang disepakati.

2.3. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*)

2.3.1. Asal-Usul Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Indonesia adalah negara berkembang pertama yang mendirikan sistem keuangan mikro komersial berskala besar. Ini berawal diakhir abad 19, lebih dari seratus tahun yang lalu, Badan Kredit Desa-bank milik desa yang sekarang berada di bawah pengawasan Bank Rakyat Indonesia (BRI) mulai memberikan pinjaman mikro komersial yang terus berlanjut hingga hari ini. Bank Dagang Bali (BDB), yang didirikan pada tahun 1970, adalah bank swasta tertua yang memiliki izin di sebuah negara berkembang yang berfokus pada kegiatan keuangan mikro komersial. BDB memiliki pengalaman panjang di sektor informal dan pemberian pinjaman informal, selain itu menyediakan pelayanan simpan pinjam yang telah menghasilkan keuntungan sejak tahun pertama dibuka.

Pada tahun 1983, pemerintah Indonesia memulai reformasi besar-besaran di bidang keuangan dengan menderegulasi suku bunga untuk sebagian besar pinjaman dan simpanan, dan memutuskan bahwa BRI, bank komersial milik negara yang diberi mandat untuk menyediakan jasa keuangan di daerah pedesaan, akan mentransformasi 3.600 Unit Desa-nya, yang semula bertindak sebagai agen penyalur (*channeling agent*) bagi program kredit pedesaan yang disubsidi oleh pemerintah, menjadi perantara keuangan mikro komersial.

Bank-bank ini, serta lembaga-lembaga keuangan mikro lainnya, terus menghasilkan keuntungan dan menjangkau jutaan nasabah melalui layanan simpan pinjam kepada para nasabah mikro. Krisis Asia Timur mulai menghantam Indonesia pada tahun 1997. jatuhnya nilai rupiah, melonjaknya inflasi, pengangguran, kekurangan pangan, dan harga tinggi menyebabkan kerusuhan sosial di berbagai daerah. Pada tahun 1998, utang luar negeri milik bank-bank komersial telah mencapai tiga kali ekuitas mereka, dan kredit macet melonjak secara dramatis karena para peminjam tidak mampu untuk membayar. Indonesia yang mengalami ketidakstabilan politik, krisis ekonomi yang luar biasa, dan kekacauan keuangan. Dengan runtuhnya perusahaan-perusahaan besar, BRI Unit Desa terus meningkatkan jangkauannya, menagih pinjaman, menghimpun simpanan, dan tetap menghasilkan keuntungan. Lembaga keuangan mikro komersial lainnya juga terus bertahan dalam menghadapi krisis (Robinson, 2004).

2.3.2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro (*Microfinance*)

Menurut Robinson (2004) mengemukakan bahwa lembaga keuangan mikro merupakan pelayanan keuangan berskala kecil yang disediakan bagi rakyat berpenghasilan rendah. Lembaga keuangan mikro (*microfinance*) menurut *Asian Development Bank* (ADB), adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1). Lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2). Lembaga semiformal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3). Sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

“Microfinance is a financial safety net and it will also act as a social safety net. developing the micro business will fulfill the financial needs of the rural people, and this is the financial safety net. This eventually will build the social safety net as it will bring values to micro recognition as well as social appreciation that contribute to enhance their social function”. (Keuangan mikro adalah suatu cara aman keuangan dan itu juga akan bertindak sebagai suatu cara

aman sosial mengembangkan bisnis yang mikro akan memenuhi kebutuhan keuangan orang-orang di pedesaan, dan ini adalah cara aman keuangan itu. Ini secepatnya akan membangun cara aman sosial yang ketika itu akan membawa nilai-nilai ke pengenalan mikro seperti halnya penghargaan sosial yang berperan untuk tingkatkan fungsi sosial mereka).

“There are two success criterias in providing micro finance: (1). Is doing good, which is creating value for society, and (2.) Is doing well, which is making profit to ensure sustainability”. (Ada dua ukuran-ukuran sukses di dalam menyediakan keuangan mikro: (1). Melakukan baik, yang mana adalah menciptakan nilai untuk masyarakat, dan (2). Melakukan dengan baik, yang mana adalah membuat laba untuk memastikan ketahanan (Anonymous,2005).

2.3.3. Kaitan Lembaga Keuangan Mikro dengan Kemiskinan

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi disini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan nilai tambah, sehingga upaya peningkatan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intemediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Pengentasan kemiskinan dapat dilaksanakan melalui banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tak langsung. Usaha ini dapat berupa *transfer payment* dari pemerintah misalnya, program pangan, kesehatan, pemukiman, pendidikan, keluarga berencana, maupun usaha yang bersifat produktif misalnya melalui pinjaman dalam bentuk *micro credit*.

Secara hipotesis, kaitan antara pemberdayaan kredit mikro dengan upaya pengentasan kemiskinan merupakan pintu masuk relatif mudah bagi orang yang akan menjadi pengusaha pemula. Jika pengusaha pemula ini tumbuh dan

berkembang akan terentaskan karena menjadi pengusaha atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya : 2005).

Menurut Robinson (2000), dalam bukunya menyatakan pinjaman dalam bentuk *micro credit* merupakan salah satu upaya yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Hal tersebut didasarkan bahwa pada masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi diantara mereka, yang mencakup: (1). Masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, (2). Masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan (3). Masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak (Wijono, 2005).

Pendekatan yang dipakai dalam rangka pengentasan kemiskinan tentu berbeda-beda untuk ketiga kelompok masyarakat tersebut agar sasaran pengentasan kemiskinan tercapai. Bagi kelaompok pertama akan lebih tepat jika digunakan pendekatan langsung berupa program pangan, subsidi atau penciptaan lapangan pekerjaan. Sedangkan bagi kelompok kedua dan ketiga, lebih efektif jika digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UKM, pengembangan berbagai jenis pinjaman mikro atau mensinergikan UKM dengan para pelaku Usaha Menengah maupun Besar.

2.4. Tinjauan Teoritis Pendapatan

2.4.1. Definisi Biaya

Soetiesna, 1993 (*dalam* Aisyah, 2003), berpendapat bahwa biaya dalam ilmu ekonomi dinilai dari nilai oportunitas. Sedangkan dalam akuntansi, biaya berhubungan dengan suatu pembelanjaan (pengeluaran) yang *expenditure* (suatu penurunan dalam asset dan menambah hutang) yang dibuat untuk menjamin suatu manfaat ekonomis, yang umumnya merupakan sumber yang dapat menghasilkan pendapatan atau income.

Menurut Rosyidi, 1999 (*dalam* Aisyah, 2003), biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh

pengusaha untuk dapat menghasilkan output yang merupakan nilai semua faktor produksi yang dipergunakan untuk menghasilkan (memproduksi) output.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, biaya merupakan semua pengeluaran yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Dalam hal ini biaya berhubungan dalam hal barang yang akan diproduksi sampai dengan akan dijual.

Jenis pengeluaran menurut Mubyarto (1987), dibagi menjadi dua yaitu :

1. Pengeluaran tetap atau biaya tetap adalah jenis biaya yang besar kecilnya tidak tergantung dari besar kecilnya produksi, misalnya sewa atau bunga tahunan yang berupa uang.
2. Pengeluaran tidak tetap atau biaya variabel adalah biaya yang besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, misalnya pengeluaran untuk bibit, biaya persiapan dan pengolahan tanah.

Dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan nilai yang dikeluarkan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya – biaya yang dikeluarkan dapat dibagi menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel.

2.4.2. Definisi Pendapatan

Pendapatan didefinisikan sebagai nilai produk total dalam jangka waktu tertentu, baik yang dijual maupun yang tidak dijual. Jangka waktu pembukuan umumnya setahun dan mencakup semua produk yang :

1. Dijual.
2. Dikonsumsi rumah tangga
3. Digunakan dalam usaha.
4. Digunakan untuk pembayaran.
5. Disimpan atau digudangkan pada akhir tahun.

Selisih antara pendapatan kotor usaha dan pengeluaran total usaha disebut pendapatan bersih atau keuntungan. Secara matematis dapat ditulis :

$$\pi = TR - TC$$

Keterangan :

π : Keuntungan.

TR : Penerimaan Total.

TC : Biaya Total.

(Soekartawi, 2002)

Berdasarkan hal tersebut diatas diperoleh kesimpulan bahwa penerimaan atau pendapatan kotor merupakan nilai produk total usaha dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan keuntungan atau pendapatan bersih adalah selisih antara penerimaan dengan total biaya yang dikeluarkan.

2.5. Pemahaman Terhadap Konsep Kemiskinan

2.5.1. Pengertian Kemiskinan

Secara harafiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin di beri arti “tidak berharta-benda” (Poerwadarminta,1976). Dalam pengertian yang lebih luas, kemiskinan dapat di konotasikan sebagai suatu kondisi ketidak-mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok, sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial lain.

Definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang / kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas (Sulistiani, 2004).

Bank Dunia mendefinisikan kemiskinan sebagai *Poverty is concern with absolute standart of living of part of society*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan adalah terkait dengan batas absolut standar hidup sebagian masyarakat miskin (Sumodiningrat, 1999)

Berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga macam, yaitu kemiskinan *absolut*, kemiskinan *relatif* dan kemiskinan *struktural*. Dari ketiga sudut pandang tersebut, penulis membatasi diri dan lebih menekankan pada kemiskinan kemiskinan struktural, karena pemahaman dari bentuk kemiskinan ini relatif lebih mengena

dalam konteks kesulitan dalam memperoleh kredit dari bank, karena tidak memiliki harta sebagai barang jaminan.

Definisi dan pengertian kemiskinan yang lebih lengkap dalam arti sesuai dengan kenyataan dan secara konseptual jelas dikemukakan oleh Robert Chambers (1987). Inti dari masalah kemiskinan sebenarnya terletak pada apa yang disebut *deprivation trap* atau perangkap kemiskinan (Anonymous, 2003).

Konsep kemiskinan bersifat multidimensional, oleh karena itu cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, menurut Tjokrowinoto kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata; tetapi kemiskinan menyangkut soal kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar, dan kemiskinan terinfeksi dalam budaya kemiskinan yang diwarisi dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Definisi Penduduk miskin menurut Bank dunia (Kompas, 08 November 2001) adalah mereka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari 2 Dollar per hari (setara Rp. 20.000,- dengan kurs Rp. 10.000,-/dollar AS). Sedangkan pendapat dari Adelman menyebutkan definisi kemiskinan sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan gizi minimalnya untuk mengganti kalori pada tingkat aktifitas rata-rata terpenuhi.

Kemiskinan relatif didasarkan pada pemikiran tentang bagaimana pola pembagian pendapatan, antara komunitas miskin, menengah dan kaya. Antara lain yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah bagaimana pembagian prosentasi pendapatan secara proporsional yang terjadi pada golongan miskin, ekonomi menengah dan kaya terjadi dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan untuk golongan miskin, ekonomi menengah dan kaya yang ideal harus proporsional. Jika tidak mencapai proporsi yang baik, maka dikatakan bahwa dalam masyarakat tersebut telah terjadi ketimpangan.

Tabel 1. Distribusi Pendapatan Penduduk di Indonesia

Tahun	Kelompok Pendapatan		
	40% terendah	40% menengah	20% tinggi
1976	11.15	32.12	56.73
1978	18.13	35.53	45.35
1980	19.55	38.28	42.27
1981	20.44	37.46	42.1
1984	20.75	37.28	41.97
1987	20.87	37.48	41.65
1990	21.31	36.75	41.94

Sumber : Diolah dari berbagai sumber.

Berdasarkan tabel tersebut diatas maka diketahui bahwa pada tahun 1976 terjadi kesenjangan yang sangat mencolok, karena pendapatan yang diterima oleh 40% kaum miskin hanya 11,15%. Dan kondisi tersebut berangsur-angsur membaik dengan adanya peningkatan prosentasi pendapatan yang diterima oleh kaum miskin. (Sulistiani, 2004).

2.5.2. Sebab-Sebab Kemiskinan

Beberapa penyebab kemiskinan menurut Kartasasmita (1993) yaitu:

1. Rendahnya taraf Pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Untuk mencegah ini perlu adanya program wajib belajar sembilan tahun dan juga otonomi pendidikan.

2. Rendahnya derajat kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan prakarsa. Terjaminnya kesehatan seseorang akan membuat dirinya rajin bekerja sehingga pendapatannya dapat meningkat dan kesejahteraannya juga meningkat.

3. Terbatasnya lapangan kerja

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan, selama itu pula ada harapan untuk memutus lingkaran kemiskinan itu.

4. Kondisi keterisoliran

Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berbudaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerakan kemajuan yang dinikmati oleh masyarakat lainnya.

Sharp dalam Koncoro (1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola dalam kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang rendah berarti produktivitasnya rendah. Rendahnya sumber daya manusia ini diakibatkan oleh rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses ke modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*).

2.5.3. Tolak Ukur kemiskinan

Untuk mengetahui keadaan seseorang digolongkan dalam keadaan miskin atau tidak miskin, maka dibuatlah suatu standar yang disebut sebagai garis kemiskinan. Namun karena sudut pandang yang berbeda-beda diantara para ahli mengenai standar kemiskinan, maka munculah sebagai pendapat mengenai standar kemiskinan itu sendiri.

Kasus kemiskinan di Indonesia, secara umum memakai standar kemiskinan dari Bank Dunia, yakni meraka yang menyandarkan hidupnya pada pendapatan kurang dari 2 Dollar per hari (setara dengan Rp. 20.000,- dengan kurs Rp. 10.000,- per Dollar AS), Kompas (8 November 2001)

Apabila kita berniat membantu dan agar bantuan kita efektif untuk memperkuat perekonomian bagi orang-orang miskin menurut Erwidodo, 1999 (*dalam* Susilo, 2005) maka harus ditemukan akar permasalahannya. Akar tersebut umumnya ada dalam pikiran dan organisasi kita. Tanpa disadari, gagasan tersebut

cenderung untuk menyetir pikiran kita dalam bentuk kegiatan yang ditentukan dari atas (*top down intervention*) dan tidak menjunjung tinggi cita-cita dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk mengembangkan keswadayaan.

Rumah tangga merupakan tempat yang paling baik untuk peletakan landasan bagi perkembangan manusia berkualitas. Tentang karakteristik rumah tangga miskin menurut Soemarjan, 1997 (dalam Susilo, 2005) dapat dilihat dari pendidikan, umur kepala rumah tangga, macam pekerjaan kepala keluarga, dan anggota keluarga. Ada dugaan dari sejumlah ahli bahwa sebagian besar kepala keluarga rumah tangga miskin di pedesaan adalah wanita berumur tua. Jika ini benar maka program penanggulangannya adalah dengan bantuan sosial, bukan untuk memproduktifkan tenaga atau aset yang mereka miliki. Sebaliknya untuk tenaga berumur produktif, walaupun dengan pendidikan rendah tetapi masih dapat diharapkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan produksi yang akan dikembangkan baik pada aktivitas pertanian maupun non pertanian.

Data karakteristik rumah tangga miskin menurut Anonymous, 1997 (dalam Susilo, 2005) di 5 (lima) propinsi di Indonesia bahwa rumah tangga miskin di Lampung, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Tenggara pada tahun 1993 mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Rata-rata umur kepala rumah tangga miskin berkisar antara 37 sampai 42 tahun dan hampir seluruhnya kepala rumah tangga adalah pria.
2. Tingkat pendidikan kepala rumah tangga sebagian besar (83% - 97%) tidak pernah mengenyam pendidikan hingga lulus SD. Data ini menunjukkan betapa rendahnya kualitas SDM, rumah tangga miskin di pedesaan.
3. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga miskin berkisar antara 3,7 - 5,2 orang per Kepala Keluarga (KK). Diantaranya sekitar 2,5 – 2,6 orang anggota keluarga bekerja, sisanya tidak bekerja seperti anak-anak di bawah umur 10 tahun, orang lanjut usia atau orang sakit. Dengan data ini menunjukkan bahwa mereka telah melibatkan sebagian besar anggota keluarga untuk mencari nafkah termasuk isteri dan anak dewasa.
4. Kondisi tempat tinggal dapat digunakan sebagai salah satu indikator fisik yang mudah dilihat untuk mengidentifikasi keluarga miskin.

5. Lahan yang dimiliki bervariasi.
6. Sumber pendapatan rumah tangga miskin pada agrosistem di 5 propinsi tersebut bervariasi mulai dari pertanian dan kegiatan non pertanian.
7. Pekerjaan rumah tangga miskin selain di pertanian mereka juga sebagian bekerja pada kegiatan non pertanian.
8. Curahan hari kerja rumah tangga pada berbagai kegiatan berbanding lurus dengan kontribusi pendapatan terhadap total pendapatan rumah tangga artinya makin besar curahan kerja pada kegiatan tertentu makin besar kontribusinya pada total pendapatan rumah tangga.

2.6. Tinjauan Umum Tentang Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin)

Program Gerdu-Taskin dirancang khusus sebagai manifestasi sikap tanggap Pemerintah Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jawa Timur melalui pendekatan TRI DAYA. Dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Program Gerdu-Taskin telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang/sector jasa/pelayanan keuangan mikro kecil yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK). Adapun tujuan dari Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) adalah:

1. Tujuan Umum

Program Gerdu-Taskin bertujuan mewujudkan kemandirian masyarakat, melalui pendekatan Tridaya dengan fokus utama penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan peran serta aktif RTM dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggungjawab.
- b. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha dalam rangka peningkatan pendapatan dan kesejahteraan bagi RTM Berpotensi.
- c. Mengembangkan berbagai pola perluasan lapangan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran.

- d. Menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kualitas rumah tinggal dalam rangka mengurangi beban pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas hidup bagi RTM Renran.
- e. Mengoptimalkan fungsi fasilitas umum Desa/Kelurahan sebagai investasi yang mendukung pengembangan ekonomi lokal dan penanggulangan kemiskinan.
- f. Memperkuat kapasitas kelembagaan agar berfungsi dan berperan optimal sebagai pengelola program penanggulangan kemiskinan maupun pengelolaan pembangunan Desa/Kelurahan pada umumnya.
- g. Mengoptimalkan kemitraan antar Stakeholders dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan secara partisipatif.

Secara umum ruang lingkup Program Gerdu-Taskin meliputi : (1). Program Tridaya, yaitu Pemberdayaan Manusia, Pemberdayaan Usaha, Pemberdayaan Lingkungan, (2). Program Penguatan, dialokasikan pada sejumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan Program Gerdu-Taskin sebelumnya, (3). Program Pemandirian, dialokasikan pada Desa/Kelurahan miskin peserta Program Penguatan berprestasi berdasarkan hasil Evaluasi Perkembangan Kelembagaan dan usaha UPK, (4). Manajemen Program, dilaksanakan dengan mekanisme kegiatan yang memungkinkan terlaksananya prinsip-prinsip partisipasi, transparan, dan akuntabel, (5). Pengendalian Program, dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan serta menjaga mutu pelaksanaan sehingga dapat berhasil secara optimal, (6). Pendampingan, dilaksanakan guna memfasilitasi program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme kegiatan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, sampai dengan pelestarian program (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2006).

Dalam penetapan alokasi Program Gerdu-Taskin menggunakan acuan hasil PKBI BPS Jawa Timur Tahun 2001 yang dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan landasan

gerak operasional yang digunakan dalam Program Gerdu-Taskin berlandaskan atas prinsip-prinsip sebagai berikut: partisipasi, keswadayaan, transparan dan akuntabel, keterpaduan, otonomi dan desentralisasi, peningkatan peran dan kapasitas kaum perempuan, dan keberlanjutan. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2006: 6,12).

Dalam pengelolaan Gerdu-Taskin secara langsung dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK). Hal ini sekaligus untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi KPK Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam mengembangkan berbagai kebijakan dan penganggulangan kemiskinan di daerahnya. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2006: 13). Di tingkat propinsi organisasinya terdiri dari: (1). Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Propinsi, (2). Sekretariat Tetap (Sektap) Propinsi, dan (3). Tim Pendamping Propinsi (TPP). Organisasi pengelola ditingkat Kabupaten/Kota terdiri atas: (1). Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Kabupaten/Kota, (2). Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten/Kota, dan (3). Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM), (4). Tim Fasilitasi Kecamatan (TFK), dan (5). Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Dan organisasi pengelola tingkat Desa/ Kelurahan antara lain: (1). Unit Pengelola Keuangan (UPK), (2). Kelompok Masyarakat (Pokmas), dan (3). Tim Pelaksana (Timlak).

Untuk mekanisme kegiatan Program Gerdu-Taskin, meliputi tahap-tahap: sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelestarian (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2006: 24).

1. Sosialisasi, pada dasarnya dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan, baik formal maupun informal. Sosialisasi dilaksanakan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten, Kota dan Desa/Kelurahan dengan menggunakan berbagai media sesuai dengan karakteristik lokal.
2. Perencanaan, dilakukan melalui rangkaian kegiatan yang meliputi : klarifikasi rumah tangga miskin, klasifikasi rumah tangga miskin, identifikasi kebutuhan, musdes perencanaan, penulisan usulan Desa/Kelurahan, verifikasi usulan.

3. Pelaksanaan, dalam pelaksanaan ini terbagi dalam 4 tahapan diantaranya : pencairan dana, lokakarya pra pelaksanaan Kabupaten/Kota, musdes pra pelaksanaan, pelaksanaan terbagi menjadi 2 paket, yaitu : (1). Pelaksanaan paket 1 meliputi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan usaha, (2). Pelaksanaan paket 2 meliputi realisasi kegiatan pemberdayaan lingkungan.
4. Pertanggungjawaban, Program Gerdu-Taskin dipertanggungjawabkan dalam bentuk pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban publik.
5. Pelestarian, keberlanjutan program dan pelestarian hasil-hasilnya merupakan tanggungjawab penuh masyarakat, terutama rumah tangga miskin.

Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan proses, mekanisme, tahapan dan target yang diharapkan, diperlukan manajemen pengendalian program. Adapun instrumen yang digunakan dalam manajemen pengendalian Program Gerdu-Taskin terdiri atas : Pelaporan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, serta pendampingan. (Pedoman Umum Program Gerdu-Taskin, 2006:37).

2.7. Tinjauan Umum Tentang Unit Pengelola Keuangan (UPK)

2.7.1. Definisi Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan atau UPK (Anonymous, 2006a) adalah pengelola program Gerdu-Taskin di Desa/Kelurahan. UPK dibentuk melalui musyawarah Desa/Kelurahan, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah. Apabila di desa/Kelurahan lokasi sudah terbentuk lembaga yang sama atau sejenis dengan UPK, maka sepanjang lembaga tersebut fungsional, tidak bermasalah dan disepakati dalam musyawarah, maka Desa/Kelurahan dapat memanfaatkan lembaga tersebut sebagai UPK. UPK sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.

Penentuan Pengurus UPK (Anonymous, 2006a) dipilih berdasarkan kriteria:

1. Warga Desa/Kelurahan setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab.
2. Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan.

3. Bukan aparat pemerintah Desa/Kelurahan maupun anggota BPD.
4. Bukan anak atau isteri Kepala Desa/Kelurahan.
5. Dapat berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Tugas dan tanggung jawab UPK (Anonymous, 2006a), meliputi :

1. Melakukan klarifikasi dan klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM).
2. Memfasilitasi identifikasi kebutuhan untuk menggali usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan RTM maupun masyarakat Desa/Kelurahan.
3. Berdasarkan musyawarah desa, menetapkan skala prioritas kebutuhan dan mengajukan usulan Desa/Kelurahan kepada sektap Kabupaten/Kota.
4. Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.
5. Memfasilitasi pembentukan Pokmas UEP dan melayani permohonan pinjaman.
6. Melakukan analisis kelayakan usaha dan peminjam serta menetapkan persetujuan dana pinjaman yang diusulkan oleh Pokmas UEP.
7. Menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam dan pengelolaan kegiatan lainnya.
8. Melakukan perjanjian dengan Pokmas UEP maupun pihak lain dalam bentuk akad.
9. Membuka rekening atas nama UPK.
10. Bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pinjaman dari Pokmas UEP sesuai akad pinjaman.
11. Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program.
12. Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi UPK sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
13. Memberikan bantuan teknis kepada Pokmas UEP.
14. Mendokumentasikan kegiatan TRI DAYA.

2.7.2. Tinjauan Tentang Penguatan UPK

2.7.2.1. Tujuan

1. Tujuan Umum

Kegiatan Penguatan UPK Program Gerdu-Taskin bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi UPK, menyehatkan dan

menyelamatkan UPK yang belum optimal dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengembangkan UPK sebagai lembaga keuangan mikro untuk diarahkan menjadi embrio BUMDes.
- b. Meningkatkan kemampuan UPK dalam mengembangkan usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil yang berbasis potensi sumberdaya lokal.
- c. Meningkatkan kemampuan Pokmas UEP dalam mengembangkan usaha RTM.
- d. Meningkatkan kemampuan UPK dalam mendukung kegiatan sosial bagi RTM Rentan.
- e. Meningkatkan kemitraan antara pihak terkait dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

2.7.2.2. Ruang lingkup

1. Ruang lingkup Kegiatan Penguatan UPK meliputi : (1). Peningkatan kapasitas UPK, (2). Pengendalian Kegiatan, dan (3). Pendampingan, secara rinci ruang lingkup kegiatan penguatan UPK dijelaskan sebagai berikut:

a. Peningkatan Kapasitas UPK

Pengembangan permodalan UPK adalah kegiatan untuk menambah permodalan UPK yang akan digunakan untuk usaha simpan pinjam serta peningkatan usaha sektor riil UPK. Pengembangan permodalan UPK juga dilakukan dengan menggalakkan simpanan masyarakat maupun sumber-sumber pembiayaan mikro lainnya.

b. Pengembangan Usaha UPK

Pengembangan usaha UPK merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja usaha baik sektor riil maupun usaha ekonomi produktif pokmas dalam rangka mempersiapkan UPK sebagai embrio BUMDes.

- c. **Pengadaan Sarana Prasarana UPK**
Pengadaan sarana prasarana UPK dilakukan untuk meningkatkan kelengkapan fisik organisasi yang menjadi prioritas kebutuhan dalam mendukung operasional kegiatann dan kinerja UPK.
 - d. **Pengembangan Kelembagaan UPK**
Pengembangan kelembagaan UPK di arahkan pada kegiatan fisilitasi yang bertujuan untuk pembenahan organisasi : (i). Penataan struktur dan personalia pengurus, (ii). Peningkatan status hukum, (iii). Penyempurnaan AD/ART, (iv). Peningkatan kemampuan manajemen organisasi, (v). Perluasan jaringan UPK untuk pengmbangan usaha sektor riil, dan (vi). Perintisan sistem keterjaminan sosial desa.
2. **Pengendalian Kegiatan**
Pengendalian kegiatan merupakan instrumen untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Kegiatan ini sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program secara maksimal. Pengendalian kegiatan meliputi: pelaporan, monitoring, pengawasan, dan bantuan teknis pendampingan.
 3. **Pendampingan**
Kegiatan pendampingan dilaksanakan guna memfasilitasi program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme keiatan mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban.

(Pemerintah Propinsi JATIM, 2006).

2.7.3. Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP)

Pokmas UEP (Anonymous, 2006a) merupakan himpunan dari beberapa Rumah Tangga Miskin (RTM) berpotensi yang bersepakat untuk memperoleh pinjaman dari UPK sesuai dengan kebutuhannya.

Satu Pokmas beranggotakan 5-10 RTM Berpotensi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan bidang usaha atau dasar lainnya. Setiap Pokmas UEP dipimpin oleh seorang ketua.

Tugas dan tanggung jawab Pokmas UEP (Anonymous, 2006a), meliputi :

1. Membuat dan menyetujui aturan kelompok.
2. Melaksanakan kesepakatan dengan UPK, khususnya berkaitan dengan ketentuan pinjaman.
3. Bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pengembalian pinjaman sesuai dengan akad pinjaman yang telah disepakati.
4. Mencatat kegiatan dan keuangan kelompok.
5. Melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan kegiatan ke UPK.

2.7.4. Tim Pelaksana (Timlak)

Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa/Kelurahan (Anonymous, 2006a) adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan. Timlak dibentuk melalui Musyawarah Desa dan sedapat mungkin melibatkan LKMD atau sebutan lain, ditetapkan dengan Surat Keputusan Desa/Lurah. Susunan Timlak sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota.

Adapun tugas dan tanggung jawab Timlak (Anonymous, 2006a), meliputi:

1. Membuat rencana kerja teknis pelaksanaan kegiatan beserta RAB-nya, yang selanjutnya diajukan ke UPK untuk dibahas.
2. Memberikan penjelasan dalam pembahasan Rencana Kerja dan RAB bersama UPK, Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, dan Wakil RTM yang terkait dengan program.
3. Memobilisasi potensi swadaya masyarakat desa/Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
4. Mengelola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan dan manusia.
5. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis kepada UPK.

III. KERANGKA KONSEP PENELITIAN

Bab III dari penelitian ini, berisi konsep penelitian, secara lebih rinci diuraikan bahasan mengenai kerangka pemikiran, hipotesis, batasan masalah, definisi operasional dan pengukuran variabel.

3.1. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan (*poverty*) merupakan problem kemanusiaan yang dapat ditemui dimanapun. Secara relatif, kemiskinan adalah sesuatu yang bersifat universal, perbedaan kemiskinan antara daerah atau antar negara, terletak pada perbedaan dalam kadar atau intensitas kemiskinannya. Salah satu faktor penghambat masyarakat miskin untuk meningkatkan status ekonominya, adalah terbatasnya peluang untuk memperoleh akses pembiayaan yang mudah prosedurnya dan murah biayanya.

Kemiskinan penduduk perkotaan di propinsi Jawa Timur merupakan fenomena sosial yang cukup mencolok. Pada tahun 1990, prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan Jawa Timur mencapai 21,9%. Kondisi prosentase penduduk miskin di daerah pedesaan Jawa Timur hanya mencapai 12,1% (BPS, 1992).

Untuk mendukung efektifitas program-program pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah perkotaan, diperlukan kajian mikro yang cukup mendalam untuk mengungkap kehidupan kaum miskin dan keluarganya khususnya dalam mengetahui peran modal sosial terhadap kinerja keuangan mikro dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan antara lain dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri yaitu dengan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro yang pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produktif. Meskipun kontribusi usaha kecil dan mikro semakin besar, namun hambatan yang dihadapi sangat besar, diantaranya kesulitan mengakses sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal.

Keuangan mikro (*microfinance*) berfungsi memberikan dukungan modal bagi pengusaha mikro (usaha rumah tangga; usaha pertanian; pedagang kecil; dsb) untuk meningkatkan usahanya, sehingga usaha mereka akan berjalan lebih lancar dan lebih “besar” (Boon, 2006). Dengan adanya keuangan mikro (*microfinance*) yang memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat miskin maka akan menjadikan masyarakat miskin lebih produktif sehingga pendapatannya semakin meningkat. Pendapatan seseorang tergantung pada harga yang diterima dari macam sumberdaya yang dikuasai, tenaga kerja, lahan dan modal dan jumlah sumberdaya yang mereka libatkan dalam proses produksi. Ketimpangan pembagian pendapatan dan timbulnya kemiskinan pada dasarnya terjadi karena ketimpangan dalam penguasaan sumberdaya produksi seperti tanah, modal, akses terhadap fasilitas dan informasi, termasuk pengetahuan dan keterampilan.

Dengan adanya modal sosial yang diwujudkan dalam (1). Kepercayaan (*trustworthiness*) yang meliputi kepercayaan terhadap pemimpin dan kesesuaian pendapat, (2). Jaringan sosial kelompok masyarakat miskin meliputi intensitas pertemuan dan kemauan bekerjasama, (3). Norma yang meliputi struktur kewajiban (*obligasi*) dan sanksi. Dengan adanya dukungan pembinaan dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) melalui kegiatan penyuluhan, pembinaan teknis, forum musyawarah desa (Musdes) dan rapat kelompok masyarakat (Pokmas) diharapkan nantinya kelompok masyarakat dapat mereduksi informasi-informasi dan dapat memberi kemudahan bagi masyarakat miskin dalam pengembangan usahanya.

Secara teoritis Möllering dalam Lawang (2005) mengatakan bahwa semakin tinggi saling percaya anytara mereka yang bekerjasama, semakin kurang resiko yang ditanggung, dan semakin kurang pula biaya (uang atau sosial) yang dikeluarkan. Masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi dalam suatu kegiatan kerja sama menunjukkan harapan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Tanpa adanya saling percaya yang merta antara satu orang denga orang lainnya, masyarakat itu sendiri akan disintegratif dan kepercayaan itu merupakan salah satu kekuatan sintetik yang paling penting dala masyarakat.

Puttnam dalam Lawang (2005) menyatakan bahwa jaringan sosial (*network*) adalah adanya ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Jaringan sosial rumah tangga miskin yaitu melalui program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dimana keanggotaan rumah tangga miskin dalam berbagai institusi memungkinkannya mampu mengatasi pelbagai masalah. Jaringan itu dapat mengetahui informasi yang berhubungan dengan masalah atau peluang atau apapun yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Jaringan sosial apapun harus diukur dengan fungsi ekonomi dan fungsi kesejahteraan sosial sekaligus. Fungsi ekonomi menunjuk pada produktivitas, efisiensi dan efektifitas yang tinggi, sedang fungsi sosial menunjuk pada dampak partisipatif, kebersamaan yang diperoleh dari suatu pertumbuhan ekonomi.

Blau dan Fukuyama dalam Lawang (2005) menyatakan bahwa norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Artinya kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya tidak akan terjadi. Kalau beberapa kali pertukaran prinsip saling menguntungkan dipegang teguh, dari situlah muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat keuanya diuntungkan dari pertukaran tersebut. Isi norma menyangkut hak dan kewajiban keduabelah pihak yang dapat menjamin keuntungan dari suatu kegiatan kerjasama.

Kemauan masyarakat miskin untuk bekerjasama demi mencapai tujuan bersama di dalam berbagai kelompok dan organisasi merupakan salah satu modal sosial (*social capital*). Faktor lain yang penting untuk diberdayakan adalah mengenai modal sosial (*social capital*) yang berada dalam sistem pola kemitraan itu sendiri, dimana modal sosial (*social capital*) merupakan bentuk sumber daya yang pelakunya berhubungan satu sama lain dan membentuk kelompok sosial. Jadi modal sosial (*social capital*) merupakan usaha pengakumulasian tingkah laku masing-masing individu dalam satu bentuk tertentu. Dari pendapat diatas dapat dikatakan juga bahwa melalui pengoptimalan modal sosial (*social capital*) maka akan memunculkan partisipasi individu, jaringan kerja lokal, jaringan sosial serta adanya sikap saling percaya yang mampu meningkatkan ketersediaan informasi dengan biaya rendah. Bahkan lebih dari itu, partisipasi dan jaringan kerja sosial

akan membuat kelompok lebih mudah untuk mencapai keputusan bersama dan mengimplementasikan dalam kegiatan bersama (Makkutana, 2005).

Dalam rangka upaya meningkatkan tumbuh dan kembangnya UPK sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan yang mampu memberikan pelayanan permodalan yang mudah, murah, cepat maka dilakukan langkah strategis berupa penataan dan pengembangan kelambagaan UPK melalui kegiatan penguatan UPK. Ruang lingkup kegiatan penguatan UPK meliputi : peningkatan kapasitas UPK, pengendalian kegiatan dan pendampingan. Dalam peningkatan kapasitas UPK ada pengembangan permodalan yang akan digunakan untuk simpan pinjam serta peningkatan usaha sektor riil UPK.

Dengan adanya tambahan modal, maka produktivitas akan meningkat sehingga pendapatanpun meningkat. Jadi, dengan adanya penguatan UPK berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota UPK. Sedangkan pada UPK reguler tidak adanya peningkatan produktivitas atau walaupun ada peningkatan tidak terlalu besar karena anggota Pokmas tidak mendapat tambahan modal untuk meningkatkan usahanya.

Untuk mempertahankan perputaran dana di UPK maka pengurus UPK diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif sejauh ini hanya terbatas pada jaminan yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan nasabah. Keberlanjutan UPK sangatlah tergantung pada tingkat kolektibilitas yang tinggi, sehingga bila terjadi penunggakan atau kemacetan dalam pembayaran pengurus harus segera tanggap dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikannya.

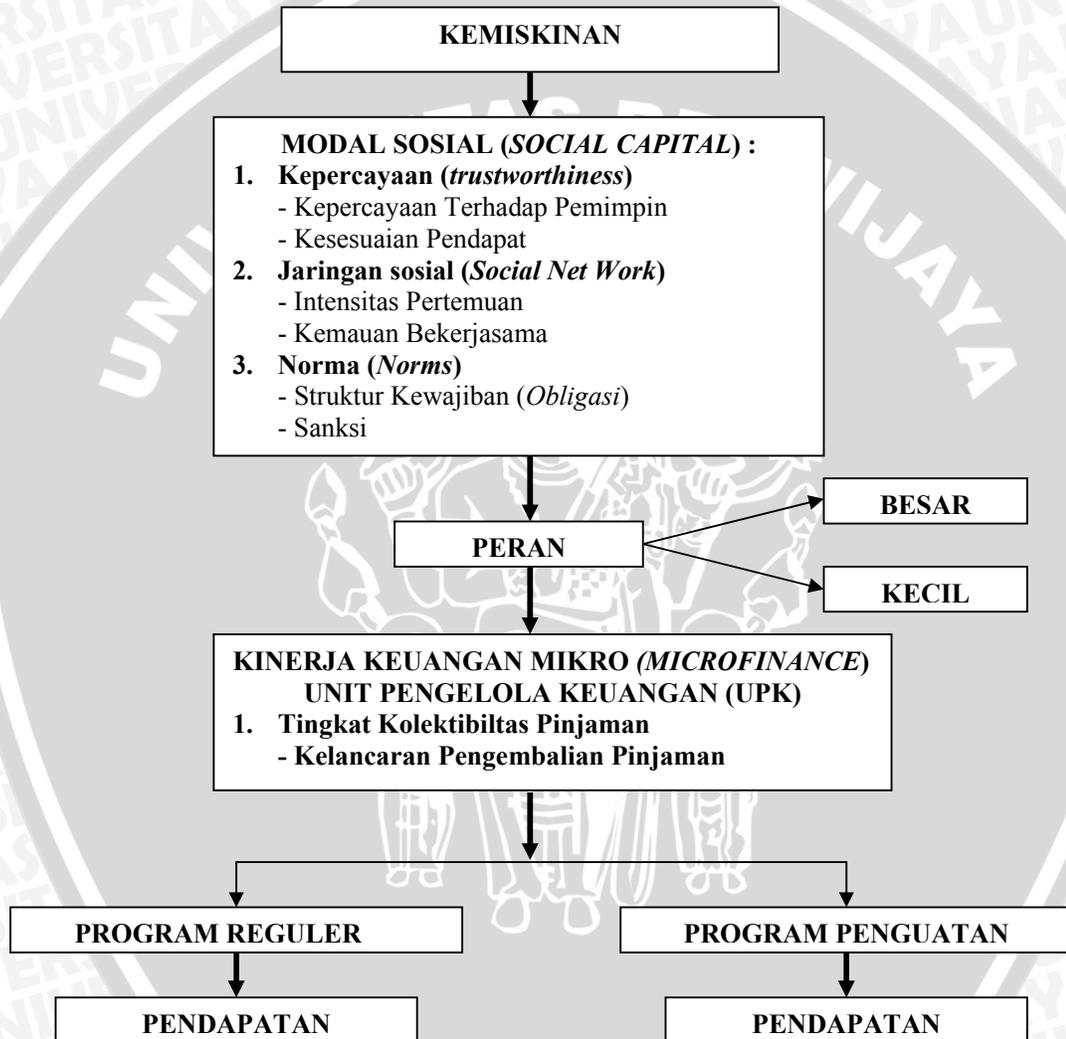
Untuk menyelesaikan adanya kolektibilitas bermasalah harus diketahui faktor penyebabnya. Salah satunya faktor sosial ekonomi anggota yaitu umur, pendidikan, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, jumlah tanggungan keluarga dan jenis usaha. Tingkat kedewasaan seseorang semakin banyak pengalaman akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan sehingga mempunyai tanggungjawab yang tinggi terhadap pengembalian pinjaman. Masyarakat yang tingkat pendidikannya lebih tinggi akan mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajibannya sehingga tidak akan melakukan tunggakan.

Pendapatan rumah tangga pada umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi dapat berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Tingkat pendapatan yang rendah menyebabkan anggota rumah tangga untuk bekerja atau berusaha lebih giat untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga besarnya pendapatan diduga berperan dalam pengembalian pinjaman, karena jika pendapatan rendah sedangkan kebutuhan untuk konsumsi belum terpenuhi maka prioritas pemenuhan kebutuhan adalah untuk konsumsi dan menunda untuk membayar pinjaman.

Jumlah anggota keluarga adalah semua anggota keluarga yang menjadi tanggungan rumah tangga peminjam. Terkadang anggota keluarga dari rumah tangga miskin tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja yang terdiri yaitu istri dan anak-anaknya tetapi dapat juga ayah dan ibu ataupun saudara-saudaranya. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka akan semakin tinggi pula biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga nasabah. Ada kecenderungan pendapatan yang diperoleh diprioritaskan untuk kebutuhan keluarganya, baru setelah itu untuk kebutuhan yang lainnya. Jika pendapatan yang diperolehnya sedikit namun jumlah anggota keluarganya banyak maka kebutuhan yang lain akan terabaikan seperti penundaan dalam pembayaran pinjaman.

Secara khusus keuangan mikro (*microfinance*) sangat penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat miskin. Lembaga keuangan sebagai pelayan keuangan berskala kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dimana dengan adanya keuangan mikro (*microfinance*) maka akan muncul hubungan timbal balik dalam suatu pengadaan kerjasama sehingga akan meningkatkan modal sosial (*social capital*) yaitu saling percaya, memahami dan berempati satu sama lain, sehingga nantinya harapan yang ingin terwujud bukan saja pendapatan yang meningkat signifikan. Tetapi juga tumbuhnya sikap saling menghormati, saling mempercayai dan saling menguntungkan dalam sebuah desain kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu antar peminjam modal yakni masyarakat miskin dan Unit Pengelola Keuangan (UPK). Dengan adanya kerjasama yang menguntungkan tersebut maka kerjasama antara Unit Pengelola Keuangan (UPK) dalam memberikan bantuan modal bagi masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, menggerakkan kembali ekonomi rakyat melalui pemberian modal usaha dan merehabilitasi atau membangun sarana dan prasarana ekonomi yang

mendukung sistem produksi, distribusi barang dan jasa, dan meningkatkan fungsi sarana dan prasarana ekonomi rakyat dengan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dan tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan yaitu kesejahteraan masyarakat miskin akan dapat terwujud. Secara sistematis, alur kerangka pemikiran dapat dilihat pada skema di bawah ini :



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian Peran Modal Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Mikro Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Pada Program Gerdu-Taskin.

3.2. Hipotesis

1. Diduga modal sosial (*social capital*) berpengaruh terhadap kinerja UPK dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
2. Diduga modal sosial (*social capital*) berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan penduduk miskin.

3.3. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menafsirkan hasil penelitian maka perlu pembatasan masalah, antara lain :

1. Tingkat Pengetahuan anggota terhadap peranan keuangan mikro yakni Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang diteliti adalah asal pengembangan, struktur organisasi, mekanisme pengelolaan Unit Pengelola Keuangan (UPK) "Gempar".
2. Peranan Modal Sosial (*social capital*) dibatasi pada Kinerja Keuangan Mikro melalui tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman oleh anggota pada UPK program reguler dan UPK program penguatan, yang diteliti adalah (1). Kepercayaan yang meliputi kepercayaan terhadap pemimpin dan kesesuaian pendapat; (2). Jaringan sosial yang meliputi intensitas pertemuan, kemauan bekerjasama; (3). Norma yang meliputi struktur kewajiban dan sanksi. Dalam Penelitian tentang peran modal sosial (*social capital*) terhadap kinerja keuangan mikro (*microfinance*) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin, yang dijadikan responden adalah masyarakat miskin yang terpilih menjadi anggota kelompok masyarakat pada lembaga keuangan mikro Unit Pengelola Keuangan (UPK) "Gempar".

3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.4.1. Definisi Operasional

1. Definisi umum tentang kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya, sehingga dalam setiap aktivitas maupun usaha menjadi sangat terbatas.
2. Peranan adalah tingkah laku yang diharapkan dari orang yang memiliki kedudukan dan status. Peranan merupakan aspek dinamis dari suatu status

(kedudukan). Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, maka ia telah menjalankan peranannya.

3. Modal merupakan sebagian dari nilai kekayaan yang mendatangkan penghasilan. Dalam perkembangannya, pengertian modal mengarah pada sifat fisik, dalam arti ditekankan kepada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang modal.
4. Modal sosial (*social capital*) adalah tindakan sosial yang timbul atas dasar rasa saling mempercayai dan solidaritas yang tinggi dalam suatu komunitas untuk kemajuan komunitas tersebut. Yang diukur melalui variabel:
 - 1) Kepercayaan (*trustworthiness*) adalah keyakinan dan rasa percaya yang berarti proses mempercayai sesuatu yang jelas sasarannya.
 - Kepercayaan adalah dorongan untuk memberi pengakuan dan melaksanakan tanggung jawab atau instruksi yang telah diputuskan oleh ketua atau pengurus Pokmas.
 - Kesesuaian pendapat adalah kesamaan sikap atau pandangan antar petani atau pedagang terhadap permasalahan usaha yang dihadapi.
 - 2) Jaringan sosial adalah kerja (bekerja) dalam hubungan antar simpul-simpul seperti halnya jaring (*net*).
 - Intensitas Pertemuan adalah banyaknya jumlah kehadiran anggota kelompok masyarakat dalam pertemuan rutin yang diadakan oleh pengurus UPK.
 - Kemauan bekerjasama adalah alasan yang mendasari seseorang untuk berinteraksi dengan pihak lain yang diwujudkan melalui kegiatan konsultasi ataupun diskusi antar pihak terkait (masyarakat miskin dengan pengurus UPK, masyarakat miskin dengan pengurus Pokmas ataupun antar masyarakat miskin selaku anggota kelompok masyarakat miskin).
 - 3) Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan, isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.

- Struktur Kewajiban (*Obligasi*) adalah salah satu bentuk rasa tanggung jawab Pokmas untuk memenuhi kewajiban mengembalikan pinjaman modal kepada UPK.
 - Sanksi adalah hukuman yang akan diterima oleh kedua belah pihak apabila tidak memenuhi kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
5. Kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
 6. Keuangan mikro merupakan pelayanan keuangan berskala kecil yang disediakan bagi rakyat berpenghasilan rendah atau Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfers* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (*insurance to poor and low-income households and their microenterprises*).
 7. Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola program Gerdu-taskin yang berupa lembaga keuangan mikro yang ada di Desa/Kelurahan.
 8. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok / angsuran pokok dan bunga oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterima kembalinya dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga / penanam lainnya.
 9. Pinjaman adalah sejumlah uang yang dipinjamkan dengan syarat tertentu, seperti jangka waktu pengembalian, tingkat bunga pinjaman, barang jaminan dan lain-lain.
 10. Keanggotaan adalah peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan kerjasama yang saling menguntungkan. Keanggotaan meliputi struktur anggota dan potensi anggota.
 11. Program Reguler adalah program yang diberikan kepada UPK pada program awal pembentukan/perintisan UPK.
 12. Program Penguatan adalah program yang diberikan UPK yang telah mendapat program awal untuk meningkatkan kinerja UPK.
 13. Tambahan Modal/pinjaman adalah besarnya dana yang diberikan UPK kepada anggotanya.

14. Produktivitas adalah banyaknya produksi yang dihasilkan dari usaha yang dilakukan oleh anggota.
15. Pendapatan adalah imbalan yang berasal dari kegiatan usaha yang termasuk didalamnya yaitu penjualan produk. Pendapatan diperoleh dari selisih total penerimaan usaha (TR) dengan total biaya (TC) yang dikeluarkan dengan satuan rupiah (Rp). Pendapatan disini adalah seluruh penghasilan rumah tangga yang diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan modal dari pinjaman UPK.
10. Kesejahteraan adalah suatu kondisi masyarakat dimana mencapai kemandirian, peningkatan produktivitas, peningkatan hak yang meliputi antara lain memperoleh akses pelayanan sosial untuk berbagai jenis, peningkatan pendapatan, peningkatan pada kondisi kehidupan yang lebih layak.

3.4.2. Pengukuran Variabel

1. Pengukuran variabel modal sosial pada pelaksanaan Program Gerdu-Taskin.

Tabel 2. Pengukuran Kelembagaan Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP).

No	Indikator	Skor
I. TUJUAN KELOMPOK		
1.	Apakah anda mengetahui tujuan yang ingin dicapai kelompok anda?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
2.	Menurut anda, apakah saat ini tujuan kelompok tersebut telah tercapai?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
3.	Apakah anda puas dengan tingkat pencapaian tujuan yang telah dicapai saat ini?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
SKOR MAKSIMAL		9
SKOR MINIMAL		3

No.	Indikator	Skor
II. STRUKTUR KELOMPOK		
1.	Apakah anda mengetahui struktur kepengurusan dalam kelompok anda?	3
	a. Ya	2
	b. Ragu-ragu	1
	Tidak	
2.	Apakah anda juga mengetahui siapa saja yang menjabat dalam kepengurusan kelompok anda?	3
	a. Ya	2
	b. Ragu-ragu	1
	c. Tidak	
3.	Apakah kinerja pengurus dalam struktur organisasi kelompok anda saat ini sesuai dengan harapan anda?	3
	a. Ya	2
	b. Ragu-ragu	1
	c. Tidak	
SKOR MAKSIMAL		9
SKOR MAKSIMAL		3

III. FUNGSI TUGAS

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Apakah terdapat pembagian tugas dalam kinerja kelompok anda? | 3 |
| | a. Ya | 2 |
| | b. Ragu-ragu | 1 |
| | c. Tidak | |
| 2. | Apakah anda mengetahui tugas yang dibebankan pada anda selaku anggota kelompok? | 3 |
| | a. Ya | 2 |
| | b. Ragu-ragu | 1 |
| | c. Tidak | |
| 3. | Sejauh ini, apakah tugas yang dibebankan pada ketua, pengurus dan anggota kelompok telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada? | 3 |
| | a. Ya | 2 |
| | b. Ragu-ragu | 1 |
| | c. Belum | |

SKOR MAKSIMAL**9****SKOR MINIMAL****3**

No	Indikator	Skor
IV. KEKOMPAKAN KELOMPOK		
1.	Bagaimana kelancaran arus informasi dalam lingkungan kelompok anda (baik dari ketua ke pengurus, pengurus ke anggota maupun ketua ke anggota)?	
	a. Lancar	3
	b. Biasa	2
	c. Tidak lancar	1
2.	Pernahkah terjadi perseteruan antar anggota kelompok dengan pengurus atau ketua kelompok?	
	a. Tidak pernah	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Sering	1
3.	Apakah anda mengetahui program tahunan kelompok anda?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
4.	Bagamanakakah pelaksanaan program kerja tahunan yang dilakukan kelompok anda?	
	a. Sangat lancar dan memuaskan	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak terlaksana	1
SKOR MAKSIMAL		12
SKOR MINIMAL		4

Tabel 3. Pengukuran Modal Sosial (*Social Capital*) Sebagai Variabel Dependen (X)

No	Indikator	Skor
I. INTENSITAS PERTEMUAN		
1.	Apakah kelompok anda memiliki forum pertemuan yang rutin dilakukan?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
2.	Bagaimana frekwensi waktu pelaksanaan forum pertemuan yang diadakan kelompok anda?	
	a. 1 minggu sekali	3
	b. 1 bulan sekali	2
	c. 3 bulan sekali	1
3.	Apakah anda selalu hadir dalam forum pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok anda?	
	a. Selalu	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak	1

No	Indikator	Skor
4.	Apakah alasan yang mendasari anda menghadiri pertemuan rutin tersebut?	
	a. Peningkatan kualitas usaha	3
	b. Meningkatkan akses informasi usaha	2
	c. Ikut-ikut saja	1
5.	Apakah anda merasa mendapatkan manfaat dari pertemuan rutin tersebut?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
SKOR MAKSIMAL		15
SKOR MINIMAL		5

II. KESESUAIAN PENDAPAT

1.	Pernakah masalah usaha yang dialami petani dan pedagang didiskusikan bersama untuk mencari solusi penyelesaian?	
	a. Selalu	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1
2.	Apakah tercapai keputusan konkrit yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang ada?	
	a. Ya	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak	1
3.	Menurut anda bagaimana respon anggota terhadap keputusan yang dihasilkan?	
	a. Menerima dan melaksanakan dengan tanggung jawab	3
	b. Melaksanakan dengan berat hati	2
	c. Keberatan dan tidak mau melaksanakan	1
4.	Selama ini, apakah anda merasa puas dengan keputusan akhir yang disepakati dalam forum tersebut?	
	a. Puas	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak	1
SKOR MAKSIMAL		12
SKOR MINIMAL		4

III. KEMAUAN BEKERJASAMA

1.	Kepada siapakah anda sering meminta bantuan/pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan usaha anda?	
	a. Sesama petani/pedagang atau pengurus kelompok	3
	b. Keluarga	2
	c. Tidak pernah	1
2.	Pernakah anda dilibatkan/dimintai pertimbangan dalam mencari solusi permasalahan usaha yang dialami oleh petani/pedagang lain?	
	a. Pernah	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1

No	Indikator	Skor
3.	Pernahkan anda berinisiatif bertemu di luar forum kelompok untuk membicarakan permasalahan usaha anda atau petani/pedagang lain alami?	
	a. Selalu	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1
4.	Seberapa seringkah anda berinisiatif/menyampaikan pendapat yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi?	
	a. Sering (10-15 kali)	3
	b. Kadang-kadang (5-10 kali)	2
	c. Tidak pernah	1
5.	Apakah anda merasa puas dengan respon lingkungan anda dalam menyikapi permasalahan yang anda hadapi atau dihadapi oleh petani/pedagang lain di sekitar anda?	
	a. Puas	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak puas	1
SKOR MAKSIMAL		15
SKOR MINIMAL		5
IV. KEPERCAYAAN TERHADAP PEMIMPIN		
1.	Bagaimana sikap ketua dan pengurus kelompok anda dalam memperlakukan anggotanya?	
	a. Adil	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak adil	1
2.	Apakah ketua dan pengurus kelompok anda selalu mengajak anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemitraan?	
	a. Ya	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1
3.	Pernahkan ketua atau pengurus kelompok usaha anda melibatkan anda sebagai anggota dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan kelompok tani anda?	
	a. Ya	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1
4.	Dalam forum tersebut, apakah ketua dan pengurus kelompok usaha anda memberikan kesempatan pada anda untuk ikut serta memberikan pendapat?	
	a. Ya	3
	b. Kadang-kadang	2
	c. Tidak pernah	1

No	Indikator	Skor
5.	Apakah anda merasa puas dengan kinerja ketua dan pengurus kelompok usaha anda?	
	a. Puas	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak puas	1
SKOR MAKSIMAL		15
SKOR MINIMAL		5

V. STUKTUR KEWAJIBAN (OBLIGASI)

1.	Apakah jumlah kredit yang diberikan UPK “Gempar” sesuai dengan yang anda butuhkan?	
	a. Ya	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
2.	Bagaimana kelancaran pembayaran kredit yang anda lakukan?	
	a. Lancar	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak lancar	1
3.	Apakah anda merasa bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban penerima kredit dan pihak UPK “Gempar” telah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan yang ada?	
	a. Sudah	3
	b. Ragu-ragu	2
	c. Tidak	1
4.	Apakah usaha anda mengalami peningkatan setelah menerima bantuan kredit dari UPK “Gempar”?	
	a. Ya	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak	1
5.	Apakah pendapatan usaha anda meningkat setelah menerima bantuan kredit dari UPK “Gempar”?	
	a. Ya	3
	b. Biasa saja	2
	c. Tidak	1
SKOR MAKSIMAL		15
SKOR MINIMAL		5

IV. METODE PENELITIAN

Bab IV dalam penelitian ini, akan dijabarkan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian. Diantaranya adalah jabaran mengenai jenis penelitian, metode penentuan lokasi penelitian, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data dan jenis data, dan metode analisis data.

4.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian penjelasan (explanatory research). Explanatory research merupakan penelitian yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesa. Dalam penelitian ini, hubungan kausal yang dimaksud adalah hubungan antara dua variabel yaitu modal sosial dan peningkatan pendapatan.

4.2. Metode Penentuan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*puposive*) di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu golongan desa/kelurahan merah dimana penduduknya hidup miskin, yang memperoleh bantuan melalui Program Gerdu-Taskin dan sebagai Program Penguatan Gerdu-Taskin.

Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2007. Sebelum melakukan penelitian lebih dahulu dilakukan penelitian pendahuluan pada bulan Desember 2006.

4.3. Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini penentuan kelompok sampel dilakukan secara sengaja (*purposive*), yaitu pada kelompok masyarakat yang telah menjadi anggota Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” sebanyak 19 (sembilan belas) kelompok dari program reguler dan 6 (enam) kelompok dari program penguatan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Disporpotional Stratified Random Sampling* (Sampel Acak Tidak Porposional Distratifikasi). Jumlah total populasi anggota pokmas pada UPK “Gempar” dalam penelitian ini sebanyak 125 orang. Jumlah populasi anggota Pokmas pada program reguler sebanyak 95 orang dan pada program penguatan sebanyak 30 orang. Perbandingan jumlah populasi antara pokmas program reguler dengan program penguatan adalah 3 : 1. Sampel dalam penelitian ini adalah anggota Pokmas UPK “Gempar” pada program reguler dan program penguatan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Untuk menentukan berapa jumlah sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi diketahui maka jumlah sampel pada masing masing program adalah sejumlah 30 orang maka total sampel pada kedua program adalah sebanyak 60 orang.

4.4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data merupakan benda dan bergantung pada jenis data, hal atau orang dan tempat dilakukannya penelitian. Jenis data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya dan data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 2 macam, antara lain :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden. Pengambilan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Kegiatan wawancara dilengkapi dengan kuisisioner, yaitu daftar pertanyaan untuk memperoleh jawaban dari responden yang meliputi data dan keterangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Pengisian kuisisioner dilakukan secara langsung yaitu melalui tanya jawab langsung dengan responden. Jenis kuisisioner yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu (1). Kuisisioner terbuka,

responden dapat menjawab pertanyaan dengan kalimatnya sendiri. Kuisisioner terbuka dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui asal pengembangan UPK, manfaat keberadaan UPK bagi penduduk miskin, jumlah pendapatan dan rincian jumlah pengeluaran penduduk miskin. (2). Kuisisioner tertutup, pilihan jawaban adalah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Yang termasuk kuisisioner tertutup dalam penelitian ini adalah semua pertanyaan mengenai variabel modal sosial dan asal pengembangan UPK.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau dari pihak-pihak yang bersangkutan di lapang. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang besumber dari beberapa yang diperoleh dari Unit Pengelola Keuangan “Gempar”, Kantor Kepala Desa Pandanrejo, Kantor Kecamatan Bumiaji, BPS Kota Batu. Data yang diambil melalui metode ini adalah data mengenai letak geografis Desa Pandanrejo, keadaan topografi wilayah penelitian, keadaan penduduk, dan gambaran umum atau profil Unit Pengelola Keuangan “Gempar”.

4.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif untuk menjawab tujuan pertama yaitu tingkat pengetahuan anggota Pokmas terhadap peran UPK dengan menggunakan metode skoring data dengan bantuan skala Likert, untuk menjawab tujuan kedua dan ketiga menggunakan metode analisis regresi; untuk menjawab tujuan ke dua atau hipotesis pertama yaitu analisis modal sosial terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dengan menggunakan analisis regresi, untuk menjawab tujuan ketiga atau hipotesis kedua yaitu analisis modal sosial terhadap peningkatan pendapatan dengan menggunakan analisis regresi.

4.5.1. Analisis Deskriptif Kualitatif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang dideskripsikan adalah variabel pengetahuan asal pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) program Gerdu-Taskin.

Sesuai dengan tahapan-tahapan dalam metode analisis data secara deskriptif, analisis yang dilakukan adalah:

1. Reduksi data

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, direduksi melalui proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data. Kegiatan-kegiatan dalam reduksi data adalah:

- a. Editing : Penelitian kembali catatan-catatan yang diperoleh di lapang (penyempurnaan istilah/satuan yang dianggap kurang tepat).
- b. Coding : Usaha mengklarifikasi jawaban-jawaban para responden menurut macamnya atau mengelompokkan data menurut variabel yang diteliti dengan menggunakan kode-kode.
- c. Tabulasi : Proses-proses penyusunan data ke dalam bentuk tabel (kuantitatif) dengan menggunakan prosentase (%).

2. Penyajian Data

Penyajian data (display data) disini adalah setelah data direduksi, selanjutnya data disusun dan disajikan dalam bentuk matrikulasi atau tabel dan bagan. Beberapa data yang dapat disajikan dalam penelitian antara lain: monografi desa, karakteristik responden menurut umur, pendidikan, mata pencaharian, analisa respon responden.

3. Menarik Kesimpulan/verifikasi

Dari data yang sudah didapat dan disajikan, kemudian dicoba untuk mengambil kesimpulan. Mula-mula kesimpulan itu kabur, tetapi lama-kelamaan semakin jelas, karena data yang diperoleh semakin banyak dan

mendukung. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan setelah data yang tersaji dipelajari dan dianalisa secara mendalam dengan melihat besar kecilnya persentase jawaban responden. Selanjutnya dihubungkan dengan teori yang ada, jika terjadi penyimpangan teori, dilakukan pengkajian dan dicari sebab-sebab yang mempengaruhinya. Tetapi seringkali kesimpulan itu telah diteruskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya secara induktif. Pada penelitian ini analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengidentifikasi peningkatan peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro yang berhubungan dengan tingkat partisipasi dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin dan untuk mengidentifikasi peranan modal sosial (*social capital*) terhadap kinerja keuangan mikro (*microfinance*) dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin.

1. Metode Skoring Data Dengan Bantuan Skala Likert

Metode Scoring atau memberi nilai pada data yang telah didapatkan dimaksudkan untuk memudahkan dalam menyajikan data-data hasil penelitian (alat bantu analisis), menggunakan skala likert yang meliputi tahap-tahap:

1. Menentukan banyaknya kelas

Terdapat 3 kelas yang ditetapkan dalam perhitungan variabel pada penelitian ini yaitu : (1) rendah, (2) sedang, (3) tinggi.

2. Menentukan kisaran

Kisaran adalah selisih nilai pengamatan tertinggi dengan nilai terendah,

$$R = X_t - X_r$$

Keterangan: R = kisaran

X_t = nilai pengamatan tinggi

X_r = nilai pengamatan rendah

3. Menentukan selang dalam kelas

Selang dalam kelas dilambangkan dengan I, dan ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{\mathfrak{R}}{K}$$

Keterangan: I = selang dalam kelas

R = kisaran

K = jumlah kelas

Lebar kelas untuk pengembangan unit pengelola keuangan yang diukur dari kelembagaan dan keanggotaan yang terdiri dari: struktur kelompok dan potensi kelompok yang meliputi tujuan kelompok, fungsi tugas dan kekompakan kelompok adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan

$$\text{Skor Maksimal} = 9 \times 3 = 27$$

$$\text{Skor Minimal} = 9 \times 1 = 9$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{K} = \frac{27 - 9}{3} = 6$$

Sehingga penilaian terhadap tujuan kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang tujuan kelompok tinggi dengan skor : 23 - 29

Pengetahuan tentang tujuan kelompok sedang dengan skor : 16 - 22

Pengetahuan tentang tujuan kelompok rendah dengan skor : 9 - 15

2. Struktur kelompok

$$\text{Skor Maksimal} = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{Skor Minimal} = 4 \times 1 = 4$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{K} = \frac{12 - 4}{3} = 2,66$$

Sehingga penilaian terhadap struktur kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang struktur kelompok tinggi dengan skor : 9,4 - 12

Pengetahuan tentang struktur kelompok sedang dengan skor : 6,7 - 9,3

Pengetahuan tentang struktur kelompok rendah dengan skor : 4 - 6,6

3. Tujuan kelompok

$$\text{Skor Maksimal} = 3 \times 3 = 9$$

$$\text{Skor Minimal} = 3 \times 1 = 3$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{\kappa} = \frac{9-3}{3} = 2$$

Sehingga penilaian terhadap tujuan kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang tujuan kelompok tinggi dengan skor : 9 – 11

Pengetahuan tentang tujuan kelompok sedang dengan skor : 6 – 8

Pengetahuan tentang tujuan kelompok rendah dengan skor : 3 – 5

4. Fungsi tugas

Skor Maksimal = 3 x 3 = 9

Skor Minimal = 3 x 1 = 3

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{\kappa} = \frac{9-3}{3} = 2$$

Sehingga penilaian terhadap fungsi tugas kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang fungsi tugas kelompok tinggi dengan skor : 9 - 11

Pengetahuan tentang fungsi tugas kelompok sedang dengan skor : 6 - 8

Pengetahuan tentang fungsi tugas kelompok rendah dengan skor : 3 – 5

5. Kekompakan kelompok

Skor Maksimal = 4 x 3 = 12

Skor Minimal = 4 x 1 = 4

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{\kappa} = \frac{12-4}{3} = 2,66$$

Sehingga penilaian terhadap kekompakan kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang kekompakan kelompok tinggi dengan skor : 9,4 - 12

Pengetahuan tentang kekompakan kelompok sedang dengan skor : 6,7 - 9,3

Pengetahuan tentang kekompakan kelompok rendah dengan skor : 4 - 6,6

Lebar kelas untuk modal sosial (*social capital*) yang diukur dari kepercayaan yang terdiri dari kepercayaan terhadap pemimpin dan kesesuaian pendapat; jaringan sosial yang terdiri dari intensitas pertemuan dan kemauan bekerjasama; dan norma terdiri dari struktur kewajiban dan sanksi adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan terhadap pemimpin

Skor Maksimal = 5 x 3 = 15

$$\text{Skor Minimal} = 5 \times 1 = 5$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathcal{X}_t - \mathcal{X}_r}{\kappa} = \frac{15 - 5}{3} = 3,33$$

Sehingga kepercayaan terhadap pemimpin adalah sebagai berikut:

Kepercayaan terhadap pemimpin tinggi dengan skor : 11,8 – 15,1

Kepercayaan terhadap pemimpin sedang dengan skor : 8,4 - 11,7

Kepercayaan terhadap pemimpin rendah dengan skor : 5 – 8,3

2. Kesesuaian pendapat

$$\text{Skor Maksimal} = 4 \times 3 = 12$$

$$\text{Skor Minimal} = 4 \times 1 = 4$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathcal{X}_t - \mathcal{X}_r}{\kappa} = \frac{12 - 4}{3} = 2,66$$

Sehingga kesesuaian pendapat adalah sebagai berikut:

Kesesuaian pendapat tinggi dengan skor : 9,4 - 12

Kesesuaian pendapat sedang dengan skor : 6,7 - 9,3

Kesesuaian pendapat rendah dengan skor : 4 - 6,6

3. Intensitas pertemuan

$$\text{Skor Maksimal} = 5 \times 3 = 15$$

$$\text{Skor Minimal} = 5 \times 1 = 5$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathcal{X}_t - \mathcal{X}_r}{\kappa} = \frac{15 - 5}{3} = 3,33$$

Sehingga intensitas pertemuan adalah sebagai berikut:

Intensitas pertemuan tinggi dengan skor : 11,8 – 15,1

Intensitas pertemuan sedang dengan skor: 8,4 - 11,7

Intensitas pertemuan rendah dengan skor: 5 – 8,3

4. Kemauan bekerjasama

$$\text{Skor Maksimal} = 9 \times 3 = 27$$

$$\text{Skor Minimal} = 9 \times 1 = 9$$

$$\mathfrak{R} = \frac{\mathcal{X}_t - \mathcal{X}_r}{\kappa} = \frac{27 - 9}{3} = 6$$

Sehingga kemauan bekerjasama adalah sebagai berikut:

Kemauan bekerjasama tinggi dengan skor : 23 – 29

Kemauan bekerjasama sedang dengan skor : 16 - 22

Kemauan bekerjasama rendah dengan skor : 9 – 15

5. Struktur Kewajiban

Skor Maksimal = 5 x 3 = 15

Skor Minimal = 5 x 1 = 5

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{\kappa} = \frac{15 - 5}{3} = 3,33$$

Sehingga kewajiban adalah sebagai berikut:

Kewajiban tinggi dengan skor : 11,8 – 15,1

Kewajiban sedang dengan skor : 8,4 - 11,7

Kewajiban rendah dengan skor : 5 – 8,3

6. Sanksi

Skor Maksimal = 3 x 3 = 9

Skor Minimal = 3 x 1 = 3

$$\mathfrak{R} = \frac{\chi_t - \chi_r}{\kappa} = \frac{9 - 3}{3} = 2$$

Sehingga penilaian terhadap fungsi tugas kelompok adalah sebagai berikut:

Pengetahuan tentang sanksi dalam kelompok tinggi dengan skor : 9 - 11

Pengetahuan tentang sanksi dalam kelompok sedang dengan skor : 6 - 8

Pengetahuan tentang sanksi dalam kelompok rendah dengan skor : 3 - 5

4.5.2. Metode Analisis Regresi

Regresi Linear Berganda digunakan bila penyebab diperkirakan lebih dari satu variabel. Adapun model regresi yang digunakan yaitu:

1. Model Regresi untuk menjawab Hipotesis Pertama

$$Y_{Reg} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots(4.2)$$

$$Y_{Penguatan} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots(4.3)$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman) pada program reguler

$Y_{Penguatan}$ = Variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman) pada program Penguatan

a = Nilai Intercep (konstan) atau harga Y bila $X = 0$

b_1 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Kepercayaan)

X_1 = Variabel bebas (Kepercayaan)

b_2 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Jaringan Sosial)

X_2 = Variabel bebas (Jaringan Sosial)

b_3 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Norma)

X_3 = Variabel bebas (Norma)

a. Hipotesis :

Ho : tidak terdapat peranan modal sosial terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

Ha : terdapat peranan modal sosial terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

b. Kriteria Pengujian Hipotesis :

Ho diterima bila jumlah q hitung lebih kecil dari q tabel.

2. Model Regresi untuk menjawab Hipotesis Kedua

$$Y_{Reg} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots(4.4)$$

$$Y_{Penguatan} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots(4.5)$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) pada program reguler

- $Y_{Penguatan}$ = Variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) pada program Penguatan
 a = Nilai Intercep (konstan) atau harga Y bila $X = 0$
 b_1 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Modal Sosial)
 X_1 = Variabel bebas (Modal Sosial)
 b_2 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Jumlah Tanggungan Keluarga)
 X_2 = Variabel bebas (Jumlah Tanggungan Keluarga)
 b_3 = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel (Tingkat Pendidikan)
 X_3 = Variabel bebas (Tingkat Pendidikan).

a. Hipotesis :

Ho : tidak terdapat peranan modal sosial terhadap tingkat pendapatan penduduk miskin.

Ha : terdapat peranan modal sosial terhadap tingkat pendapatan penduduk miskin

b. Kriteria Pengujian Hipotesis :

Ho diterima bila jumlah q hitung lebih kecil dari q tabel.

3. Uji Serempak (F-Test)

Rumus F-Test digunakan untuk menguji homogenitas varian dua sampel berdasarkan n yang tidak sama, pengujian ini dilakukan dengan taraf tertentu atas signifikansi guna menguji hipotesis secara serentak variabel bebas terhadap variabel tergantung, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$F_{Hitung} = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)} \dots \dots \dots (4.6)$$

Di mana: F_{Hitung} = Hitungan yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel}

R^2 = Koefisien regresi yang telah ditentukan

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah sampel

Kriteria pengambilan keputusan :

Jika $F_{Hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan jika $F_{Hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak.

Nilai F hitung yang didapat, akan dicoba dibandingkan dengan ambang kesalahan (5%), apakah derajat signifikasinya lebih besar atau lebih kecil atas derajat kesalahan itu, hingga akhirnya dapat dilihat hasil uji hipotesanya.

4. Uji t-Student (t-Test)

Rumus t-Test digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel pada variabel interval/rasio. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang benar-benar signifikan atau hanya kesalahan menggunakan teknik samplingnya. Pengujian ini dilakukan dengan taraf tertentu atas signifikansi yang dirumuskan sebagai berikut:

$$t = r \sqrt{\frac{n-2}{1-r^2}} \dots\dots\dots (4.7)$$

Di mana: t = tes hipotesa

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

Sedangkan penolakan hipotesa atas signifikansi pada taraf nyata 5% (taraf kepercayaan 95%) adalah sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel tergantung secara parsial.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan variabel bebas terhadap variabel tergantung secara parsial.

4.6. Pengujian Instrumen Penelitian

Pengujian instrumen dilakukan agar diperoleh data yang baik. Data yang baik hanya dapat diperoleh bila instrumennya juga baik. Instrumen dikatakan baik apabila valid dan reliabel. Pengujian instrumen dilakukan sebelum kuisisioner

disebarkan dengan cara mengujikan pada responden terbatas terlebih dahulu. Dalam penelitian ini pengujian instrumen menggunakan dua uji, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji valid tidaknya data yang diambil. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Pada penelitian ini uji validitas dilakukan pada 60 responden yang menjadi anggota Pokmas UEP di UPK “Gempar” dengan menggunakan rumus teknik *korelasi product momen Pearson* dengan level signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$) sebagai nilai kritisnya. Pada penelitian ini korelasi dihitung dengan menggunakan program Microstat yaitu SPSS. Sedangkan perhitungan dengan rumus dapat dilakukan yaitu dengan rumus dibawah ini:

$$r = \frac{n(\sum xy) - (\sum x \sum y)}{\sqrt{[n\sum x^2 - (\sum x)^2][n\sum y^2 - (\sum y)^2]}} \dots\dots\dots (4.8)$$

- Keterangan:
- r = Nilai korelasi tiap atribut
 - n = Banyaknya sampel yaitu 60 responden
 - x = Skor butir pernyataan
 - y = Skor total

Berdasarkan rumus koefisien korelasi di atas, diketahui bahwa untuk mengetahui hubungan masing-masing pernyataan dengan skor total menggunakan rumus korelasi *product moment*. Dimana N merupakan banyaknya responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 60 responden, X merupakan skor pernyataan yang diperoleh dengan menjumlahkan skor penilaian semua responden terhadap setiap item pernyataan, dan Y merupakan skor total yang diperoleh dengan menjumlahkan skor penilaian semua responden terhadap variabel yang dinyatakan, yaitu variabel modal sosial dengan indikatornya kepercayaan, jaringan sosial dan norma.

Apabila nilai r (korelasi *product moment*) telah diperoleh, maka selanjutnya dilanjutkan dengan membandingkan nilai antara nilai r perhitungan

dengan nilai r yang terdapat dalam tabel nilai kritis r ($\alpha = 5\%$). Adapun hasil hipotesisnya adalah:

H_0 = Tidak terdapat hubungan antara pertanyaan yang mendukung konsep

H_1 = Terdapat hubungan (korelasi) antar pertanyaan yang mendukung konsep

Penolakan terhadap H_0 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Nilai korelasi *product moment* > angka kritis
2. Probabilitas kesalahan menolak $H_0 \leq$ taraf signifikansi ($\alpha = 5\%$).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan diulang dua kali atau lebih dan menunjukkan sejauh mana alat pengukuran dipercaya dan diandalkan.

Pengukuran reliabilitas suatu instrumen yang skor jawabannya bukan 1 dan 0 menggunakan rumus Apha, yaitu:

$$r_{it} = \left(\frac{K}{K-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_{2t}^2} \right) \dots \dots \dots (4.9)$$

dimana: r_{it} = reliabilitas instrumen
 K = banyaknya butir pertanyaan
 $\sum \sigma_b^2$ = jumlah varians butir
 σ_b^2 = varians total

Jumlah varians butir diperoleh dengan cara menjumlahkan varians tiap-tiap butir pertanyaan. Dimana rumus yang digunakan hampir sama dengan rumus varian total (4.6). hanya saja X merupakan total skor butir pertanyaan. Dan rumus varians total adalah sebagai berikut:

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum X^2 - (\sum X)^2}{N} \dots \dots \dots (4.10)$$

dimana: X = total skor pertanyaan tiap responden
 N = jumlah responden (60 responden).

V. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab V dari penelitian ini memuat tentang keadaan umum lokasi penelitian antara lain letak geografis dan administratif daerah penelitian, keadaan penduduk, gambaran umum Unit Pengelola Keuangan (UPK), dan keadaan Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP).

5.1. Letak Geografis dan Administratif

Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu secara geografis terletak pada ketinggian 800 m di atas air laut. Secara administratif wilayah desa Pandanrejo memiliki batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Desa Bumiaji
Sebelah Timur	: Desa Giripurno
Sebelah Barat	: Desa Sidomulyo
Sebelah Selatan	: Kelurahan Temas

Desa Pandanrejo terdiri dari empat dusun, yaitu : dusun Dadapan, dusun Kajar, dusun Pandan dan dusun Ngujung. Jarak desa Pandanrejo ke pusat pemerintahan kecamatan Bumiaji adalah 3 km, dan jarak ke pusat pemerintahan kota Batu kurang lebih 3 km yang mudah dijangkau oleh kendaraan umum.

5.2. Keadaan Umum Penduduk

5.2.1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Salah satu aspek penting dalam demografi adalah komposisi jumlah penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Komposisi penduduk mempengaruhi ratio jenis kelamin. Ratio jenis kelamin (*sex ratio*) biasanya dihitung dengan menggunakan jumlah penduduk laki-laki yang terdapat di dalam penduduk tertentu., kemudian dibagi dengan jumlah penduduk perempuan, sehingga rasio jenis kelamin akan mencerminkan jumlah laki-laki dalam 100 penduduk perempuan. *Sex ratio* penduduk Desa Pandanrejo adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Jenis Kelamin} &= \frac{\sum \text{penduduk laki-laki}}{\sum \text{penduduk perempuan}} \times 100 \\ &= \frac{2424}{2452} \times 100 \\ &= 98,9 \end{aligned}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa sex rasio di Desa Pandanrejo adalah 98, artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin lebih jelasnya tersaji pada Tabel 4. sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Pandanrejo, 2007

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk	Persentasi (%)
Laki-laki	2424	49.71
Perempuan	2452	50.29
Jumlah	4876	100

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk paling banyak adalah jenis kelamin perempuan dengan jumlah 2452 atau 50,29% jiwa dari total jumlah penduduk sebesar 4876 jiwa, sedangkan jumlah penduduk laki-laki adalah 2424 atau 49,71% jiwa dari total 4876 jiwa.

Dari total jumlah penduduk di Desa Pandanrejo, 27,195% merupakan penduduk miskin yang merupakan sasaran dalam program pengentasan kemiskinan. Strategi pokok upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mencapai sasaran menurunya populasi penduduk miskin. Penanggulangan masalah kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan kontekstual. Menyeluruh berarti menyangkut seluruh penyebab kemiskinan, sedangkan kontekstual mencakup faktor lingkungan penduduk miskin. Untuk dapat merumuskan kebijakan yang tepat dalam menangani kemiskinan perlu pengkajian yang mendalam tentang profil kemiskinan. Sehingga aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan karakteristik masyarakat tersebut dan dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Berikut disajikan data jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Pandanrejo.

Tabel 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin di Desa Pandanrejo, 2007

Dusun	Rumah Tangga Miskin (RTM)	Persentase (%)
Kajar	77	18.00
Dadapan	61	14.30
Ngujung	156	36.40
Pandan	134	31.30
Total	428	100.00

Sumber: Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di desa Pandanrejo sebanyak 428 rumah tangga. Dari 4 Dusun yang ada di desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji mempunyai jumlah Rumah Tangga Miskin terbanyak 156 atau 36.40% rumah tangga adalah Dusun Ngujung. Selanjutnya Dusun yang mempunyai jumlah Rumah Tangga Miskin terbanyak setelah Dusun Ngujung adalah Dusun Pandan yaitu sebanyak 134 atau 31.30% rumah tangga dan Dusun Kajar sebanyak 77 atau 18.00% rumah tangga. Sedangkan Dusun yang mempunyai Rumah Tangga Miskin (RTM) paling sedikit adalah Dusun Dadapan yaitu sebanyak 61 atau 14.30% rumah tangga.

5.2.2. Komposisi Penduduk Menurut Golongan Umur

Berdasarkan komposisi jumlah penduduk Desa Pandanrejo menurut golongan umur, diketahui terbanyak ditempati oleh golongan usia lanjut lebih dari 57 tahun yaitu sebanyak 1295 jiwa dengan persentase 26.56% sedangkan komposisi penduduk golongan usia produktif/kerja antara 25 – 32 tahun sebanyak 313 jiwa dengan persentase 6.42%.

Ditinjau dari komposisi penduduk yang mayoritas adalah usia lanjut, maka sangat kecil dalam memunculkan nilai modal sosial (*social capital*) dalam lingkungan masyarakat ini. Hal ini didasarkan pada keadaan lapang yang menunjukkan bahwa mereka yang usianya lanjut kurang menerima pembaharuan yang ada, dikarenakan umumnya memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Keadaan ini akan lebih menguntungkan bila mereka yang usianya lebih muda mau melibatkan dan bertukar

pikiran dengan pihak yang lebih tua, karena dengan cara ini kedua pihak dapat saling bertukar pikiran dalam mengatasi semua permasalahan dan mencapai keputusan terbaik berdasar pengetahuan dan pengalaman yang ada dari keduanya.

Komposisi penduduk Desa Pandanrejo menurut tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6. Komposisi Jumlah Penduduk Menurut golongan Umur

Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 - 8	744	15.26
9 - 16	606	12.43
17 - 24	618	12.67
25 - 32	313	6.42
33 - 40	342	7.01
41 - 48	280	5.74
49 - 56	678	13.90
> 57	1295	26.56
Total	4876	100.00

Sumber: Kantor Desa Pandanrejo, 2007

5.2.3. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dari tabel 7 dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Pandanrejo dilihat dari tingkat pendidikan yang terbanyak adalah lulusan Sekolah Dasar (SD) yaitu sebesar 2311 jiwa atau 55,58% dan penduduk yang buta huruf adalah sebesar 41 jiwa atau 0,99%. penduduk dengan tingkat pendidikan SLTP sebesar 525 jiwa atau 12,63%, SLTA sebesar 260 jiwa atau 6,25%, D – 1 sebesar 30 jiwa atau 0,72%, D -2 sebesar 12 jiwa atau 0,29%, D – 3 sebesar 8 jiwa atau 0,19%, S – 1 sebesar 73 jiwa atau 1,76% dan S – 2 sebesar 2 jiwa atau 0,05%. hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Desa Pandanrejo cukup tinggi.

Komposisi penduduk Desa Pandanrejo menurut tingkat pendidikan disajikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandanrejo, 2007

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Penduduk usia 10 th ke atas yg buta huruf	41	0.99
2	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	896	21.55
3	Penduduk Tamat SD/ sederajat	2311	55.58
4	Penduduk Tamat SLTP/ sederajat	525	12.63
5	Penduduk Tamat SLTA/ sederajat	260	6.25
6	Penduduk Tamat D - 1	30	0.72
7	Penduduk Tamat D - 2	12	0.29
8	Penduduk Tamat D - 3	8	0.19
9	Penduduk Tamat S - 1	73	1.76
10	Penduduk Tamat S - 2	2	0.05
Total		4158	100.00

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Tingkat pendidikan seseorang ikut menentukan bagaimana seseorang bersikap terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka filter terhadap baik buruknya suatu nilai yang berkembang juga semakin tinggi. Bila dikaitkan dengan penelitian ini, maka berkembangnya nilai modal sosial juga dikaitkan dengan tingkat pendidikan masing-masing individu. Terlebih bila tingkat pendidikan yang tinggi didominasi oleh anggota Pokmas UPK “Gempar” sebagai responden dalam penelitian ini, maka dapat dipastikan bahwa modal sosial (*social capital*) yang ada akan berkembang dan mampu membangun jaringan strategis yang menguntungkan, tidak hanya bagi komunitas Pokmas tetapi juga bagi wilayah Kelurahan Pandanrejo.

5.2.4. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Komposisi penduduk desa Pandanrejo menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel 8 yang disajikan berikut ini :

Tabel 8. Struktur Mata Pencaharian Penduduk Pandanrejo, 2007

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Jasa Pemerintahan/Non Pemerintahan		
a	Pegawai Desa	12	1.49
b	Pegawai Negeri Sipil (PNS)		
	1). PNS	40	4.95
	2). ABRI + POLRI	5	0.62
	3). Guru	30	3.71
	4). Dokter	3	0.37
	5). Bidan	1	0.12
	6). Mantri Kesehatan/Perawat	4	0.5
c	Pensiunan ABRI/SIPIL	26	3.22
d	Pegawai Swasta	306	37.87
e	Pegawai BUMN/BUMD	4	0.5
2	Jasa Perdagangan		
a	Warung	65	8.04
b	Kios	20	2.48
c	Toko	66	8.17
3	Jasa Angkutan		
a	Angkutan Bermotor	120	14.85
b	Mobil Kendaraan Umum	16	1.98
4	Jasa Keterampilan		
a	Tukang Kayu	25	3.09
b	Tukang Batu	30	3.71
c	Tukang Jahit/Bordir	9	1.11
d	Tukang Cukur	4	0.5
5	Jasa Lainnya		
a	Persewaan	22	2.72
Total		808	100

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Dari Tabel 8 dapat diketahui jumlah penduduk yang bermata pencaharian dalam bidang jasa di pemerintahan/non pemerintahan, sebagai pegawai desa sebanyak 12 jiwa (1,49%), PNS sebanyak 40 jiwa (4,95%), ABRI dan POLRI sebanyak 5 jiwa (0,62%), guru sebanyak 30 jiwa (3,71%), dokter sebanyak 3 jiwa (0,37%), Bidan sebanyak 1 (0,12%), mantri kesehatan/perawat sebanyak 4 jiwa

(0,50%), pensiunan ABRI/SIPIL sebanyak 26 (3,22%), pegawai swasta sebanyak 306 (37,87%), dan sebagai pegawai BUMN/BUMD sebanyak 4 jiwa (0,50%). Untuk jasa perdagangan yaitu seperti usaha warung sebanyak 65 jiwa (8,04%), kios sebanyak 20 jiwa (2,48%), dan toko sebanyak 66 (8,17%). Untuk jasa angkutan dan transportasi sebagai ojek sebanyak 120 jiwa (14,85%), dan sebagai sopir angkudes sebanyak 16 jiwa (1,98%). Untuk jasa keterampilan seperti tukang kayu sebanyak 25 jiwa (3,09%), tukang batu sebanyak 30 jiwa (3,71%), tukang jahit/bordir sebanyak 9 jiwa(1,11%), dan tukang cukur sebanyak 4 jiwa (0,50%) sedangkan untuk jasa lainnya seperti persewaan sebanyak 22 jiwa (%) dari jumlah penduduk yang bekerja sejumlah 663 jiwa. Ditinjau dari jumlah penduduk sejumlah 4876 jiwa maka bisa diketahui jumlah penduduk yang tidak bekerja (anak-anak, Angkatan kerja yang belum kerja dan usia lanjut) sejumlah 4068 jiwa.

5.3. Gambaran Umum Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah pengelola Program Gerdu-Taskin di tingkat Desa/Kelurahan. UPK bertanggungjawab terhadap jalanya program Gerdu-Taskin. Di Kota Batu ada UPK reguler dan penguatan. UPK reguler adalah UPK yang tidak mampu atau belum mendapat program lanjutan. Setelah program reguler selesai, UPK reguler harus menjalankan kinerja UPK sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum) Gerdu-Taskin, dan pengurus UPK harus melaporkan rutin kondisi UPK kepada sekretariat tetap(Sektap) kabupaten. Dengan adanya pelaporan tersebut instansi terkait dapat melakukan pemantauan terhadap kinerja UPK.

Sedangkan UPK penguatan adalah UPK yang mendapat program lanjutan setelah program reguler selesai. Penguatan UPK bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi UPK, menyehatkan dan menyelamatkan UPK yang belum optimal dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Ruang lingkup adanya penguatan UPK adalah peningkatan kapasitas UPK, pengendalian kegiatan dan pendampingan. Dengan adanya penguatan UPK diharapkan UPK dapat mencapai kemandirian menjadi sebuah Bada Usaha Milik Desa (BUMDes).

Di Kota Batu hanya ada 1 UPK reguler yang mendapat program dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 dan 1 UPK penguatan yang dimulai ada tahun 2006. Kondisi UPK penguatan saat ini lebih baik dibandingkan sebelum mendapat penguatan. Dilihat dari kelembagaan dan administrasi kolektibilitas, permodalan, kegiatan usaha UPK dan pelayanan kepada masyarakat di UPK penguatan lebih baik dan teratur di bandingkan di UPK reguler. Perbedaan antara kondisi UPK penguatan dan reguler dapat dilihat pada Tabel 9 berikut:

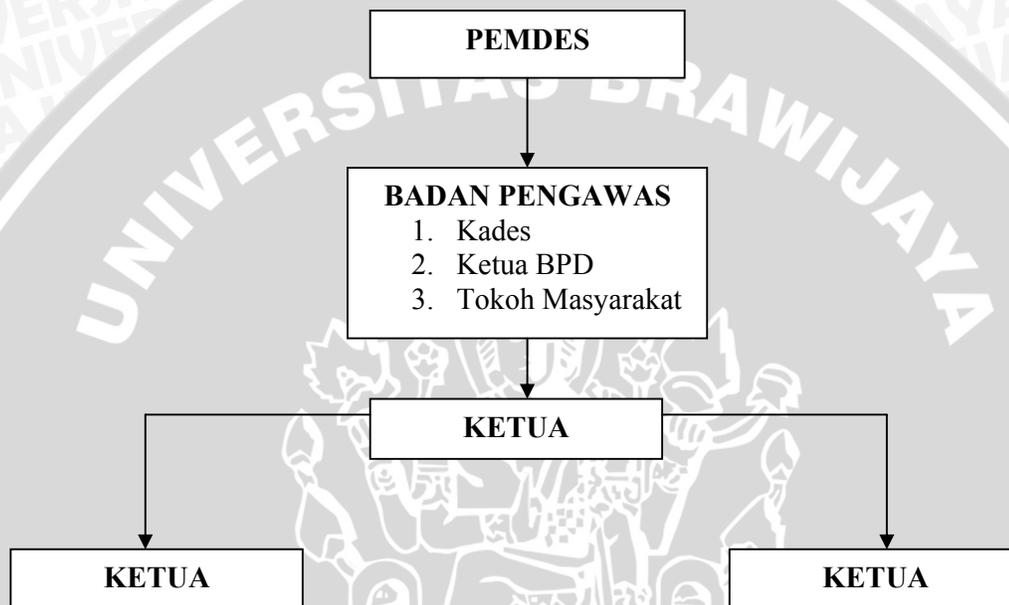
Tabel 9. Kondisi UPK “Gempar” Program Reguler dan Program Penguatan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Keterangan	UPK Reguler	UPK Penguatan
1	Kelembagaan dan Administratif		
	Jumlah Pengurus	4	6
	Kinerja Pengurus	Aktif	Aktif
	Honor Pengurus	Berbeda	Berbeda
	Legalitas Pengurus UPK	SK Kades	SK Kades
	Job discription Pengurus	Ada	Ada
	Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Tidak Rutin	Rutin
2	Kondisi Kolektibilitas		
	Kolektibilitas	5%	60%
	Penanganan pinjm. Bermasalah	Dipanggil ke Kantor Desa	Surat Peringatan
3	Modal UPK		
	Modal Awal	90,000,000.00	42,750,000.00
	Asset saat ini	10,100,000.00	11,093,750.00
	Sumber modal	Propinsi Kabupaten	Propinsi Kabupaten
	Alokasi Modal	Pemberdayaan manusia, usaha, & lingkungan	Pemberdayaan manusia, usaha, & lingkungan
4	Kegiatan Usaha		
	Usaha Sektor Riil	Ternak Kambing	Ternak Kambing
	Kantor UPK	Kantor Desa	Kantor Desa
	Jadwal Pelayanan UPK	Setiap Hari	Setiap tanggal 1-5
	Peminjam	Pokmas	Pokmas
	Jaminan	Tidak ada	BPKB

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel 9 di atas, dijelaskan kondisi UPK Reguler dan UPK Penguatan. Dilihat dari kondisi kelembagaan dan administratif, perbedaan UPK reguler dan

UPK Penguatan ada pada jumlah pengurus, legalitas UPK serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Jumlah pengurus di UPK reguler ada 4 orang. Di UPK penguatan jumlah pengurus ada 6 orang. Di UPK penguatan ada badan pengawas yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD dan Tokoh Masyarakat. Struktur Organisasi Pengurus UPK penguatan di UPK “Gempar” dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Bagan 2. Struktur Organisasi UPK Penguatan di Kota Batu

Dilihat dari legalitas pengurus UPK dan laporan pertanggungjawaban juga berbeda-beda antar UPK. Di UPK Reguler dan UPK Penguatan legalitas pengurus berdasarkan SK Kepala Desa. Berkaitan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban UPK Reguler tidak rutin melakukan pelaporan walaupun UPK tersebut telah membuat laporan kondisi keuangan UPK tetapi tidak dilaporkan kepada Kepala Desa maupun Bappemas. karena UPK tidak mengetahui format laporan yang harus dilaporkan sehingga laporan yang dibuat hanya disimpan sebagai arsip UPK. Sedangkan UPK Penguatan sudah rutin melakukan pelaporan. UPK Penguatan membuat laporan per triwulan atau tiga bulan sekali dilaporkan kepada Bappemas dan Desa.

Pengurus UPK sudah mempunyai pembagian tugas (*Job Discription*) yang jelas dan semua aktif menjalankan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.

Berkaitan dengan honor yang diterima pengurus UPK disesuaikan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterima UPK yang besarnya tiap pengurus berbeda sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya. Honor pengurus sekitar 25% dari SHU yang diterima.

Kolektibilitas pinjaman di setiap UPK berbeda-beda. Kolektibilitas pinjaman terendah sebesar 13,33% di UPK Reguler. UPK Reguler mengirimkan surat panggilan kepada Pokmas yang menunggak untuk melunasi pinjamannya. Kolektibilitas pada UPK reguler sangat rendah karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengembalikan pinjaman dikarenakan adanya asumsi bahwa dana yang diberikan merupakan dana hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Walaupun tingkat kolektibilitas UPK Penguatan lebih tinggi, namun ada juga beberapa Pokmas yang berasumsi bahwa dana yang diberikan juga dana hibah, sehingga sebagian Pokmas banyak yang masih menunggak untuk mengembalikan pinjaman, tetapi peminjam akan segera melunasi pinjaman jika ingin mendapatkan pinjaman lagi. Kolektibilitas tinggi juga karena kesadaran masyarakat yang tinggi untuk mengembalikan pinjaman. Di UPK Penguatan masing-masing anggota Pokmas saling mengingatkan untuk segera mengembalikan pinjaman sebelum waktu jatuh tempo agar dana dapat di pinjamkan kepada anggota yang lain selain itu UPK Penguatan juga memberikan kartu bukti pelunasan pinjaman, sehingga memudahkan Pokmas dalam melakukan pengembalian pinjaman.

Besarnya modal yang dimiliki UPK berbeda-beda walaupun tahun program sama. Modal awal yang diterima UPK dari Program Gedu-Taskin berasal dari Propinsi Jawa Timur dan dari dana Saharing APBD Kota Batu. Bear modal awal di UPK penguatan lebih besar dari pada di UPK reguler. Karena di UPK penguatan setelah adanya program reguler mendapat tambahan modal lagi di program penguatan. Besar modal di UPK penguatan berkisar antara Rp. 90,000,000.00 sedangkan di UPK reguler tidak mendapat modal tambahan selain modal awal program. Besar modal di UPK reguler berkisar antara Rp. 42,750,000.00. Dana yang diterima tersebut dialokasikan sebagai pemberdayaan manusia, pemberdayaan usaha dan pemberdayaan lingkungan. Dana untuk pemberdayaan manusia digunakan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan bagi warga. Sedangkan dana pemberdayaan usaha

digunakan untuk simpan pinjam pokmas dan dana untuk pemberdayaan lingkungan digunakan untuk membuat dan memperbaiki sarana dan prasarana umum, dana pemberdayaan lingkungan juga ada yang digunakan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada Rumah Tangga Miskin rentan dan sebagai hibah bagi mereka. Dari modal awal yang diberikan, sampai saat ini asset yang ada di UPK terus meningkat yaitu sebesar Rp. 10,100,000.00 pada UPK reguler dan sebesar Rp. 11,093,750.00 pada UPK penguatan.

Kondisi kegiatan yang dilakukan UPK, di UPK penguatan sebagian sudah mempunyai usaha sektor riil yang dikelola oleh UPK. Usaha tersebut antara lain usaha peternakan kambing. Usaha sektor riil yang dilakukan UPK ada yang swakelola artinya usaha tersebut dikelola sendiri oleh UPK tapi ada juga yang bekerjasama dengan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari usaha tersebut digunakan untuk menembah permodalan UPK. Sedangkan UPK reguler belum ada usaha sektor riil. UPK reguler dan UPK penguatan telak memiliki kantor tetap untuk melakukan segala kegiatan UPK. Jadwal pelayanan juga sudah tertib dan teratur. Pelayanan UPK ada yang dilakukan 1 bulan sekali, bahkan ada yang setiap hari kerja. UPK menetapkan jadwal pelayanan tetapi kadang kala melakukan simpan pinjam diluar waktu yang telah ditentukan.

Peminjam di UPK reguler dan UPK penguatan adalah Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang seluruhnya memiliki kegiatan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Peminjam akan dikenakan jasa sebesar 1,5% perbulan. Pada UPK reguler belum ada jaminan sedangkan pada UPK penguatan harus memberikan jaminan berupa BPKB atau surat berharga lainnya seperti sertifikat tanah/rumah. Dengan adanya jaminan diharapkan peminjam akan lebih tertib membayar angsuran pinjaman sehingga tidak akan ada tunggakan. Karena jika salah satu anggota Pokmas menunggak maka anggota yang lain juga akan menanggung beban tunggakan tersebut karena Pokmas terbentuk dengan sistem tanggung renteng, maka UPK berhak menarik jaminan yang dianggunkan sebagai pelunasan pinjaman seperti dalam perjanjian pinjaman.

5.4. Keadaan Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Jumlah total responden dalam penelitian ini adalah 60 orang yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Ekonomi Produktif (Pokmas UEP) UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Penentuan jumlah responden ini didasarkan pada *Stratified Random Sampling* yaitu pengambilan responden secara acak distratifikasikan dari keseluruhan populasi. Untuk UPK reguler responden yang diteliti sebanyak 30 orang dan untuk UPK penguatan sebanyak 30 orang.

5.4.1. Keadaan Umum Kelompok Masyarakat (Pokmas)

Jumlah kelompok masyarakat (Pokmas) Unit Pengelola Keuangan (UPK) yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 25 Pokmas. Dari 25 Pokmas ini 19 (sembilan belas) Pokmas merupakan Pokmas bentukan pertama UPK pada Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) pada tahun 2006 yang disebut dengan program reguler. Dari 19 (sembilan belas) Pokmas ini tersebar di empat dusun yang ada di Desa Pandanrejo meliputi dusun Kajar yang terdiri dari 6 Pokmas yaitu Srikandi, Jamu Sehat, Ojiriah, Bandhi Cs, Apel Yani Club, Jagung Manis; dusun Dadapan terdiri dari 2 Pokmas yaitu Bangkelan Club, dan Vulkanisir Cs; dusun Ngujung terdiri dari 7 Pokmas yaitu Wanita Sejati, Andewi, Dahlia, Makmur Jaya, Sinar Jaya, Sukses Bersama, Matahari, dusun Pandan terdiri dari 4 Pokmas yaitu Trowelu, Jahit jaya, Bunga Mawar dan Giono Club.

Dan sisanya yaitu terdiri dari 6 Pokmas merupakan Pokmas bentukan yang kedua yaitu kegiatan penguatan UPK dari Program Gerdu-Taskin yang disebut dengan program penguatan. Dari 6 (enam) Pokmas ini juga tersebar di empat dusun yang ada di Desa Pandanrejo meliputi dusun Kajar yang terdiri dari Pokmas Transport dan Arpun; dusun Dadapan terdiri dari Pokmas Elektro; dusun Ngujung terdiri dari Pokmas Sumber waras dan Muadi; dusun Pandan terdiri dari Pokmas Yuni Cs.

Tiap Pokmas mempunyai jumlah anggota sebanyak 5 orang. Untuk lebih jelasnya tentang jumlah anggota tiap-tiap Pokmas dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Jumlah Anggota Pokmas UPK "Gempar" Sampel Desa Pandanrejo, 2006

No	Program	Dusun	Pokmas	Jumlah Anggota
1	Reguler	Kajar	Srikandi	5
			Jamu Sehat	5
			Ojiriah	5
			Bandhi Cs	5
			Apel Yani Cs	5
		Dadapan	Jagung Manis	5
			Bangkelan Club	5
			Vulkanisir Cs	5
			Wanita Sejati	5
			Andewi	5
		Ngujung	Dahlia	5
			Makmur Jaya	5
			Sinar Jaya	5
			Sukses Bersama	5
			Matahari	5
		Pandan	Trowelu	5
			Jahit Jaya	5
			Bunga Mawar	5
			Giono Club	5
			Transport	5
2	Penguatan	Kajar	Arpun	5
			Dadapan	Elektro
		Ngujung	Sumber Waras	5
			Muadi	5
		Pandan	Yuni Cs	5
Total				125

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

5.4.2. Keadaan Anggota POKMAS sampel

Jumlah sampel anggota Pokmas dalam penelitian ini adalah 30 yang diambil dari 25 Pokmas. Tiap Pokmas diambil 1 anggota dari anggota biasa yang tidak menjadi pengurus, dan 1 anggota sisanya diambil dari pengurus yaitu; ketua, sekretaris dan bendahara.

Anggota Pokmas yang menjadi sampel di desa Pandanrejo umumnya berekonomi lemah dan telah menjadi anggota Pokmas kurang lebih 10 bulan. Mereka adalah anggota yang aktif dalam kegiatan Pokmas hingga sekarang. Berikut

ini data anggota Pokmas pada program reguler yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Data Anggota Pokmas Sampel pada program Reguler

No.	Nama KelompokUPK	Nama Anggota	Umur (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jenis Usaha
1		Dulasim	48	SD	Petani
2		Lilik Chustin	45	SMP	Pedagang
3		Sugito	47	SMP	Penjual Jamu
4	Jamu Sehat	Sukani	45	SD	Penjual Jamu
5		Gatot Riyanto	45	SMP	Petani
6	Ojorjah	Supriyanto	40	SMP	Petani
7	Bandhi Cs.	Subandhi	35	SMP	Petani
8	Apel Yani Cs.	Achmad. Yani	35	SMP	Petani
9	Jagung Manis	Suyanto	45	SMP	Petani
10		Saifullah	37	SMP	Petani
11	Bangkelan Club.	Suhartono	35	SD	Pedagang Pakaian
12		Wirra'i.	45	SMP	Petani
13	Vulkanisir Cs.	Miskan	47	SMP	Tukang Kayu
14		Ginarti	35	SMP	PKL
15	Wanita Sejati	Waniti	65	SD	Petani
16		Remi	50	SD	PKL
17		Mistanti	52	SD	Pembuat Krupuk
18	Andewi	Kasmiatun	36	SD	Pedagang Sayur
19		Ribut	46	SD	Pedagang Bakso
20		Satukah	42	SD	Petani
21	Makmur Jaya	Samini	53	SD	PKL
22		Sutraningsih	32	SMP	PKL
2	Sinar Jaya	M. Junedi	23	SMU	PKL
24	Trowelu	Cahyanto	35	SMU	Petani
25		Surya Dewi	33	SMP	Penjahit
26	Jahit Jaya	Tanti Rahayu	35	SMU	Penjahit
27		Widaningsih	40	SMU	Petani
28	Bunga Mawar	Senan	45	SMP	Petani
29		Giono	33	SMP	Pedagang Es
30	Giono Club.	Dul Manan	44	SMP	Petani

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Pokmas pada program penguatan sejumlah 6 yang terdiri dari 5 anggota tiap Pokmas. Jumlah anggota Pokmas keseluruhan pada program penguatan adalah 30 orang. Berikut ini data anggota Pokmas pada program penguatan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 12.

Tabel 12. Data Anggota Pokmas Sampel pada program Penguatan

No.	Nama KelompokUPK	Nama Anggota	Umur (Tahun)	Tingkat Pendidikan	Jenis Usaha
1	Transport	Ngaturi	31	SMU	Penjual Es buah
2		Didik Santoso	25	SMP	Tukang Ojek
3		Diono	32	SMU	Tukang Ojek
4		Sudarman	33	SMP	Tukang Ojek
5		Satuki	34	SMP	Tukang Ojek
6	Arpun	Jumar	33	SMP	Pedagang
7		Sunar	37	SMU	Pedagang
8		Mada'i	35	SMP	Pedagang
9		Surono	34	SMP	Pedagang
10		Suwandi	34	SMU	Pedagang
11	Elektro	Yaseman	36	SMP	Petani
12		Sami'an	31	SMU	Tk.Servis Elektro
13		Miskan	38	SMP	Petani
14		Dasuri	40	SD	Petani
15		Rupa'i	45	SD	Petani
16	Sumber Waras	Warsi'in	57	SMP	Petani
17		Supardi	48	SD	Petani
18		Sukinah	40	SMP	Petani
19		Eko Pranyoto	44	SD	Petani
20		Wartini	49	SD	Petani
21	Muadi	Muadi	48	SMP	Petani
22		Slamet	55	SD	Petani
23		Nursi'in	46	SD	Petani
24		Budiono	39	SMP	Petani
25		Sunardi	43	SD	Petani
26	Yuni Cs.	Yuni S.	37	SMP	Petani
27		Kasti	42	SD	Petani
28		Darmi	44	SMP	Petani
29		Suri'ah	47	SD	Petani
30		Partono	51	SMP	Petani

Sumber : Kantor Desa Pandanrejo, 2007

Berikut ini disajikan tabel distribusi anggota Pokmas sampel pada program reguler dan penguatan berdasarkan :

1) Mata Pencaharian

Dilihat dari jenis usaha responden yang rata-rata bermata pencaharian utama sebagai petani yaitu berjumlah 14 atau 47,00% responden pada program reguler dan 19 atau 63.33% responden pada program penguatan. Usaha dibidang perdagangan yaitu meliputi pedagang sayur sebanyak 2 atau 7,00% responden pada program reguler dan 2 atau 6.67% responden pada program penguatan, pedagang pakaian sebanyak 1 atau 3,00% responden pada program reguler dan 2 atau 6.67% responden pada program penguatan, PKL sebanyak 10 atau 17,00% responden pada program reguler dan 2 atau 6.67% responden pada program penguatan. Usaha dibidang jasa sebanyak 3 atau 7.00% responden pada program reguler dan 5 dan 16.67% responden pada program penguatan. Penyajian Distribusi mata pencaharian responden dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13. Jenis Usaha Anggota Pokmas UPK "Gempar Program Reguler dan Penguatan

Jenis Usaha	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	14	47.00	19	63.33
Pedagang Sayur	2	7.00	2	6.67
Pedagang Pakaian	1	3.00	2	6.67
Pedagang Pracangan/PKL	10	17.00	2	6.67
Usaha Jasa	3	7.00	5	16.67
Total	30	81.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

2) Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang ikut serta dalam menentukan kualitas sumber daya manusia secara individual. Tidak diingkari bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka akan mempertinggi kesadaran dan tanggungjawab dalam diri individu yang

bersangkutan. Dalam penelitian ini responden memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan SMP memiliki jumlah paling tinggi sebanyak 16 atau 53,00 % responden pada program reguler dan 15 atau 50.00% responden pada program penguatan, 10 responden merupakan tamatan SD dengan persentase 33,00 % baik pada program reguler maupun penguatan. Sedangkan latar belakang pendidikan responden dengan persentase terendah adalah tamatan SMU sebanyak 4 atau 14,00% responden pada program reguler dan 5 orang atau 17.00% responden pada program penguatan. Dari jumlah dan presentase pendidikan responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tergolong memiliki kualitas sumberdaya yang rendah pula. Secara lengkap tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14. Tingkat Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar” Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007

Tingkat Pendidikan	Program UPK			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tamat SD	10	33.00	10	33.00
Tamat SMP	16	53.00	15	50.00
Tamat SMU	4	14.00	5	17.00
Diploma 1	0	0.00	0	0.00
Diploma 3	0	0.00	0	0.00
Total	30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

3) Tingkat Umur

Responden dalam penelitian ini memiliki tingkat umur yang bervariasi antara 20 hingga lebih dari 50 tahun. Jumlah responden dengan rentang umur antara 31-35 tahun merupakan responden dengan jumlah terbanyak yaitu sebanyak 9 orang dengan persentase 30.00% pada program reguler maupun pada program penguatan, berikutnya jumlah responden dengan rentang umur antara 41-45 merupakan responden dengan urutan kedua yaitu sebanyak 8 orang

dengan persentase 27.00% pada program reguler sedangkan pada program penguatan jumlah responden dengan rentang umur antara 36-40 yaitu sebanyak 7 orang dengan persentase 23.00%. Jumlah responden dengan rentang umur 46-50 tahun yaitu berjumlah 5 orang dengan persentase 17,00 % baik pada program reguler maupun pada program penguatan, sedang jumlah responden paling sedikit adalah umur 20-30 tahun yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 3,00% pada program reguler maupun pada program penguatan dalam penelitian ini terdapat juga 3 responden yang berusia lebih dari 50 tahun dengan persentase 10,00 % baik pada program reguler maupun penguatan. Dari sebaran tingkat umur yang ada, maka peneliti beranggapan bahwa masing-masing tingkat usia sudah terwakili oleh responden yang ada. Penyajian distribusi umur responden dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 15. Tingkat Distribusi Umur Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar”
Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007

Kelompok Umur (Tahun)	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
< 20	0	0.00	0	0.00
20 - 25	1	3.00	1	3.00
26 - 30	0	0.00	0	0.00
31 - 35	9	30.00	9	30.00
36 - 40	4	13.00	7	23.00
41 - 45	8	27.00	5	17.00
46 - 50	5	17.00	5	17.00
> 50	3	10.00	3	10.00
Total	30	100.00	30	100

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

VI. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian mengenai hasil yang diperoleh di lapang akan dijabarkan dalam Bab VI yaitu Bab Hasil dan Pembahasan. Penjabaran hasil penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian. Dan penelitian ini memiliki tiga tujuan. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan responden terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro, tujuan kedua adalah menganalisis peran modal sosial (social capital) terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman, tujuan ketiga adalah menganalisis peran modal sosial dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin.

6.1. Tingkat Pengetahuan Responden terhadap Peran UPK sebagai sumber Pembiayaan mikro

Berdasarkan kepada hasil penelitian,UPK telah memainkan peran cukup bail sebagai sumber pembiayaan mikro. Hal ini tergambar dari tingkat pengetahuan responden yakni anggota Pokmas UPK tentang asal pengembangan UPK, struktur organisasi UPK, dan mekanisme pengelolaan kegiatan UPK.

6.1.1. Asal Pengembangan Unit Pengelola Keuangan

Program Gerdu-Taskin dirancang khusus sebagai manifestasi sikap tanggap Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jawa Timur melalui pendekatan TRI DAYA, yang dimulai sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2005. Program Gerdu-Taskin telah berhasil memfasilitasi pembentukan sebuah institusi usaha yang bergerak dalam bidang sektor jasa/pelayanan keuangan mikro kecil yang berupa Unit Pengelola Keuangan (UPK).

UPK diharapkan mampu megelola dan mengembangkan Program Gerdu-Taskin yang bersifat ekonomi produktif sebagai Dana Bergulir (*revolving fund*) bagi pengembangan ekonomi masyarakat miskin di Desa/Kelurahan tersebut. Lebih jauh diharapkan UPK mampu berperan mensinergikan pengelolaan program-program penanggulangan kemiskinan yang bersifat ekonomi produktif yang masuk ke Desa/Kelurahan. Sehingga ke depan UPK bisa tumbuh dan berkembang menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang akan mengelola dan mengembangkan

aset-aset perekonomian yang ada di Desa/Kelurahan sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pasal 213).

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin memantapkan pelaksanaan Gerdu-Taskin dari aspek kelembagaan dan usaha UPK, dan mengoptimalkan potensi Pokmas UEP dalam pengembangan usaha RTM. Kegiatan ini juga diharapkan dapat mengembangkan UPK sebagai lembaga keuangan mikro untuk diarahkan menjadi embrio BUMDes, meningkatkan kemampuan UPK dalam mengembangkan usaha simpan pinjam dan usaha sektor riil yang berbasis potensi sumberdaya lokal, meningkatkan kemampuan UPK dalam mendukung kegiatan sosial bagi RTM Rentan. Dan meningkatkan kemitraan antara pihak terkait dalam mendukung program penanggulangan kemiskinan.

Dari tabulasi data yang ada, keadaan responden menunjukkan bahwa secara umum mereka mengetahui tentang asal pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) “Gempar” pada program Gerdu-Taskin. Adapun pengetahuan responden tentang asal pengembangan UPK “Gempar” yaitu pengetahuan tentang program simpan pinjam modal usaha, ketentuan/aturan tentang simpan pinjam modal usaha, siapa saja yang boleh menjadi anggota, berapa jumlah pinjaman yang diberikan, berapa jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha, bagaimana cara pengembalian pinjaman modal usaha, berapa tingkat bunga yang harus dipenuhi, mengetahui pembuat ketentuan/aturan yang berlaku, apakah pernah melakukan pinjaman sebelumnya. Dan sejauh ini para responden beranggapan bahwa mereka mengetahui dan paham akan hal tersebut. Jadi ditinjau dari tingkat pengetahuan tentang asal pengembangan UPK “Gempar” masuk dalam kategori tinggi dengan jumlah nilai total persentase 72.11% pada UPK program reguler dan 71.44% pada UPK program penguatan.

Adapun presentase nilai yang dimiliki masing masing indikator pengetahuan tentang asal pengembangan UPK “Gempar” di sajikan pada Tabel 16 di bawah ini.

Tabel 16. Tingkat Pengetahuan Asal Pengembangan Unit Pengelola Keuangan (UPK) "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Struktur Kelompok	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pengetahuan tentang pengurus simpan pinjam modal usaha	3	2.87	10.63%	3	2.90	10.74%
2	Pengetahuan tentang ketentuan/ aturan simpan pinjam modal usaha	3	2.4	8.89%	3	2.60	9.63%
3	Pengetahuan tentang siapa saja yang bisa meminjam modal usaha	3	1.43	5.30%	3	1.73	6.41%
4	Besarnya jumlah pinjaman modal Usaha yang diberikan	3	2.20	8.15%	3	1.70	6.30%
5	Jangka waktu pengembalian modal usaha	3	1.90	7.04%	3	1.70	6.30%
6	Bagaimana cara pengembalian modal usaha	3	1.77	6.56%	3	1.73	6.41%
7	Tingkat suku bunga yang harus dipenuhi	3	2.50	9.26%	3	2.80	10.37%
8	Pengetahuan tentang pembuat ketentuan/ aturan yang berlaku	3	2.93	10.85%	3	2.90	10.74%
9	Pernah/tidaknya melakukan pinjaman modal usaha sebelumnya	3	1.47	5.44%	3	1.23	4.56%
Jumlah		27	19.47	72.11%	27	19.29	71.44%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

6.1.2. Lokasi dan Tata Letak Unit Pengelola Keuangan "Gempar"

Unit Pengelola Keuangan "Gempar" terletak di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Malang dan berbatasan dengan:

Sebelah Utara dengan Desa Bumiaji, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

Sebelah Selatan dengan Kelurahan Temas, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

Sebelah Timur dengan Desa Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

Sebelah Barat dengan Desa Sidomulyo, Kec. Bumiaji, Kota Batu.

UPK "Gempar" terletak di wilayah yang tergolong strategis karena berada dijalur antara kota Batu dan Kota Malang, sehingga memudahkan akses anggota Pokmas. Tata letak UPK "Gempar" merupakan keseluruhan bentuk dan penempatan

fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam akses terhadap sumber-sumber pembiayaan. Letak kantor UPK “Gempar” menjadi satu dengan kantor Kelurahan Desa Pandanrejo hal ini untuk memudahkan dalam pelaporan, pengawasan, serta pemantauan dan evaluasi kinerjanya.

6.1.3. Struktur Organisasi Pengelola Program Gerdu-Taskin

Pengelolaan kegiatan UPK Gerdu-Taskin sebagai bagian dari program Gerdu-taskin secara langsung dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Hal ini juga ditujukan untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi TKPK Propinsi maupun Kabupaten/Kota dalam melakukan koordinasi dan mengembangkan sejumlah kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerahnya secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

1. Organisasi Pengelola Propinsi

A. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Propinsi

TKPK-Propinsi adalah penanggungjawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur. TKPK-Propinsi secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappeprop. Dalam pelaksanaan program gerdu-Taskin, TKPK-Propinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- 1) Menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi.
- 2) Menyiapkan data terkini tentang jumlah penduduk miskin di Jawa Timur.
- 3) Membahas rencana kegiatan pengelolaan program Gerdu-Taskin beserta dukungan operasionalnya.
- 4) Mengkoordinasikan peran dinas/instansi dan stakeholders lainnya dalam mendukung program Gerdu-Taskin.
- 5) Mambahas usulan dan menetapkan jumlah dana program Gerdu-Taskin.
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- 7) Melaporkan pelaksanaan program Gerdu-Taskin kepada Gubernur secara berkala.

B. Sekretariat Tetap (Sektap) Propinsi

Sektap Propinsi adalah pelaksana harian TKPK Propinsi yang ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua TKPK. Struktur Organisasi Sektap paling tidak

terdiri atas Ketua dibantu dengan bidang-bidang, yakni: (i). Bidang program, (ii). Bidang administrasi dan keuangan, (iii). Bidang monitoring dan pelaporan.

Sektap Propinsi diketuai oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPEMAS) Propinsi dengan tugas dan tanggungjawab meliputi:

- 1) Memberikan data dan informasi kepada TKPK untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi program.
- 2) Menyusun pedoman umum dan menetapkan Petunjuk Teknis Operasional Program Gerdu-Taskin.
- 3) Melakukan Sosialisasi Program Gerdu-Taskin kepada Kabupaten/Kota.
- 4) Menyelenggarakan pelatihan/lokakarya bagi pengelola Kabupaten/Kota maupun desa/Kelurahan.
- 5) Melakukan monitoring pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- 6) Menyampaikan usulan Kabupaten/Kota kepada TKPK untuk dibahas dan ditetapkan alokasi dananya.
- 7) Menyampaikan laporan perkembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK-Propinsi secara berkala.
- 8) Mengembangkan sistem pengelolaan data dan informasi program Gerdu-Taskin.
- 9) Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi/LSM dalam rangka pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.

C. Tim Pendamping Pripinsi (TPP)

Tim Pendamping Propinsi (TPP) adalah tim pendukung TKPK dan Sektap Propinsi dalam Pengelolaan Program Gerdu-Taskin. TPP terdiri dari tenaga ahli yang berpengalaman di bidang pengembangan masyarakat yang berasal dari LSM/Perguruan Tinggi.

Tugas dan tanggungjawab TPP meliputi:

- 1) Mendampingi TKPK dan Sektap dalam mengelola Program Gerdu-Taskin Propinsi.
- 2) Membantu perumusan kebijakan program Gerdu-Taskin, terutama dalam bentuk pedoman dan petunjuk teknis operasional.
- 3) Bersama-sama Sektap Propinsi menyiapkan pengadaan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TKPM).

- 4) Melatih Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TKPM).
- 5) Melakukan pengorganisasian dan pengendalian TPM dan KTPM.
- 6) Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pendampingan kepada TKPK dan Sektap Propinsi secara berkala.
- 7) Bersama-sama Sektap Propinsi dan TKPK Propinsi memfasilitasi penanganan kasus yang terjadi.

2. Organisasi Pengelola Kabupaten/Kota

A. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota.

TKPK-Kabupaten/Kota adalah bertanggung jawab seluruh kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/WaSlikota.

TKPK-Kabupaten/Kota secara fungsional dikoordinasikan oleh Bappekab/Bappeko. Dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin TKPK Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- 1) Menyusun strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten/Kota masing-masing dengan mempertimbangkan kebijakan Pemerintah Propinsi.
- 2) Menyusun kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Gerdu-Taskin Kabupaten/Kota dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Operasional Propinsi.
- 3) Menetapkan Rencana Kegiatan Pengelolaan Program Gerdu-Taskin beserta dukungan operasionalnya.
- 4) Menetapkan dana penyertaan (sharing) dan dana pendamping (matching) serta mendorong realisasinya pada APBD Kabupaten/Kota untuk mendukung program Gerdu-Taskin.
- 5) Melakukan evaluasi pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- 6) Mengkoordinasikan peran dinas, instansi, lembaga, maupun stakeholserd lainnya dalam pelaksanaan program.
- 7) Melaporkan pelaksanaan program Gerdu-Taskin kepada Bupati/Walikota maupun TKPK Propinsi secara berkala maupun insidental.

B. Sekretariat Tetap (Sektap) Kabupaten/Kota.

Sektap Kabupaten/Kota adalah pelaksana harian program Gerdu-Taskin yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua TKPK. Struktur organisasi sektap paling tidak terdiri atas Ketua dibantu dengan bidang-bidang, yakni: (I). Bidang program, (ii). Bidang administrasi dan keuangan, (iii) bidang monitoring dan pelaporan.

Sektap Kabupaten/Kota diketuai oleh Badan/Dinas/Kantor/ bagian Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas dan tanggung jawab:

- 1) Memebrikan data dan informasi kepada TKPK Kabupaten/Kota.untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program.
- 2) Mengelola dan menyalurkan dana Program Gerdu-Taskin keapda Desa/Kelurahan.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan/lokakarya bagi pengelola program Gerdu-Taskin Desa/Kelurahan.
- 4) Melaksanakan verifikasi usulan kegiatan desa/Kelurahan.
- 5) Menyampaikan usulan kegiatan Desa/Kelurahan hasil verifikasi kepada Sektap Propinsi dalam bentuk LK.
- 6) Melakukan monitoring pelaksanaan program Gerdu-Taskin.
- 7) Menyampaikan laporan perkembangan program dan hasil monitoring kepada TKPK Kabupaten/Kota secara berkala.
- 8) Melaporkan perkembangan pelaksanaan program dan hasil monitoring program Gerdu-Taskin kepada Gubernur Cq. Sektap Propinsi secara berkala maupun insidental selama pelaksanaan program.
- 9) Malaksanakan dan atau mengkoordinasikan kegiatan pembinaan kepada UPK dan Pokmas UEP selama pelaksanaan program maupun pasca program.
- 10) Mengembangkan Sistem Pengelolaan Data dan Informasi Program Gerdu-Taskin.

C. Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM).

KPTM adalah merupakan tenaga pendukung TKPK dan Sektap dalam pengelolaan Program Gerdu-Taskin di Kabupaten/Kota, yang disediakan oleh Tim Pendamping Propinsi. Tugas dan tanggungjawab KTPM:

- 1) Mendampingi TKPK dan Sektap dalam mengelola Program Gerdu-Taskin Kabupaten/Kota dalam setiap tahapan pelaksanaan program.

- 2) Memberikan masukan kepada TKPK dan Sektap dalam pembuatan kebijakan lokal program Gerdu-Taskin.
- 3) Mengkoordinasikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan oleh TPM di wilayah tugasnya.
- 4) Memberikan bimbingan teknis kepada TPM dalam melaksanakan kegiatan pendampingan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- 5) Membantu TPP dalam melakukan pengendalian kinerja TPM.
- 6) Melakukan koordinasi dan melaporkan kegiatan pendampingan program Gerdu-Taskin di wilayah tugasnya kepada TPP secara berkala dengan tembusan TKPK dan Sektap Kabupaten/Kota.
- 7) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan dan pengembangan program.

D. Tenaga Fasilitas Kecamatan(TFK)

Tenaga Fasilitas Kecamatan (TFK) adalah bagian dari Sektap Kabupaten/Kota yang berada di Kecamatan, dan bertugas memberikan bimbingan, monitoring serta bantuan teknis yang diperlukan guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan program Gerdu-Taskin di desa/Kelurahan.

TFK adalah Kasi PMD atau Kasi yang membidangi pemberdayaan masyarakat di Kecamatan. Tugas dan tanggungjawab TFK, meliputi:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program Gerdu-Taskin di Desa/Kelurahan.
- 2) Bersama TPM memberikan bimbingan teknis dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa/Kelurahan.
- 3) Membantu Sektap Kabupaten/Kota dalam monitoring pelaksanaan program.
- 4) Melaporkan kegiatan sosialisasi, fasilitas dan monitoring yang telah dilaksanakan kepada Sektap Kabupaten/Kota secara berkala.

E. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

TPM adalah tenaga yang mendampingi UPK dan Pokmas dalam melaksanakan kegiatan Gerdu-Taskin di Desa/kelurahan. Tugas dan tanggung jawab TPM:

- 1) Bersama TFK melakukan sosialisasi Program Gerdu-Taskin di Desa/Kelurahan.

- 2) Memfasilitasi UPK dalam mengklasifikasikan RTM.
- 3) Memfasilitasi UPK dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan RTM maupun masyarakat Desa/Kelurahan.
- 4) Memfasilitasi kegiatan perencanaan untuk penentuan skala prioritas usulan desa/Kelurahan dan pembentukan TPU.
- 5) Memfasilitasi TPU dalam Penyusunan usulan Desa/Kelurahan.
- 6) Memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana program di desa/Kelurahan.
- 7) Memfasilitasi UPK dalam pembentukan Pokmas UEP, pelayanan permohonan pinjaman, analisis kelayakan usaha, dan penetapan pinjaman Pokmas UEP yang layak didanai.
- 8) Memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan UPK.
- 9) Memberikan bimbingan teknis pengelolaan usaha Pokmas UEP dan pelaksanaan kegiatan timlak.
- 10) Memfasilitasi penyusunan laporan berkala oleh UPK, Pokmas, dan Timlak.
- 11) Memfasilitasi UPK dan Timlak dalam pertanggungjawaban dan pelestarian program.
- 12) Melakukan koordinasi dengan TFK berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 13) Melaksanakan pelaporan secara berkala kepada KTPM berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- 14) Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan dan pengembangan program.

3. Organisasi Pengelola Desa/Kelurahan

A. Unit Pengelola Keuangan (UPK)

Unit Pengelola Keuangan (UPK) adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang dibentuk untuk menangani program Gerdu-Taskin. Anggota UPK ini sendiri terdiri dari perwakilan masing masing dusun dalam satu desa yang sudah dipilih berdasarkan musyawarah. Pengurus UPK dipilih berdasarkan kriteria:

- 1) Warga Desa/Kelurahan setempat yang dikenal jujur, kreatif dan bertanggung jawab.

- 2) Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Bukan aparat pemerintah Desa/Kelurahan maupun anggota BPD.
- 4) Bukan anak atau isteri Kepala Desa/Kelurahan.
- 5) Dapat berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Adapun Tugas dan tanggung jawab UPK (Anonymous, 2006a), meliputi:

- 1) Melakukan klarifikasi dan klasifikasi Rumah Tangga Miskin (RTM).
- 2) Memfasilitasi identifikasi kebutuhan untuk menggali usulan kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan RTM maupun masyarakat Desa/Kelurahan.
- 3) Berdasarkan musyawarah desa, menetapkan skala prioritas kebutuhan dan mengajukan usulan Desa/Kelurahan kepada sektap Kabupaten/Kota.
- 4) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa.
- 5) Memfasilitasi pembentukan Pokmas UEP dan melayani permohonan pinjaman.
- 6) Melakukan analisis kelayakan usaha dan peminjam serta menetapkan persetujuan dana pinjaman yang diusulkan oleh Pokmas UEP.
- 7) Menyusun dan menetapkan berbagai aturan yang diperlukan, terutama berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam dan pengelolaan kegiatan lainnya.
- 8) Melakukan perjanjian dengan Pokmas UEP maupun pihak lain dalam bentuk akad.
- 9) Membuka rekening atas nama UPK.
- 10) Bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pinjaman dari Pokmas UEP sesuai akad pinjaman.
- 11) Bertanggung jawab terhadap keberlanjutan dan pelestarian program.
- 12) Membukukan secara teratur, tertib dan rapi semua transaksi UPK sesuai kaidah pencatatan yang diterima umum.
- 13) Memberikan bantuan teknis kepada Pokmas UEP.
- 14) Mendokumentasikan kegiatan TRI DAYA.

B. Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP)

Pokmas UEP merupakan himpunan dari beberapa Rumah Tangga Miskin (RTM) berpotensi yang bersepakat untuk memperoleh pinjaman dari UPK sesuai dengan kebutuhannya. Pokmas dibentuk untuk mempermudah penerimaan dana

dari program Gerdu-Taskin. Anggota pokmas terdiri dari masyarakat yang mempunyai usaha sendiri, sehingga dana ini nantinya diharapkan dapat membantu meningkatkan penghasilan mereka.

Satu Pokmas beranggotakan 5-10 RTM Berpotensi yang dibentuk secara sukarela berdasarkan kesamaan bidang usaha atau dasar lainnya. Setiap Pokmas UEP dipimpin oleh seorang ketua.

Tugas dan tanggung jawab Pokmas UEP (Anonymous, 2006a), meliputi :

- 1) Membuat dan menyepakati aturan kelompok.
- 2) Melaksanakan kesepakatan dengan UPK, khususnya berkaitan dengan ketentuan pinjaman.
- 3) Bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pengembalian pinjaman sesuai dengan akad pinjaman yang telah disepakati.
- 4) Mencatat kegiatan dan keuangan kelompok.
- 5) Melakukan koordinasi dan melaporkan perkembangan kegiatan ke UPK.

C. Tim Pelaksana (Timlak)

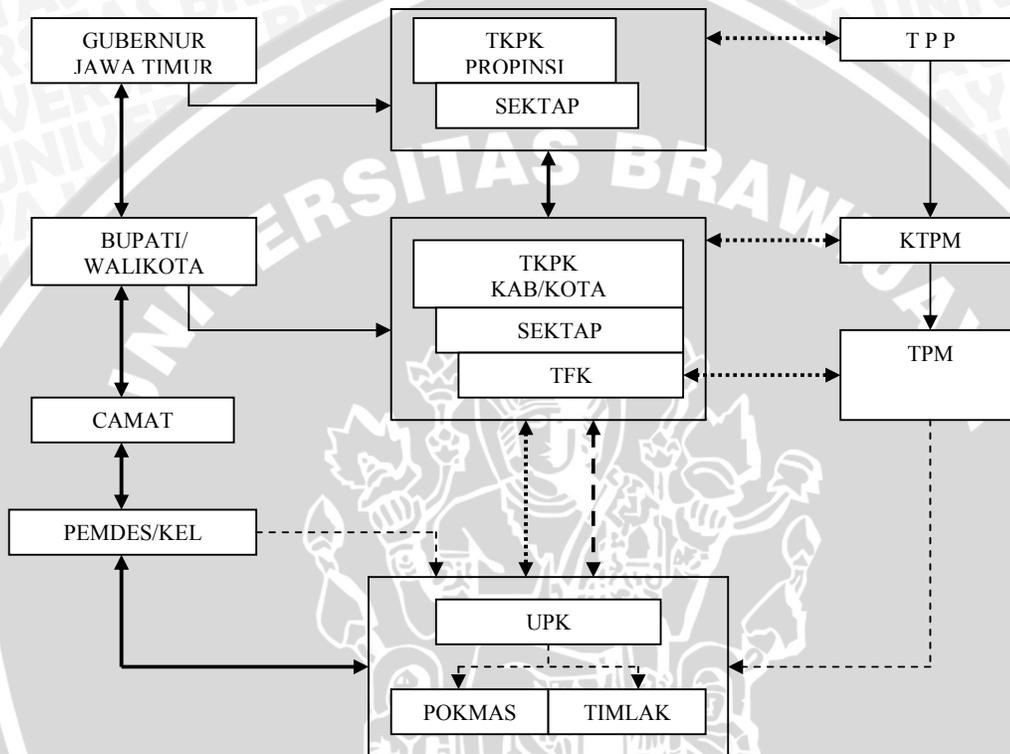
Tim Pelaksana Kegiatan (Timlak) Desa/Kelurahan (Anonymous, 2006a) adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pemberdayaan manusia dan lingkungan. Timlak dibentuk melalui Musyawarah Desa dan sedapat mungkin melibatkan LKMD atau sebutan lain, ditetapkan dengan Surat Keputusan Desa/Lurah. Susunan Timlak sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang bendahara dan anggota.

Adapun tugas dan tanggung jawab Timlak (Anonymous, 2006a), meliputi:

- 1) Membuat rencana kerja teknis pelaksanaan kegiatan beserta RAB-nya, yang selanjutnya diajukan ke UPK untuk dibahas.
- 2) Memberikan penjelasan dalam pembahasan Rencana Kerja dan RAB bersama UPK, Pemerintah Desa/Kelurahan, BPD, dan Wakil RTM yang terkait dengan program.
- 3) Memobilisasi potensi swadaya masyarakat desa/Kelurahan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan.
- 4) Mengelola pelaksanaan kegiatan pemberdayaan lingkungan dan manusia.

- 5) Mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan baik secara administratif maupun teknis kepada UPK.

Hubungan fungsional dan struktural antar organisasi pengelola program Gerdu-Taskin diatas dapat diskemakan sebagaimana gambar bagan dibawah ini:



Gambar 3. Hubungan fungsional dan struktural antar organisasi pengelola program Gerdu-Taskin

Keterangan :

- Garis hubungan struktural
- Garis hubungan konsultasi dan koordinasi
- Garis hubungan fasilitas dan pendampingan

6.1.4. Mekanisme Pengelolaan Kegiatan UPK Gerdu-Taskin

Mekanisme pengelolaan Kegiatan UPK Gerdu-Taskin meliputi tahap-tahapan sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk menjelaskan tentang konsep, tujuan dan mekanisme kegiatan UPK, sehingga diperoleh persepsi yang sama oleh Pengelola Program dan Pihak-pihak terkait. Sosialisasi program juga bertujuan

untuk membangun komitmen semua pihak untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Efektivitas sosialisasi dimaksudkan untuk menjelaskan kosepsi dasar, prinsip dan mekanisme pengelolaan dipahami secara utuh oleh semua pelaku program. Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, sampai pada tingkat Desa/Kelurahan.

2. Perencanaan

Kegiatan perencanaan dilaksanakan setelah kegiatan sosialisai. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun usulan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan program. Perencanaan harus dilaksakan secara partisipatif sehingga memungkinkan dapat menyerap kebutuhan dan aspirasi anggota Pokmas UEP. Perencanaan dalam UPK Program Gerdu-Taskin dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan: (a). Pendataan Kondisi Awal (profil) UPK, kegiatan ini dimaksudkan untuk memotret kondisi awal UPK. Pendataan kondisi awal UPK dilakukan oleh TPM dengan melibatkan Pengurus UPK dan Kepala Desa/Kelurahan. Kegiatan ini dilakukan dengan metode wawancara dan analisa dokumen menggunakan (Form IP-01). Pendataan profil UPK meliputi sumberdaya manusia UPK dan Pokmas, kelembagaan UPK, kinerja manajemen, kinerja keuangan ; (b). Penelusuran asset, penelusuran asset adalah keagitan untuk mendeteksi segala jenis asset yang dimiliki UPK diantaranya adalah: Uanga Tunai, Dana Bank, Piutang Pokmas, Perlengkapan Kantor, Inventarisasi aktiva tetap, aktiva lain. Penelusuran asset ini dilakukan dengan cara melakukan pengecekan silang antara dokumen-dokumen administrasi yang ada di UPK dengan catatan-catatan yang ada pada Pokmas, sehingga dapat dipastikan jumlah dan keberadaan asset yang dimiliki oleh UPK yang dilaporkan adalah riil. Kegiatan ini dilakukan oleh TPM berdasarkan data kondisis awal dengan melakukan periksa silang dan wawancara langsung dan sampling kepada Pokmas UEP; (c). Identifikasi Potensi dan Masalah UPK, identifikasi potensi dan masalah UPK adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh UPK bersama-sama pemerintahan Desa dan Pokmas UEP serta tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi terhadap perkembangan UPK untuk menentukan atau mengidentifikasi serta menganalisis berbagai potensi yang dimiliki oleh UPK serta masalah yang dihadapi. Potensi dan masalah UPK yang di

identifikasi meliputi: Kelembagaan dan organisasi UPK, administrasi sistem dan prosedur operasional, kinerja keuangan, Pokmas UEP; (d). Kegiatan identifikasi, identifikasi potensi-potensi dan masalah dapat dilakukan dengan Diskusi Kelompok Terfokus, yaitu metode penggalian informasi dengan melakukan diskusi bersama peserta yang telah terpilih sebelumnya dengan menggunakan metode wawancara. Peserta diskusi ini terdiri dari pengurus UPK, anggota Pokmas, tokoh masyarakat, Pemerintah Desa; (e). Musyawarah Perencanaan, hasil identifikasi Potensi dan Masalah tersebut kemudian dikaji dan dirumuskan secara bersama-sama melalui musyawarah untuk menyusun skala prioritas dan rencana kegiatan. Peserta musyawarah perencanaan yaitu: Pengurus UPK, Pemerintah Desa/Kelurahan, Ketua/Perwakilan seluruh Pokmas UEP, Pengelola USR. Penyusunan Rencana Kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan mengacu pada ruang lingkup kegiatan UPK Gerdu-Taskin sesuai kategori masing-masing UPK.

3. Pelaksanaan

Untuk mengajukan pencairan dana APBD Propinsi Kegiatan UPK Program Gerdu-Taskin diperlukan kelengkapan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 4 (empat) sebagai berikut: (a). Lembar Kerja (LK) penggunaan dana UPK yang terdiri dari Form LK-01 dan Form LK-02; (b). foto Copy nomor rekening khusus Bupati/Walikota atas nama jabatan; (c). Foto Copy DASK alokasi dana penyertaan (sharing) Kabupaten/Kota tahun 2006. apabila belum mengalokasikan dana penyertaan yang ditandatangani oeh Bupati/Walikota; (d). Kwitansi Tanda Terima dan Gerdu-Taskin yang ditandatangani Bupati/Walikota rangkap 4 (empat), berstempel dan lembar pertama bermaterai.

6.1.5. Kondisi Kelompok Masyarakat Usaha Ekonomi Produktif (Pokmas UEP) UPK “Gempar”

Kelompok Masyarakat UEP (Pokmas UEP) pada UPK “Gempar” dibentuk pada tahun 2005, dengan anggota sebanyak 125 orang. Suatu lembaga, terlebih kelompok masyarakat usaha ekonomi produktif memiliki peranserta yang besar dalam peningkatan partisipasi anggota dalam setiap program pembangunan yang ada. Sebelum peneliti mengkaji lebih jauh tentang variabel peningkatan pendapatan

dan modal sosial, maka peneliti akan menjabarkan konsisi Pokmas ditinjau dari segi struktur kelompok, tujuan kelompok, fungsi tugas dan kekompakan Pokmas yang diukur melalui Likert sebagai alat bantu analisis. Pengkajian kondisi Pokmas ini dirasa sangat penting oleh peneliti karena keberadaan modal sosial dapat ditinjau melalui sekumpulan nilai informal yang menyebar diantara anggota kelompok yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Jadi keberadaan Pokmas sebagai suatu kelompok atau lembaga sangat menentukan bagaimana modal sosial itu mampu berkembang.

1. Struktur Kelompok

Dari tabulasi data yang ada, keadaan responden menunjukan bahwa secara umum mereka mengetahui tentang struktur kepengurusan dalam Pokmas UPK “Gempar”, selain mengetahui struktur kepengurusan mereka juga mengetahui siapa saja yang menjabat dalam kepengurusan, hal ini dikarenakan masing-masing pengurus memiliki wewenang yang berbeda yang membuat anggota Pokmas harus mengetahui kemana dan siapa yang harus ditemui bila terdapat masalah yang berkaitan dengan Pokmas. Dan sejauh ini para responden beranggapan bahwa masing masing pengurus telah melaksanakan kewajibannya dan mampu melayani anggota Pokmas dengan baik. Presentase ini memiliki nilai yang sama dengan indikator pengetahuan tentang keinginan dan alasan bergabung dalam kelompok dengan nilai rata-rata 2.53 dengan persentase 21.08% UPK reguler dan pada UPK penguatan presentase indikator pengetahuan tentang keinginan dan alasan bergabung dalam kelompok dengan nilai masing masing 2.63 atau 21.92% dan 2.47 atau 20.58%.

Hasil skoring penghitungan keadaan Pokmas ditinjau dari tingkat pengetahuan responden terhadap struktur pengurus Pokmas dan kepuasan responden terhadap kinerja pengurus Pokmas UPK “Gempar” menunjukkan bahwa variabel ini tergolong pada kategori tinggi. Berikut disajikan tabulasi nilai tingkat pengetahuan responden terhadap struktur pengurus dan kepuasan responden terhadap kinerja pengurus di Pokmas UPK “Gempar”.

Tabel 17. Tingkat Pengetahuan Responden Terhadap Struktur Pengurus Pokmas Dan Kepuasan Responden Terhadap Kinerja Pengurus Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Struktur Kelompok	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pengetahuan keinginan bergabung dalam kelompok	3	2.53	21.08%	3	2.63	21.92%
2	Pengetahuan alasan bergabung dalam kelompok	3	2.53	21.08%	3	2.47	20.58%
3	Pengetahuan tentang pengurus kelompok dan jabatannya	3	2.23	18.58%	3	2.30	19.17%
4	Tingkat kepuasan terhadap kinerja pengurus	3	2.40	20.00%	3	1.87	15.58%
Jumlah		12	9.69	80.75%	12	9.27	77.25%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

2. Tujuan Kelompok

Keberadaan suatu kelompok atau organisasi ditunjukkan dengan adanya proses pencapaian tujuan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Pokmas UPK "Gempar" adalah peningkatan taraf hidup anggotanya melalui peningkatan pendapatan mereka. Dari 30 responden yang ada, 20 orang diantaranya masuk dalam kategori tingkat pemahaman tinggi terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh kelompoknya., 8 responden tergolong dalam kategori sedang dan sisanya sebanyak 2 responden tergolong kategori rendah. Dari 3 pertanyaan yang menguraikan tentang tujuan kelompok menempati presentase tertinggi sebanyak 28.89% pada UPK reguler dan 31.89% pada UPK penguatan dan para responden merasa bahwa saat ini Pokmas UPK "Gempar" sudah jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu responden berikut ini:

"nek masalah tujuan, yo wis puas banget mbak, tapi yo ono ra puase setitik yo iku sebab masalah macete balenan modal silihan utowo tunggakan utang. Opo maneh aku anggota lawas awit didege kelompok, dadine ngerti piye keadaan kit biyene. Saiki kabeh masalah macete balenan silihan modal utowo tunggakan utang luwih gampang diomongke karo pengurus UPK ne dewe". (Kalau masalah tujuan,

ya sudah sangat puas, tetapi ada sedikit tidak puasnya karena masalah terjadinya tunggakan pengembalian pinjaman atau kredit macet. Sekarang semua masalah kredit macet lebih mudah dibicarakan dengan pengurus UPK sendiri).

Jadi ditinjau dari tingkat pengetahuan dan kepuasan pencapaian tujuan kelompok, maka Pokmas UPK "Gempar" masuk dalam kategori sedang dengan jumlah nilai persentase 67.44% pada UPK reguler dan 64.44% pada UPK penguatan. Berikut disajikan tabulasi nilai tingkat pengetahuan dan kepuasan responden terhadap pencapaian tujuan di Pokmas UPK "Gempar":

Tabel 18. Tingkat Pengetahuan Dan Kepuasan Responden Terhadap Pencapaian Tujuan Pokmas Dan Kinerja Pengurus Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Tujuan Kelompok	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pengetahuan tentang tujuan dalam kelompok	3	2.60	28.89%	3	2.87	31.89%
2	Tingkat pencapaian tujuan dalam kelompok	3	1.60	17.78%	3	1.30	14.44%
3	Tingkat kepuasan terhadap pencapaian tujuan	3	1.87	20.78%	3	1.63	18.11%
Jumlah		9	6.07	67.44%	9	5.80	64.44%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

3. Fungsi Tugas

Fungsi tugas atau task function adalah seperangkat tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok sesuai dengan fungsi masing-masing sesuai dengan kedudukannya dalam struktur kelompok. Ditinjau dari uraian definisi diatas maka sangat penting kiranya untuk mengetahui fungsi tugas dalam lingkungan Pokmas UPK "Gempar" sebelum peneliti menyimpulkan tingkat efektifitas Pokmas tersebut. Dari data yang ada 20.78% responden pada UPK reguler dan 29.67% responden pada UPK penguatan yang menyatakan bahwa mereka mengetahui bahwa terdapat pembagian tugas dalam lingkungan Pokmas UPK "Gempar". Didapat pula 21.11% jawaban responden pada UPK reguler dan 21.44% jawaban responden pada UPK penguatan yang menyatakan bahwa tugas dan

kewajiban yang dibebankan kepada ketua, pengurus dan anggota telah dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ada. Tetapi, dari persentase skor total senilai 65.56% dan 80.33% pada UPK reguler dan penguatan, maka dapat dikatakan bahwa fungsi tugas di Pokmas ini telah dilaksanakan dengan baik atau dengan kata lain tergolong dalam kategori Sedang.

Tabel 19. Fungsi Tugas Dan Pelaksanaan Tugas di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Fungsi Tugas	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pengetahuan tentang pembagian tugas dalam kelompok	3	1.87	20.78%	3	2.67	29.67%
2	Pengetahuan tentang tugas dan tanggungjawab individu sebagai anggota	3	2.13	23.67%	3	2.63	29.22%
3	Tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan tugas sesuai jabatan	3	1.9	21.11%	3	1.93	21.44%
Jumlah		9	5.90	65.56%	9	7.23	80.33%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

4. Kekompakan Kelompok

Kekompakan kelompok merupakan salah satu faktor penting yang memberikan kenyamanan pada anggota kelompok tersebut, terlalu banyak konflik maupun persaingan anggota yang berlebihan mampu mengikis kekompakan yang lebih terbina antar anggota kelompok. Kelompok yang memiliki tingkat kekompakan tinggi dapat dinilai dari kesamaan tindakan, kerjasama, kesadaran anggota, persamaan nasib, homogenitas perilaku serta adanya kesepakatan tujuan dengan anggota kelompok lainnya. Tingkat kekompakan Pokmas UPK "Gempar" tercermin dari pendapat salah satu responden berikut ini:

“neng kene jarang ono masalah, malah iso diomong ora enek masalah mbak. Ono’o yo masalah cilik-cilik seng nyangkut tunggakan pinjaman, ora enek critane tukaran utowo iren-irenan. Kabeh podho nrimo ing pandhum,ora macem-macem. Seng enom ngejeni seng tuwo, seng tuwo yo nguwongke seng enom. Pokoke kabeh podho usaha piye supoyo sak kelompok iso amreh penak lan ora rugi” (Di sini

jarang ada masalah, bisa dikatakan tidak ada masalah. Adapun masalah kecil-kecil yang menyangkut kemacetan pinjaman, tidak ada ceritanya bertengkar atau iri hati. Semua sama-sama menerima apa adanya, tidak macam-macam.pokoknya semua sama-sama berusaha bagaimana supaya bisa senang dan tidak rugi).

Uraian responden diatas didukung dengan perolehan data yang menunjukkan persentase total tingkat kekompakan kelompok senilai 68.42% dan 65.25% pada UPK reguler dan penguatan yang masuk dalam kategori tingkat kekompakan kelompok tinggi. Persentase tertinggi senilai 20.00% diperoleh dari indikator pernah atau tidaknya timbul permasalahan atau perseteruan antar anggota Pokmas UPK "Gempar". Berikut disajikan tabulasi nilai tingkat kekompakan Pokmas UPK "Gempar":

Tabel 20. Tingkat Kekompakan Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Tingkat Kekompakan	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Kelancaran arus informasi dalam lingkungan kelompok	3	2.07	17.25%	3	2.10	17.50%
2	Timbul konflik / perseteruan antar anggota dalam kelompok	3	2.40	20.00%	3	2.40	20.00%
3	Pengetahuan tentang program kerja kelompok	3	1.77	14.75%	3	1.7	14.17%
4	Pelaksanaan program kerja tahunan	3	1.97	16.42%	3	1.63	13.58%
Jumlah		12	8.21	68.42%	12	7.83	65.25%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

Dari uraian data diatas dapat diketahui bahwa Unit Pengelola Keuangan (UPK) sebagai sumber pembiayaan mikro yang diprakarsai oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur dapat mengatasi masalah keterbatasan modal yang dihadapi oleh penduduk miskin di desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. UPK sebagai Unit Pengelola Keuangan, dirancang sebagai lembaga keuangan mikro yang berperan sebagai sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan mikro, dengan memberikan bantuan permodalan yang mudah, cepat dan bunga pinjaman ringan, sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin. Dengan adanya

kemudahan dalam akses pembiayaan, maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan modal sosial bagi masyarakat miskin dan terwujud masyarakat yang sejahtera. Dalam hal ini dapat ditunjukkan dari kinerja UPK dalam kegiatan mensosialisasikan program yang bertujuan untuk membangun komitmen semua pihak untuk memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pada kegiatan perencanaan UPK menyusun usulan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan program. Perencanaan harus dilakukan secara partisipatif sehingga memungkinkan dapat menyerap kebutuhan dan aspirasi anggota Pokmas UEP. Peran pokok kegiatan pelaksanaan UPK dalam hal ini adalah mengajukan pencairan dana APBD Propinsi untuk kegiatan UPK Program Gerdu-Taskin. Kondisi yang terjadi di Pokmas terdapat beberapa hambatan pada saat pencairan dana dimana masyarakat masih kurang memahami arti penting pinjaman bergulir yang menjadi program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dapat ditunjukkan dengan rendahnya tanggung jawab masing-masing anggota dalam pengajuan pinjaman modal antara lain dapat ditunjukkan dalam tabel 13 tentang pengetahuan tugas dan tanggung jawab individu sebagai anggota yang baru mencapai 23.67% di UPK reguler dan 29.22% di UPK penguatan yaitu dengan masih ada beberapa anggota yang mengatas namakan anggota yang lain dalam pengajuan pinjaman, sehingga secara riil terjadi ketidak seimbangan jumlah pinjaman masing-masing anggota, hal ini juga dapat ditunjukkan dengan tingginya persentase dari tabel 14 di atas tentang timbulnya konflik/perseteruan antar anggota dalam kelompok yang mencapai 20.00%.

Selanjutnya tingkat pengetahuan anggota Pokmas terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro dalam mengatasi keterbatasan modal keuangan yang dihadapi oleh penduduk miskin cukup signifikan, walaupun muncul adanya pandangan bahwa UPK menghadapi persaingan dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank (Pelepas Uang). Peningkatan prestasi UPK ini terjadi karena dana yang diterima dapat mengatasi persoalan kekurangan modal yang dihadapi oleh penduduk miskin.

6.2. Analisis Peran Modal Sosial (Social Capital) terhadap Kinerja UPK dari Tingkat Kolektibilitas Pinjaman

6.2.1. Modal Sosial

Modal sosial (*social capital*) adalah tindakan sosial yang timbul atas dasar rasa saling mempercayai dan solidaritas yang tinggi dalam suatu komunitas untuk kemajuan komunitas tersebut. Modal sosial (*social capital*) adalah potensi yang dimiliki masyarakat yang tidak bernilai pasar atau tidak dapat dinilai dengan uang, misalnya seperti gotong royong, sambat-sinambat, institusi sosial/pranata sosial merupakan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang sangat bermanfaat. Dalam penelitian ini terdapat 3 variabel modal sosial yang menjadi objek penelitian kali ini yaitu (1). Kepercayaan (*trust*) dengan indikatornya yaitu kepercayaan terhadap pemimpin dan kesesuaian pendapat; (2). Jaringan sosial (*net working*) dengan indikatornya yaitu Intensitas pertemuan, dan kemauan bekerjasama; (3). Norma dengan indikatornya yaitu Struktur kewajiban dan sanksi. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan penilaian terhadap masing masing indikator dengan didasarkan pada perolehan data di lapang.

6.2.2. Kepercayaan (Trust)

1) Kepercayaan Terhadap Pemimpin

Kepercayaan terhadap pemimpin adalah keyakinan/dorongan untuk memberi pengakuan dan melaksanakan tanggungjawab atau instruksi yang telah diputuskan oleh ketua atau pengurus Pokmas. Pemimpin memiliki andil yang besar dalam mendorong dan memotivasi anggota. Apa yang dilakukan pemimpin pada umumnya akan menjadi contoh yang ditiru oleh anggotanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa ternyata tingkat kepercayaan responden terhadap pemimpin cenderung menurun dikarenakan adanya masalah penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh beberapa ketua Pokmas yaitu penyelewengan dana pengembalian pinjaman(setoran angsuran) dari anggota untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diserahkan kepada UPK. Hal ini yang menyebabkan adanya usulan pergantian kepengurusan sebagai solusi dari masalah tersebut. Usulan ini telah disepati oleh

kedua belah pihak yakni anggota Pokmas dan Pengurus Pokmas UPK “Gempar” melalui musyawarah desa.

Dari data yang ada di lapang yang terkait dengan kepercayaan anggota Pokmas UPK”Gempar” terhadap pemimpin 2 dari 5 indikator yang ada memiliki nilai rata-rata dan persentase terendah yaitu 2,27 dan 14,90% untuk nilai persentasenya, yaitu penilaian responden terhadap perlakuan ketua dan pengurus kepada anggotanya yang mereka nilai adil serta pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam forum. Hal ini terkait pada perhitungan variabel sebelumnya dimana ketika diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya masih banyak responden yang merasa sedikit tidak percaya diri dan takut apabila apa yang disampaikan tidak dapat diterima kelompoknya. Sedangkan skor tertinggi 2,43 dan persentase 16.20% adalah penilaian terhadap sikap ketua dan pengurus dalam memperlakukan anggota dengan adil. Dari nilai rata-rata 11.47 dan persentase 76.47% dapat disampaikan bahwa tingkat kepercayaan anggota terhadap pemimpin di Pokmas UPK “Gempar” tergolong pada kategori tinggi. Berikut disajikan tabulasi nilai tingkat kepercayaan anggota selaku responden terhadap pemimpin di Pokmas UPK “Gempar”. Berikut ini disajikan tabulasi tingkat kepercayaan terhadap pemimpin di Pokmas UPK “Gempar”.

Tabel 21. Tingkat Kepercayaan Terhadap Pemimpin di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Tingkat Kepercayaan	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Penilaian terhadap sikap ketua dan pengurus Dalam memperlakukan anggota	3	2.43	16.20%	3	2.73	18.20%
2	Penilaian terhadap sikap ketua dan pengurus Dalam memotivasi anggota	3	2.27	15.13%	3	2.4	16.00%
3	Pertisipasi anggota dalam keikutsertaan membuat keputusan kelompok	3	2.3	15.33%	3	2.27	15.13%
4	Pemberian kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam forum	3	2.27	15.13%	3	2.47	16.47%
5	Puas dan tidaknya terhadap kinerja pengurus	3	2.2	14.67%	3	2.07	13.80%
Jumlah		15	11.47	76.47%	15	11.94	79.60%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

2) Kesesuaian Pendapat

Kesesuaian pendapat adalah kesamaan sikap atau pandangan antar anggota Pokmas terhadap permasalahan yang dihadapi, bagaimana anggota sebagai penerima bantuan modal memberikan empati dan menghargai pendapat yang berbeda dalam lingkungan kelompoknya. Dari data yang diperoleh di lapang, dapat diketahui bahwa kesesuaian pendapat antar anggota Pokmas UPK”Gempar” masuk pada kategori tinggi. Hal tersebut sesuai dengan kutipan hasil wawancara responden berikut ini:

“nek enek masalah, yo mesti diomongne utowo dirembug bareng mbak bisane yo pas neng pertemuan opo pas kumpul-kumpul. Nek ancen buntu yo njaluk tulung seng luwih ngerti, biasane neng ketua UPK utuwo pengurus UPK” (Kalau ada masalah, ya harus dibicarakan atau di musyawarahkan bersama biasanya pada saat pertemuan atau saat berkumpul. Kalau memang menemui jalan buntu ya minta tolong pada yang lebih mengerti, biasanya ke ketua UPK atau Pengurus UPK).

Permasalahan pokok dalam program ini adalah adanya anggota Pokmas yang berasumsi bahwa program Gerdu-Taskin sama dengan program lain : KUT, BLT dll. Indikasi adanya provokator untuk mempengaruhi Pokmas berasumsi seperti itu sehingga Pokmas enggan untuk mengembalikan pinjaman dengan alasan bahwa pada program yang lain tidak dikembalikan juga tidak apa-apa atau tidak ada masalah, toh itu juga uang dari rakyat yang memang seharusnya dipergunakan untuk rakyat.

Hasil nilai skoring menunjukkan bahwa skor tertinggi adalah respon anggota terhadap hasil keputusan diskusi dengan nilai rata-rata 2.8 dan persentase 23.33% di UPK program reguler dan nilai rata-rata 2.93 dengan presentase 24.42% di UPK penguatan. Indikator dengan penilaian terendah adalah mengenai pencapaian keputusan dan kepuasan responden terhadap hasil akhir yang disepakati dengan nilai rata-rata yaitu 2.1 atau 17.50% di UPK reguler dan nilai rata-rata 1.83 atau 15.25% di UPK penguatan, hal ini dikarenakan keputusan akhir dianggap kurang memberikan solusi permasalahan secara jelas dan konkrit bagi para anggota. Tatapi dari total skor data dapat disimpulkan

bahwa kesesuaian pendapat di lingkungan Pokmas UPK "Gempar" tergolong pada kategori tinggi.

Tabel 22. Kesesuaian Pendapat Anggota Kelompok di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Kesesuaian Pendapat	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Diskusi dalam mencari solusi permasalahan anggota Pokmas	3	2.20	18.33%	3	2.10	17.50%
2	Pencapaian keputusan dalam diskusi	3	2.1	17.50%	3	1.83	15.25%
3	Respon anggota terhadap hasil keputusan diskusi	3	2.8	23.33%	3	2.93	24.42%
4	Kepuasan terhadap keputusan akhir yang disepakati	3	2.37	19.75%	3	2.1	17.50%
Jumlah		12	9.47	78.92%	12	8.96	74.67%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

6.2.3. Jaringan Sosial (Net Working)

Jaringan kerja merupakan ikatan antar simpul orang atau anggota yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial) yang diikat dengan kepercayaan dan dipertahankan dengan norma yang mengikat kedua belah pihak.

1) Intensitas Pertemuan

Intensitas pertemuan rutin yang dilakukan oleh Pokmas dilakukan hanya pada awal pembentukan Pokmas atau lebih tepatnya pada saat sosialisasi program Gerdu-Taskin. Pertemuan dilakukan dengan frekwensi 1 bulan sekali yaitu musyawarah desa penentuan Pokmas penerima dana pinjaman dari UPK, musyawarah desa penetapan pengurus UPK "Gempar", musyawarah perencanaan UPK.

Nilai skoring tertinggi dengan skor yang sama pada UPK reguler dengan nilai rata-rata 2.23 dan persentase 14.87% adalah alasan kehadiran dalam pertemuan rutin kelompok serta manfaat menghadiri pertemuan rutin kelompok yang diadakan oleh Pokmas UPK "Gempar". Sedangkan skor tertinggi pada

UPK penguatan dengan nilai rata-rata 2.53 dan persentase 16.87% adalah perolehan manfaat dari menghadiri pertemuan rutin kelompok.

Skor terendah pada UPK reguler dengan nilai rata-rata 1.63 dan persentase 10.87% adalah pengetahuan tentang pertemuan rutin kelompok. Sedangkan skor terendah pada UPK penguatan dengan nilai rata-rata 1.7 dan persentase 11.33% adalah frekwensi pelaksanaan pertemuan rutin kelompok. Umumnya seluruh anggota Pokmas mengetahui tentang waktu dan tempat pertemuan rutin, hanya adakalanya mereka tidak dapat hadir dikarenakan jarak rumah yang jauh ataupun kondisi cuaca yang tidak baik. Sedangkan pada pelaksanaan program Gerdu-Taskin forum pertemuan antar anggota Pokmas UPK “Gempar” jarang dilakukan karena beberapa alasan, antara lain karena banyaknya anggota Pokmas yang melakukan tunggakan pengembalian pinjaman sehingga mereka malas menghadiri pertemuan dengan alasan takut diminta untuk segera mengembalikan dana pinjaman. Namun pertemuan tetap dilaksanakan walau hanya dihadiri beberapa anggota Pokmas yang tidak mempunyai masalah dalam pengembalian dana pinjaman. Hal ini dapat menjadi masalah karena ditakutkan dengan intensitas pelaksanaan pertemuan yang jarang maka ditakutkan dapat menjadi penyebab timbulnya perasaan tidak senasib dan sepenanggungan ataupun ketidak kompakkan antar anggota Pokmas. Dari hasil perhitungan intensitas pertemuan antar anggota Pokmas UPK “Gempar” maka dapat disimpulkan bahwa intensitas pertemuan di Pokmas UPK “Gempar” ini tergolong sedang.

Tabel 23. Intensitas Pertemuan Anggota Kelompok di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Intensitas Pertemuan	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pengetahuan tentang pertemuan rutin Kelompok	3	1.63	10.87%	3	1.73	11.53%
2	Frekwensi pelaksanaan pertemuan rutin kelompok	3	1.93	12.87%	3	1.7	11.33%
3	Jumlah kehadiran dalam pertemuan rutin kelompok	3	1.97	13.13%	3	1.93	12.87%
4	Alasan kehadiran dalam pertemuan rutin kelompok	3	2.23	14.87%	3	2.1	14.00%
5	Perolehan manfaat dari menghadiri pertemuan rutin kelompok	3	2.23	14.87%	3	2.53	16.87%
Jumlah		15	9.99	66.60%	15	9.99	66.60%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

2) Kemauan Bekerjasama

Dalam penyelesaian masalah di lingkungan Pokmas UPK "Gempar", responden lebih sering meminta bantuan atau pertimbangan dalam penyelesaian masalah usahanya dengan membicarakan bersama sesama anggota atau membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarganya. Hal ini dapat menjadi masalah bila nantinya pendapat dari keluarga lebih diutamakan dan mengabaikan keputusan atau solusi dalam pertemuan kelompok. Sebatas hanya meminta pertimbangan pada keluarga dan sekiranya pertimbangan keluarga dapat disampaikan sebagai salah satu solusi dalam pertemuan kelompok serta tetap menjunjung dan melaksanakan keputusan bersama, hal ini dirasa bukan suatu penghambat dalam berkembangnya modal sosial di lingkungan kelompok.

Skor dengan nilai rata-rata sama pada UPK program reguler yaitu 2.17 dan persentase 8.04% adalah pihak yang dimintai bantuan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi, dan keterlibatan dalam membantu masalah usaha dalam kelompok serta kepuasan terhadap respon dalam menyikapi masalah anggota kelompok. Secara umum, kemauan bekerjasama antar anggota Pokmas program reguler tergolong pada kategori tinggi dengan total persentase 72.11%.

Skor dengan nilai rata-rata sama pada UPK penguatan yaitu 1.73 dan persentase 6.41% adalah pengetahuan tentang bimbingan teknis dari UPK dan inisiatif mengadakan diskusi di luar pertemuan rutin kelompok. Secara umum,

kemauan bekerja sama antar anggota Pokmas pada program penguatan tergolong pada kategori sedang dengan total persentase 66.48%.

Berikut ini disajikan data tabulasi nilai rata-rata dan persentase pada indikator kemauan bekerjasama antar anggota kelompok di Pokmas UPK "Gempar" baik pada program reguler maupun pada program penguatan.

Tabel 24. Kemauan Bekerjasama Antar Anggota Kelompok di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Kemauan Bekerjasama	UPK Program						
		Reguler			Penguatan			
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	
1	Pengetahuan tentang Unit Pengelola Keuangan "Gempar"	3	2.40	8.89%	3	2.70	10.00%	
2	Salah satu penerima bantuan modal program Gerdu-Taskin	3	2.0	7.41%	3	2.20	8.15%	
3	Penerima bantuan modal dari program lain	3	2.0	7.41%	3	1.63	6.04%	
4	Pengetahuan tentang bimbingan teknis dari UPK	3	2.20	8.15%	3	1.73	6.41%	
5	Pihak yang dimintai bantuan dalam penyelesaian masalah	3	2.17	8.04%	3	2.23	8.26%	
6	Keterlibatan dalam membantu masalah anggota kelompok	3	2.17	8.04%	3	1.83	6.78%	
7	Inisiatif mengadakan diskusi di luar pertemuan rutin kelompok	3	2.18	8.07%	3	1.73	6.41%	
8	Frekwensi penyampaian ide/pendapat untuk menyelesaikan masalah	3	2.18	8.07%	3	1.93	7.15%	
9	Kepuasan terhadap respon lingkungan dalam menyikapi masalah anggota kelompok	3	2.17	8.04%	3	1.97	7.30%	
Jumlah			27	19.47	72.11%	27	17.95	66.48%

Sumber : Analisis Data Primer, 2007

6.2.4. Norma

1. Struktur Kewajiban

Dalam pengukuran variabel ini terdapat 5 indikator yang digunakan untuk mengukur struktur kewajiban dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin.

Dari 5 indikator yang ada, yang memiliki nilai paling tinggi 2.23 dan persentase 14.87% adalah mengenai peningkatan usaha setelah menerima bantuan modal usaha. Skor terendah dengan nilai rata-rata 1.97 dan persentase 13.13% adalah kelancaran pembayaran pengembalian kredit pinjaman. Dari hasil perhitungan struktur kewajiban anggota Pokmas UPK “Gempar” maka dapat disimpulkan bahwa struktur kewajiban di Pokmas UPK “Gempar” ini tergolong tinggi dengan total persentase 70.47%.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pokmas dan Pengurus UPK ada sedikit masalah yaitu pemakaian hak atas nama Pokmas oleh anggota yang lain, sebenarnya ini merupakan kesalahan di awal program, karena peminjam dapat mengambil modal pinjaman yang sudah turun dengan jalan menyerahkan bukti foto copy KTP, kemudian tanda tangan dan nama peminjam tersebut yang sudah terdaftar dalam anggota Pokmas. Ini merupakan permasalahan yang sulit, karena satu sama lain tidak mau disalahkan atas kemacetan pinjaman yang terjadi dan adanya usulan pemberian kartu angsuran per-anggota. Selain itu masalah juga terjadi pada pengurus Pokmas dalam sistem pertanggungjawaban Pokmas / perangsuran atas nama pribadi yang melakukan kecurangan-kecurangan misalnya tidak menyetorkan dana pengembalian pinjaman dari anggota kepada UPK dan digunakan untuk kepentingan pribadinya, namun untuk mencari solusinya diperlukan komunikasi melalui musyawarah kekeluargaan antara pihak-pihak yang terkait dan adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap anggota dan pengurus yang bermasalah.

Tabel 25. Struktur Kewajiban Kelompok di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Struktur Kewajiban	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Jumlah kredit pinjaman sesuai dengan kebutuhan kelompok	3	2.00	13.33%	3	2.10	14.00%
2	Kelancaran pembayaran pengembalian kredit pinjaman	3	1.97	13.13%	3	2.40	16.00%
3	Pelaksanaan hak dan kewajiban antara Pokmas dan UPK sesuai kesepakatan	3	2.2	14.67%	3	2.70	18.00%
4	Peningkatan usaha setelah menerima bantuan modal dari UPK	3	2.23	14.87%	3	2.10	14.00%
5	Peningkatan pendapatan setelah menerima bantuan modal	3	2.17	14.47%	3	2.10	14.00%
Jumlah		15	10.57	70.47%	15	11.40	76.00%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

2. Sanksi

Sanksi merupakan hukuman yang akan diterima oleh kedua belah pihak apabila tidak memenuhi kewajiban atau melanggar kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sanksi diberikan apabila kedua belah pihak tidak dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu.

Dimungkinkannya pemberian sanksi atas pengingkaran kesepakatan dengan Surat Perintah (SP) oleh Kepala Desa. Penerapan sanksi pada pelaksanaan program Gerdu-Taskin adalah salah satu cara penyelesaian masalah kredit macet yang terjadi di UPK "Gempar" yakni pemberian sanksi negatif yang sangat keras. Nilai skoring tertinggi dengan nilai rata-rata 2.33 dan persentase 25.89% adalah pelanggaran ketentuan/aturan yang disepakati anggota dengan UPK, yakni ketentuan tentang tenggang waktu pengembalian kredit pinjaman yang telah disepakati bersama yaitu 10 bulan terhitung mulai bulan Januari 2005 sejak diterimanya pencairan dana pinjaman.

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk menangani masalah kemacetan pengembalian pinjaman adalah dengan memberikan kartu angsuran per anggota, namun ternyata anggota Pokmas masih belum mengerti tentang apa

sebenarnya fungsi dari kartu yang diberikan oleh UPK dalam setiap kali pembayaran dilakukan oleh Pokmas.

Skor terendah dengan nilai rata-rata 2.2 dan persentase 24.44% pada UPK program reguler dan nilai rata-rata 1.9 dengan persentase 21.11% pada UPK program penguatan adalah tentang penerapan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Umumnya seluruh anggota Pokmas mengetahui tentang saksi yang berlaku jika terjadi pelanggaran ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, hanya adakalanya mereka tidak peduli dikarenakan adanya provokasi dari pihak lain yang mempengaruhi agar tidak mengembalikan pinjaman dengan berbagai macam alasan. Maka dapat disimpulkan bahwa Sanksi di Pokmas UPK "Gempar" ini tergolong tinggi dengan persentase total 75.56% di UPK reguler dan 73.33% di UPK penguatan.

Tabel 26. Sanksi Kelompok di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumijaji, Kota Batu, 2007.

No	Sanksi	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Pelanggaran ketentuan/aturan yang disepakati anggota dengan UPK	3	2.33	25.89%	3	2.50	27.78%
2	Adanya sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota	3	2.27	25.22%	3	2.2	24.44%
3	Penerapan sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh anggota	3	2.2	24.44%	3	1.9	21.11%
Jumlah		9	6.80	75.56%	9	6.60	73.33%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran UPK sebagai dasar penguatan modal sosial (social capital) bagi penduduk miskin, yaitu dengan analisis hubungan modal sosial (social capital) dalam pelaksanaan program Gerdu-Taskin antara penduduk miskin dengan UPK, menunjukkan adanya peningkatan modal sosial yang dimiliki penduduk miskin setelah menjadi anggota Pokmas UEP. Modal sosial tersebut meliputi kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Pada penelitian ternyata tingkat kepercayaan responden terhadap pemimpin cenderung menurun dikarenakan adanya masalah

penyalahgunaan kepercayaan yang dilakukan oleh beberapa ketua Pokmas yaitu penyelewengan dana pengembalian pinjaman (setoran angsuran) dari anggota untuk kepentingan pribadi yang seharusnya diserahkan kepada UPK. Hal ini yang menyebabkan adanya usulan pergantian kepengurusan sebagai solusi dari masalah tersebut. Usulan ini telah disepati oleh kedua belah pihak yakni anggota Pokmas dan Pengurus Pokmas UPK “Gempar” melalui musyawarah desa. Jaringan sosial pada penelitian ini termasuk dalam kategori tinggi ini ditunjukkan pada tabel 26 tentang intensitas pertemuan dengan total nilai sama pada UPK program reguler dan penguatan yaitu 66.60% dan pada tabel 27 tentang kemauan bekerja sama dengan total nilai 72.11% pada UPK program reguler dan 66.48% pada UPK program penguatan. Norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan, dalam penelitian norma yang dijalankan meliputi norma keadilan yaitu suatu kesepakatan yang menjamin keuntungan keduabelah pihak secara merata, antara anggota Pokmas dan UPK.

Selanjutnya pembiayaan oleh Program Gerdu-Taskin telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan didalam peningkatan kinerja UPK “Gempar”. Peningkatan kinerja UPK ini terjadi karena UPK mendapatkan program penguatan dengan diterimanya tambahan modal maka dapat mengatasi kekurangan modal. Hal ini sejalan dengan jumlah dana yang disalurkan oleh UPK yang lebih fokus kepada kredit modal kerja yang berarti telah berorientasi kepada kebutuhan usaha mikro.

6.2.5. Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman

1. Tingkat Umur

Umur seseorang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pengembalian pinjaman karena secara teoritis semakin dewasa seseorang maka akan semakin banyak pengalaman dan akan lebih bertanggung jawab. Sehingga dalam hal pengembalian pinjaman anggota yang usianya lebih tua akan lebih bertanggungjawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu. Berikut ini disajikan tabel mengenai karakteristik anggota Pokmas sampel berdasarkan umurnya.

Tabel 27. Tingkat Distribusi Kelompok Umur Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar” Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Kelompok Umur (Tahun)	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
< 20	0	0.00	0	0.00
20 - 25	1	3.00	1	3.00
26 - 30	0	0.00	0	0.00
31 - 35	9	30.00	9	30.00
36 - 40	4	13.00	7	23.00
41 - 45	8	27.00	5	17.00
46 - 50	5	17.00	5	17.00
> 50	3	10.00	3	10.00
Total	30	100.00	30	100

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Responden dalam penelitian ini memiliki tingkat umur yang bervariasi antara 20 hingga lebih dari 50 tahun. Jumlah responden dengan rentang umur antara 41-45 tahun merupakan responden dengan jumlah terbanyak, yaitu sebanyak 8 orang dengan persentase 27,00 %, jumlah responden dengan rentang umur antara 46-50 tahun yaitu berjumlah 5 orang dengan persentase 17,00 % sedang jumlah responden paling sedikit adalah umur 20-30 tahun yaitu berjumlah 1 orang dengan persentase 3,00 % dalam penelitian ini terdapat juga 3 responden yang berusia lebih dari 50 tahun dengan persentase 10,00 %. Dari sebaran tingkat umur yang ada, maka peneliti beranggapan bahwa masing-masing tingkat usia sudah terwakili oleh responden yang ada.

Umur 25-55 tahun, adalah umur tergolong produktif, dimana pada usia produktif seseorang akan mampu memberikan kontribusi cukup baik. Responden dengan usia dan tingkat kedewasaan yang matang akan lebih mudah dalam memahami sosialisai suatu program dari pemerintah. Sehingga kesahfahaman dalam sosialisai program dapat dihindari.

2. Pendapatan Anggota

Besarnya pendapatan diduga berperan dalam pengembalian pinjaman, karena jika pendapatan rendah sedangkan kebutuhan untuk konsumsi belum terpenuhi maka

prioritas pemenuhan kebutuhan adalah untuk konsumsi dan menunda untuk membayar pinjaman. Sehingga semakin tinggi tingkat pendapatan maka kolektibilitas pinjaman juga akan semakin lancar. Berikut disajikan data karakteristik mengenai tingkat pendapatan anggota.

Tabel 28. Jumlah Anggota Menurut Tingkat Pendapatan

Pendapatan	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
<400.000	3	10.00	0	0.00
400.000 - 600.000	21	70.00	18	60.00
>600.000	6	20.00	12	40.00
Total	30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel diatas, diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan pada tingkat pendapatan di UPK reguler paling dominan adalah responden dengan pendapatan perbulannya antara Rp. 400.000,00 – Rp. 600.000,00 sebanyak 21 orang atau sebesar 70%. Sedangkan responden dengan pendapatan per bulannya di atas Rp. 600.000,00 yaitu sebanyak 6 orang atau sebesar 20% dan responden dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 400.000,00 hanya 3 orang atau sebesar 10%. Di UPK penguatan, yang paling dominan adalah responden dengan tingkat pendapatan antara Rp. 400.000,00 – Rp. 600.000,00 yaitu sebanyak 18 orang atau sebesar 60%. Berikutnya responden dengan tingkat pendapatan kurang dari Rp. 400.000,00 adalah tidak ada atau 0% dan responden dengan pendapatan lebih dari Rp. 600.000,00 sebanyak 12 orang atau 20%.

Pendapatan rumah tangga responden rata-rata kecil karena sumber pendaptan peminjam dari usaha mikro dan kecil. Usaha yang dilakukan responden kebanyakan adalah sebagai pedagang pracangan, pedagang mlijo, tukang ojek dan petani.

3. Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga adalah semua anggota keluarga yang menjadi tanggungan rumah tangga anggota Pokmas. Terkadang anggota keluarga dari rumah

tangga miskin tidak hanya terdiri dari keluarga inti saja yaitu istri dan anak-anaknya tetapi terdapat pula ayah dan ibu ataupun saudara-saudaranya. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin tinggi pula biaya hidup yang harus ditanggung oleh rumah tangga anggota Pokmas. Penyajian Distribusi jumlah anggota keluarga dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Tingkat Distribusi Jumlah Anggota Keluarga Responden UPK “Gempar” Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Jumlah Anggota Keluarga	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
< 3	2	6.50	0	0.00
3 - 5	26	87.00	26	87.00
> 5	2	6.50	4	13.00
Total	30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Berdasarkan tabel 29 di atas dapat dilihat bahwa anggota Pokmas UPK reguler maupun penguatan yang terbanyak adalah anggota yang mempunyai jumlah anggota keluarga antara 3 – 5 orang yaitu masing 26 orang atau 87.00 %. Anggota Pokmas yang jumlah anggotanya kurang dari 3 orang, sebanyak 2 atau 6.50 %. Sedangkan anggota yang memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 5 orang di UPK reguler sebanyak 2 orang atau 6.50 % dan di UPK penguatan sebanyak 4 orang atau 13.00 %. Secara umum, anggota Pokmas tidak mempunyai anggota keluarga yang terlalu banyak karena anggota Pokmas karena anggota yang mempunyai anggota keluarga lebih dari 5 orang hanya 4 anggota. Rata-rata keluarga anggota Pokmas hanya mempunyai 2 orang anak saja.

4. Jenis Usaha

Dilihat dari jenis usaha atau pekerjaan dari responden semua mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani yaitu pada UPK reguler berjumlah 47,00% responden dan UPK penguatan berjumlah 63.33% dan yang mempunyai pekerjaan tambahan sebanyak 53,00% responden pada UPK reguler dan 36.67% responden pada UPK penguatan. Pekerjaan tambahan responden antara lain berdagang yaitu meliputi pedagang sayur sebanyak 7,00% responden pada UPK reguler dan 6.67%

responden pada UPK penguatan, pedagang pakaian sebanyak 3,00% responden untuk UPK reguler dan 6.67% responden pada UPK penguatan, PKL sebanyak 17,00% responden di UPK reguler dan 6.67% di UPK penguatan, Pekerjaan tambahan lainnya selain berdagang antara lain usaha dibidang jasa seperti penjahit, tukang ojek dan lain sebagainya sebanyak 7,00 % responden di UPK reguler dan 16.67% di UPK penguatan. Penyajian Distribusi mata pencaharian responden dalam bentuk tabulasi dapat dilihat pada tabel 30 di bawah ini:

Tabel 30. Jenis Usaha Anggota Pokmas UPK "Gempar Program Reguler dan Penguatan UPK Program

Jenis Usaha	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Petani	14	47.00	19	63.33
Pedagang Sayur	2	7.00	2	6.67
Pedagang Pakaian	1	3.00	2	6.67
Pedagang Pracangan/PKL	10	17.00	2	6.67
Usaha Jasa	3	7.00	5	16.67
Total	30	81.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

5. Kolektibilitas Pinjaman Anggota

Keberlanjutan UPK sangat tergantung pada tingkat kolektibilitas pinjaman. Jika UPK mempunyai tingkat kolektibilitas tinggi maka perputaran modal akan cepat sedangkan jika kolektibilitas pinjaman rendah maka modal yang dimiliki UPK tidak akan berkembang cepat, karena UPK tidak dapat menyalurkan dana kepada masyarakat yang lainnya. Ukuran kolektibilitas adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan jasa oleh peminjam. Berikut disajikan tabel tingkat kolektibilitas pinjaman responden:

Tabel 31. Jumlah Responden berdasarkan Tingkat Kolektibilitas Pinjaman di UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Kolektibilitas Pinjaman	UPK Reguler		UPK Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Tinggi	4	13.33%	15.00	50.00%
Rendah	26	86.67%	15.00	50.00%
Total	30	100.00%	30.00	100.00%

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel 31 di atas dapat diketahui bahwa kolektibilitas pinjaman responden rendah. Di UPK reguler maupun di UPK penguatan responden yang memiliki tingkat kolektibilitas rendah paling besar yaitu masing-masing 26 orang atau 86.67% dan 15 orang atau 50.00%. sedangkan responden yang memiliki tingkat kolektibilitas tinggi di UPK reguler sebanyak 4 orang atau 13.33% dan di UPK penguatan sebanyak 15 orang atau 50.00%.

6. Besar Pinjaman

Besar pinjaman yang diberikan UPK kepada rumah tangga miskin baik UPK reguler maupun UPK penguatan tidak terlalu besar dan pemberian pinjaman kepada masing-masing anggota disama ratakan yaitu sebesar Rp. 500.000,00. karena sasaran dari pemberian pinjaman tersebut adalah untuk mengembangkan usaha mikro serta pemberian pinjaman disama ratakan untuk menghindari asumsi ketidakadilan dalam pembagian dana pinjaman. Berikut ini disajikan tabel jumlah responden berdasarkan besarnya pinjaman yang diberikan oleh UPK reguler dan penguatan:

Tabel 32. Jumlah responden menurut besarnya pinjaman yang diberikan oleh UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Besar Pinjaman	UPK Reguler		UPK Penguatan	
	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Rp 500,000.00	30	100.00%	30	100.00%
Total	30	100.00%	30	100.00%

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa di UPK reguler maupun di UPK penguatan sama yaitu masing masing sebesar Rp. 500.000,00 pada 30 orang atau 100% responden.

7. Alokasi Penggunaan Pinjaman

Pinjaman dari UPK yang diberikan kepada rumah tangga miskin diharapkan dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki rumah tangga miskin sehingga kemiskinan dapat dikurangi. Dengan pinjaman yang diberikan, rumahtangga miskin dapat mempergunakan pinjaman sebagai modal untuk usaha. Tetapi kenyataannya tidak semua pinjaman digunakan sebagai modal melainkan digunakan untuk kabutuhan konsumsi atau untuk melunasi hutang pada pelepas uang/renternir dan kebutuhan lainnya. Berikut ini disajikan tabel alokasi penggunaan pinjaman di UPK reguler dan penguatan:

Tabel 33. Alokasi Penggunaan Dana di UPK “Gempar” di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No.	Alokasi Penggunaan Dana	UPK Reguler		UPK Penguatan	
		Jumlah	Persentase (%)	Jumlah	Persentase (%)
1	Usaha	19	63.00	24	80.00
2	Konsumsi	11	37.00	6	20.00
Total		30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel 33 di atas dapat diketahui bahwa alokasi penggunaan pinjaman terbanyak adalah untuk usaha. Dari 30 responden di UPK reguler, responden yang menggunakan pinjaman untuk modal usaha sebanyak 19 atau 63.00% dan untuk kebutuhan konsumsi sebanyak 11 atau 37.00%. Sedangkan di UPK penguatan, dari 30 responden yang menjadi responden 24 orang atau sebesar 80.00% pinjaman dari UPK digunakan untuk usaha. Sedangkan 6 orang atau sebesar 20.00% pinjaman digunakan untuk kebutuhan konsumsi.

6.2.6. Hasil Analisis Peran Modal Sosial terhadap Kinerja UPK di lihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

Menghubungkan antara modal sosial (*social capital*) dengan kinerja UPK dilihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman berarti juga menghubungkan antara sebuah fenomena sosial yang menjadi potensi dalam masyarakat dengan keterikatan seseorang dalam suatu proses kegiatan secara sukarela dan atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Menjadi sebuah pertanyaan penting dan menarik adalah apakah modal sosial betul-betul memiliki peran dalam peningkatan kinerja UPK yang ada dilingkungan kelompok masyarakat dalam program Gerdu-Taskin.

Untuk mengetahui hubungan antara modal sosial (*social capital*) sebagai variabel bebas dengan kinerja UPK dilihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dan pada program Gerdu-Taskin digunakan cara analisis regresi.

6.2.6.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Semua instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan atau dengan kata lain mampu memperoleh data yang tepat dari variabel yang diteliti. Validitas dilihat dari korelasi pearson (*korelasi product moment*) antara item-item pertanyaan dengan jumlah pertanyaan secara keseluruhan. Dengan jumlah responden sebesar 30 responden maka suatu alat instrumen (quesioner) dikatakan valid jika nilai korelasi Pearson > 0.3 .

1. Uji Validitas

Uji validitas menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Valid tidaknya suatu indikator dapat diketahui dengan membandingkan indeks korelasi product moment Pearson dengan level signifikansi 5%, dengan nilai kritisnya, dimana r dapat digunakan rumus.

Apabila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%), maka dinyatakan valid dan sebaliknya lebih besar dari 0,05 dinyatakan tidak valid, seperti pada tabel 34 di bawah ini.

Tabel 34. Uji Validitas pada setiap Indikator

Variabel	UPK Program Reguler			UPK Program Penguatan		
	Indikator	Nilai Korelasi	Keterangan	Indikator	Nilai Korelasi	Keterangan
X1	X1.1	0.734	Valid	X1.1	0.528	Valid
	X1.2	0.688	Valid	X1.2	0.528	Valid
	X1.3	0.642	Valid	X1.3	0.581	Valid
	X1.4	0.596	Valid	X1.4	0.635	Valid
	X1.5	0.759	Valid	X1.5	0.697	Valid
	X1.6	0.669	Valid	X1.6	0.693	Valid
	X1.7	0.847	Valid	X1.7	0.821	Valid
	X1.8	0.677	Valid	X1.8	0.511	Valid
	X1.9	0.633	Valid	X1.9	0.547	Valid
X2	X2.1	0.471	Valid	X2.1	0.393	Valid
	X2.2	0.602	Valid	X2.2	0.485	Valid
	X2.3	0.442	Valid	X2.3	0.387	Valid
	X2.4	0.537	Valid	X2.4	0.505	Valid
	X2.5	0.573	Valid	X2.5	0.474	Valid
	X2.6	0.471	Valid	X2.6	0.55	Valid
	X2.7	0.435	Valid	X2.7	0.362	Valid
	X2.8	0.429	Valid	X2.8	0.365	Valid
	X2.9	0.528	Valid	X2.9	0.38	Valid
	X2.10	0.535	Valid	X2.10	0.391	Valid
	X2.11	0.511	Valid	X2.11	0.433	Valid
	X2.12	0.568	Valid	X2.12	0.546	Valid
	X2.13	0.486	Valid	X2.13	0.478	Valid
	X2.14	0.498	Valid	X2.14	0.481	Valid
X3	X3.1	0.426	Valid	X3.1	0.665	Valid
	X3.2	0.637	Valid	X3.2	0.596	Valid
	X3.3	0.719	Valid	X3.3	0.44	Valid
	X3.4	0.756	Valid	X3.4	0.692	Valid
	X3.5	0.628	Valid	X3.5	0.744	Valid
	X3.6	0.674	Valid	X3.6	0.758	Valid
	X3.7	0.713	Valid	X3.7	0.533	Valid
	X3.8	0.411	Valid	X3.8	0.375	Valid

Sumber diolah dari data primer, 2007

Tabel 35. Hasil Uji Validitas

No	Variabel	UPK Program Reguler		UPK Program Penguatan	
		Nilai Korelasi	Keterangan	Nilai Korelasi	Keterangan
1	Kepercayaan	0.734	Valid	0.528	Valid
2	Jaringan Sosial	0.471	Valid	0.393	Valid
3	Norma	0.426	Valid	0.665	Valid

Ket * > 0.3 = valid

Sumber: Diolah dari data primer, 2007

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ketiga Instrumen yang terdapat di dalam kuisisioner adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai korelasi dari masing-masing variabel terhadap modal sosial adalah lebih dari 0,3 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan untuk mengukur peran keuangan mikro dalam peningkatan pendapatan dan modal sosial adalah telah dapat mewakili dari semua variabel yang ingin diukur atau sudah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas suatu data disini adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Untuk menguji reliabilitas digunakan rumus Alpha

Sesuai dengan uji validitas, instrumen dapat dikatakan reliabel apabila mempunyai nilai hitung alpha (alpha chronbach) lebih besar dari 0,6. Apabila alpha lebih kecil dari 0,6, maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel bila alpha lebih besar dari 0,6 adapun hasil analisis reliabilitas dari instrumen ini adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Hasil Uji Reabilitas

No	Variabel	UPK Program Reguler		UPK Program Penguatan	
		Nilai Korelasi	Keterangan	Nilai Korelasi	Keterangan
1	Kepercayaan	0.8612	Reliabel	0.7983	Reliabel
2	Jaringan Sosial	0.7688	Reliabel	0.6732	Reliabel
3	Norma	0.7657	Reliabel	0.7473	Reliabel

Ket * > 0.6= valid

Sumber: Diolah dari Data Primer, 2007

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa besarnya nilai alpha dari semua variabel adalah lebih besar dari 0,6 sehingga semua variabel dinyatakan sudah

reliabel. Jadi apabila kuisioner tersebut dicobakan berulang-ulang pada subyek yang sama akan memberikan hasil yang konsisten. Data yang reliabel tersebut akan menghasilkan data yang benar, tidak menyimpang atau tidak berbeda dari kenyataannya.

6.2.6.2. Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y). Setelah persamaan regresi diketahui yaitu:

$$Y_{Reg} = a + b_{Kepercayaan} X_{Kepercayaan} + b_{JaringanSosial} X_{JaringanSosial} + b_{Norma} X_{Norma}$$

$$Y_{Penguatan} = a + b_{Kepercayaan} X_{Kepercayaan} + b_{JaringanSosial} X_{JaringanSosial} + b_{Norma} X_{Norma}$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman) pada program reguler

$Y_{Penguatan}$ = Variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman) pada program Penguatan

a = Nilai Intercep (konstan) atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel

X = Variabel bebas (Modal Sosial)

a. Hipotesis :

Ho : tidak terdapat peranan modal sosial terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

Ha : terdapat peranan modal sosial terhadap kinerja UPK dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman.

b. Kriteria Pengujian Hipotesis :

Ho diterima bila jumlah q hitung lebih kecil dari q tabel.

Analisis korelasi menggambarkan hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y), nilai korelasi yang dinyatakan dengan R dari analisis data diketahui nilainya sebesar 0,826 pada UPK reguler dan 0,909 pada UPK penguatan yang berarti hubungan antara semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas sangat erat/sangat kuat.

Untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh dari variabel bebas modal sosial (X) terhadap variabel tak bebas Tingkat Kolektibilitas (Y), maka akan digunakan analisis korelasi dan regresi.

Tabel 37. Hasil Perhitungan Korelasi Dan Regresi

Variabel	UPK Program									
	Regular					Penguatan				
	B	Beta	t	Sig.t	Keterangan	B	Beta	t	Sig.t	Keterangan
Kepercayaan	-1644.158	-0.060	-480	0.635	Signifikan	1352.555	0.047	0.517	0.610	Signifikan
Jaringan Sosial	4470.592	0.163	1.229	0.230	Signifikan	-721.924	-0.047	-0.262	0.795	Signifikan
Norma	29611.178	0.762	6.125	0.000	Signifikan	32200.680	0.906	9.269	0.000	Signifikan
Konstanta	-311216		-2.135	0.042	Signifikan	-447497		-3.095	0.005	Signifikan
t tabel	= 2.056					= 2.056				
Multiple R	= 0.826					= 0.909				
R Square	= 0.682					= 0.827				
Adjusted R Square	= 0.645					= 0.807				
F hitung	= 18.579					= 41.324				
Sig. F	= 0.000					= 0.000				
F tabel	= 2.98					= 2.98				

Sumber: Data primer diolah, 2007

Dengan memasukkan angka konstanta dan koefisien regresi pada variabel analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka persamaan sebagai berikut:

$$Y_{Reg} = -311216 - 1644.158X_1 + 4470.592X_2 + 29611.178X_3$$

$$Y_{Pnguat} = -447497 + 1352.555X_1 - 721.924X_2 + 32200.680X_3$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Tingkat Kolektibilitas Program Regular

Y_{Pnguat} = Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan

a = Intercept atau titik potong

b_1, b_2, b_3 = Koefisien regresi

X_1 = Variabel kepercayaan

X_2 = Variabel Jaringan Sosial

X_3 = Variabel Norma

Berdasarkan tanda dan nilai koefisien regresi dari persamaan diatas, dapat diketahui sifat hubungan variabel bebas (modal sosial) X_1, X_2, X_3 , terhadap variabel tak bebas (tingkat kolektibilitas) Y, yaitu:

1. Jika $\beta_1 = -1644.158$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_1 (Kepercayaan) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Kolektibilitas Program Reguler) akan terjadi penurunan dalam Y_{Reg} sebesar -1644.158 satuan bila X_1 turun sebesar 1 % dengan anggapan X_2, X_3 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_1 = -1644.158$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_1 (Kepercayaan) terhadap variabel Y_{Pnguat} (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Pnguat} sebesar 1352.555 satuan bila X_1 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_2, X_3 tetap dan konstan.
2. Jika $\beta_2 = 4470.592$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_2 (Jaringan Sosial) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Kolektibilitas Program Reguler) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Reg} sebesar 4470.592 satuan bila X_2 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_3 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_2 = -721.924$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_2 (Jaringan Sosial) terhadap variabel Y_{Pnguat} (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi penurunan dalam Y_{Pnguat} sebesar -721.924 satuan bila X_2 turun sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_3 tetap dan konstan.
3. Jika $\beta_3 = 29611.178$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_3 (Norma) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Kolektibilitas Program Reguler) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Reg} sebesar 29611.178 satuan bila X_3 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_2 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_3 = 32200.680$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_3 (Norma) terhadap variabel Y_{Pnguat} (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Pnguat} sebesar 32200.680 satuan bila X_3 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_2 tetap dan konstan. Dan semakin besar nilai konstanta yaitu mendekati angka 0, maka akan semakin tinggi kontribusi variabel X.

Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) memiliki nilai positif (berbanding lurus). Hal ini dapat diartikan bahwa jika nilai dari ketiga variabel bebas tersebut semakin besar, maka nilai variabel tak bebas akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya. Ini berarti indikasi terhadap tingkat kolektibilitas

(Y) dengan modal sosial (X_1, X_2, X_3). Dari perhitungan dengan skala Likert masing masing variabel modal sosial sebagai berikut: Kepercayaan dengan indikator kepercayaan terhadap pemimpin dengan nilai 76.47% di UPK reguler dan 79.60% di UPK penguatan ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kepercayaan maka akan mempengaruhi tingkat pendapatan begitu pula dengan indikator kesesuaian pendapat dengan nilai 78.92% untuk UPK reguler dan 74.67% untuk UPK penguatan; Jaringan Sosial dengan indikator intersitas pertemuan pada UPK reguler dan Penguatan memiliki nilai sama yaitu 66.60% dan untuk indikator kemauan bekerjasama dengan nilai 72.11% di UPK reguler dan 66.48% di UPK penguatan dan Norma dengan indikator struktur kewajiban di UPK reguler dan penguatan masing-masing dengan nilai 70.47% dan 76.00% dan untuk indikator sanksi pada UPK reguler dan penguatan masing-masing dengan nilai 75.56% dan 73.33% ini menunjukkan semakin tinggi nilai dari perhitungan dengan menggunakan skala Likert maka akan semakin mempengaruhi tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dari perhitungan tingkat kolektibilitas dengan menggunakan sistem korelasi dan regresi.

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh koefisien determinasi (R^2) pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing sebesar 0.682 dan 0.827 atau dapat dikatakan bahwa 68.2% dan 82.7% perubahan variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) disebabkan oleh perubahan variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial) secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar 31.8% dan 17.3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi tersebut.

Sedangkan koefisien korelasi yang diperoleh pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing adalah sebesar 0.826 dan 0.909, atau dapat diartikan bahwa variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial) secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) sebesar 82.60% dan 90.90% yang menunjukkan kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas X_1, X_2, X_3 terhadap variabel tak bebas Y.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial) memberikan kontribusi yang besar terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas).

6.2.6.3. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis-hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan uji t dan secara bersama-sama menggunakan uji F, seperti diuraikan dibawah ini:

1. Uji Serempak (F-Test)

A. Uji Serempak (F-Test) pada UPK Program Reguler

Diduga Tingkat kolektibilitas dipengaruhi oleh Modal Sosial yang meliputi Kepercayaan, Jaringan Sosial, dan Norma.

Untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif atau tidak terhadap variabel tergantung, dapat diketahui dengan menggunakan alat uji F, yaitu dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , namun terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap H_0 , dimana:

$$2). H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas).

$$3). H_1 : \text{mungkin ada } \beta_1 \neq 0$$

Artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas).

Dengan menggunakan $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0.05 maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.98. sedangkan hasil F_{hitung} sebesar 18.579 berhubung F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas) mempunyai pengaruh yang positif.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dengan terpenuhinya syarat-syarat pengujian yang diajukan. Dengan demikian terhadap masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas X (Modal Sosial) yang terdiri dari: Kepercayaan, Jaringan Sosial, dan Norma secara partial ataupun bersama-sama mempunyai hubungan dan pengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) pada program Gerdu-Taskin.

B. Uji Serempak (F-Test) pada UPK Program Penguatan

Diduga Pendapatan dipengaruhi oleh Modal Sosial yang meliputi Kepercayaan, Jaringan Sosial, dan Norma.

Untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif atau tidak terhadap variabel tergantung, dapat diketahui dengan menggunakan alat uji F, yaitu dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , namun terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap H_0 , dimana:

$$4). H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas).

$$5). H_1 : \text{mungkin ada } \beta_1 \neq 0$$

Artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas).

Dengan menggunakan $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0.05 maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.98. sedangkan hasil F_{hitung} sebesar 41.342 berhubung F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas (Tingkat Kolektibilitas) mempunyai pengaruh yang positif.

2. Uji t-Student (t-Test)

Uji t-Student bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas (Modal Sosial) secara parsial (X_1, X_2, X_3) mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas Atingkat Kolektibilitas (Y). Dari hasil perhitungan yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$ pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$ untuk tes 2 ujung menunjukkan nilai 1.706. kemudian apabila $t_{hitung} > t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, kesimpulan H_0 ditolak. Sedangkan dari hasil perhitungan Uji t untuk masing-masing variabel bebas pada program reguler dan penguatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38. Hasil Uji t-Test

No	Variabel	UPK Program Reguler			UPK Program Penguatan		
		Nilai t-hit	Nilai t-tab	Keterangan	Nilai t-hit	Nilai t-tab	Keterangan
1	Kepercayaan (X1)	-0.480	1.706	≠ Signifikan	0.517	1.706	≠ Signifikan
2	Jaringan Sosial (X2)	1.229	1.706	≠ Signifikan	-0.026	1.706	≠ Signifikan
3	Norma (X3)	6.125	1.706	Signifikan	9.269	1.706	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2007

Dari tabel diatas diketahui bahwa guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_1 (Kepercayaan) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df=26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel $(t_{\alpha}, n-1)$ sebesar 1.706, sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar -0.480 pada program reguler dan 0.517 pada program penguatan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, maka X_1 secara parsial memberikan pengaruh yang negatif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam peningkatan rasa kepercayaan dapat berakibat pada peningkatan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman RTM tersebut.

Guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_2 (Jaringan Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel $(t_{\alpha}, n-1)$ sebesar 1.706. sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar 1.229 pada program reguler dan -0.026 pada program penguatan karena nilai t_{hitung} lebih kecil dari $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, maka X_2 secara parsial memberikan pengaruh yang negatif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam jaringan sosial akan berakibat meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman RTM tersebut.

Guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_3 (Norma) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel $(t_{\alpha}, n-1)$ sebesar 1.706. sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar 6.125 pada program reguler dan 9.269 pada program penguatan karena nilai t_{hitung} lebih

besar dari $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, maka X_3 secara parsial memberikan pengaruh yang positif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam peningkatan norma akan berakibat meningkatkan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman RTM tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dengan terpenuhinya syarat-syarat pengujian yang diajukan. Dengan demikian terhadap masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas X (Modal Sosial) yang terdiri dari: Kepercayaan, Jaringan Sosial, dan Norma secara partial ataupun bersama-sama mempunyai hubungan dan pengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Kolektibilitas) pada program Gerdu-Taskin.

Secara rinci dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan mikro yang dilihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman (variabel Y) pada UPK program reguler dan penguatan dipengaruhi sebesar 68.2% dan 82.7% oleh variabel bebas (X_1, X_2, X_3), sedangkan sisanya 31.8% dan 17.3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 3 variabel yang diteliti. Yang berarti setiap 100 % perubahan pada variabel bebas, akan diikuti oleh perubahan tingkat kolektibilitas pada masing-masing program sebesar 68.2 % dan 82.7%.
2. Koefisien korelasi atau Multiple R yang diperoleh pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing sebesar 0.826 dan 0.909 menyatakan bahwa kondisi hubungan antara modal sosial terhadap tingkat kolektibilitas secara bersama-sama sebesar 82.60% dan 90.90% yang menunjukkan kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas (modal sosial) terhadap variabel tak bebas (tingkat kolektibilitas).
3. Kepercayaan (X_1), secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kolektibilitas dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar -0.480 di UPK reguler ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 0.517, variabel Jaringan Sosial (X_2) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 1.229 di UPK reguler ini menunjukkan lebih tinggi dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar -0.262 sedangkan untuk variabel Norma (X_3) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 6.125 di UPK reguler dan 9.269 di UPK penguatan. Keberlangsungan

program Gerdu-Taskin merupakan tolak ukur paling utama. Keberlangsungan itu terjadi karena menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam seluruh kegiatan tersebut. Keberhasilan program Gerdu-Taskin dalam kegiatan “perbankan” (microfinance) yang diselenggarakan oleh UPK yang dapat menampung kebutuhan akan modal bagi kegiatan lanjutan yang dilakukan oleh para anggota yang membutuhkan, dalam hal ini pengembangan modal sosial tidak dapat terjadi tanpa modal manusia, modal fisik dan modal finansial. Kepercayaan yang berkembang antara pengurus UPK dan para anggota menjadi kekuatan utama untuk mengembangkan microfinance itu sendiri disatu pihak, dan pengembangan usaha para anggota dilain pihak .Ini dapat menjelaskan bahwa kepercayaan dan jaringan sosial menjadi kebutuhan utama dari kebutuhan lain, kepercayaan masyarakat yang tinggi akan menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat kerjasama, bila mereka ada kesempatan untuk ikut dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungannya secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam segala aktifitas, apalagi yang menyangkut diri anggota itu sendiri. Misalnya dengan dimintai pendapatnya, diakui aksistensi keberadaannya yang juga sangat penting, diorangkan karena mereka adalah bagian dari anggota Pokmas UPK tersebut. Memang sulit untuk menciptakan kepercayaan dalam mewujudkan jaringan-jaringan kerjasama, namun dari hasil yang ada ternyata mempunyai pengaruh secara signifikan bila dibandingkan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal ini disebabkan bahwa secara struktural jarak antara pimpinan puncak dengan anggota yang mempunyai rentang kendali yang cukup jauh, dengan cara pendekatan komunikasi yang baik dengan meng-orangkan orang atau “nguwongke uwong” oleh pimpinan, dapat mengangkat harga diri/martabat untuk termotivasi dalam berusaha. Sehingga kebijakan pimpinan dalam hal ini harus lebih peka terhadap lingkungan anggotanya, karena mereka ingin di hargai sebagaimana mestinya. Keberhasilan program sekecil apapun akan sangat menonjol tidak saja bagi pengurus, melainkan bagi para peserta program yang dapat menimbulkan rasa bangga dan percaya diri individual dan kolektif. Sehingga modal sosial mempunyai peranan yang sangat penting dalam kinerja UPK dilihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yaitu anggota melaksanakan hak dan kewajibanya dalam hal ini pengembalian pinjaman sesuai dengan statusnya sebagai anggota UPK, dimana

modal sosial menghasilkan struktur sosial yang fungsional, dan struktur sosial ini dapat menjadi tambahan bagi modal sosial yang baru.

6.3. Analisis Peran Modal Sosial (Social Capital) dalam Peningkatan Pendapatan Penduduk Miskin

6.3.1. Modal Sosial

Modal Sosial (Social Capital) merupakan bentuk modern atau suatu pengelompokan, group, asosiasi atau masyarakat. Prinsip-prinsip pengorganisasian yang dianut didasarkan pada **pertama** persamaan bahwasanya setiap anggota dalam satu kelompok memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama, **kedua** kebebasan, bahwasanya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengemukakan pendapat yang dapat mengembangkan kelompok tersebut, **ketiga** kemajemukan dan humanitarian bahwasanya nilai-nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, group, kelompok atau suatu masyarakat tertentu. Modal sosial sebagai sumber yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Pengukuran modal sosial ini melibatkan pengukuran terhadap interaksi tersebut seperti terciptanya atau terpeliharanya kepercayaan antar warga masyarakat. Ada tiga parameter modal sosial, yaitu kepercayaan (*trust*), jaringan-jaringan sosial (*networks*) dan norma (*norms*). Modal sosial yang tinggi yang dimiliki oleh masyarakat cenderung bekerja secara gotong-royong, merasa aman untuk berbicara dan mampu mengatasi perbedaan. Berikut disajikan Skor Modal Sosial di Pokmas UPK “Gempar”.

Tabel 39. Skor Total Modal Sosial di Pokmas UPK "Gempar" di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

No	Modal Sosial	UPK Program					
		Reguler			Penguatan		
		Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)	Skor Maksimal	Rata-rata	Persentase (%)
1	Kepercayaan	27	625	2314.81%	27	624	2311.11%
2	Jaringan Sosial	42	877	2088.10%	42	841	2002.38%
3	Norma	24	518	2158.33%	24	536	2233.33%
Jumlah		93	2020	6561.24%	93	2001	6546.83%

Sumber: Analisis Data Primer Tahun 2007

Dari tabel 39 diatas, diketahui bahwa di UPK reguler dan UPK penguatan skor modal sosial dengan parameter kepercayaan memiliki jumlah paling tinggi sebanyak 625 dengan persentase senilai 2314.81% pada UPK reguler dan pada UPK penguatan sebanyak 624 responden dengan persentase senilai 2311.11%. Selanjutnya parameter jaringan sosial yaitu masing-masing 877 orang atau 2088.10% dan 841 orang atau 2002.38%. Dan parameter norma yaitu masing-masing 518 orang atau 2158.33% dan 536 orang atau 2233.33%. Dari jumlah dan presentase modal sosial tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki modal sosial yang rendah.

6.3.2. Jumlah Tanggungan Keluarga

Tanggungan keluarga merupakan anggota yang belum mampu menghasilkan pendapatan sendiri baginya maupaun anggota keluarga yang sudah tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri, dan menjadi tanggung jawab kepala keluarga. Tanggungan keluarga yang besar mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan yang harus dikeluarkan oleh responden dalam kesehariannya yang akhirnya berdampak pula terhadap tingkat pengembalian pinjaman. Jika tanggungan keluarga tidak terlalu besar maka anggaran pendapatan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan pokok juga tidak akan terlalu besar sehingga sisa pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar pinjaman. Berikut disajikan distribusi anggota berdasarkan jumlah tanggungan keluarga.

Tabel 40. Tingkat Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga UPK “Gempar” berdasarkan jumlah tanggungan Keluarga di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Jumlah Tanggungan Keluarga	UPK Program			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
0 -1	1	3.00	1	3.00
2 - 3	12	40.00	9	30.00
4 - 5	17	57.00	20	67.00
Total	30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Dari tabel 40 diatas, diketahui bahwa di UPK reguler dan UPK penguatan jumlah tanggungan keluarga anggota Pokmas antara 0 – 1 orang yaitu sama masing-masing 1 orang atau 3.00 %. Selanjutnya anggota dengan jumlah tanggungan antara 2 -3 orang yaitu masing-masing 12 orang atau 40.00 % dan 9 orang atau 30.00 %. Dan jumlah tanggungan paling banyak yaitu antara 4 – 5 masing masing 17 orang atau 57.00 % dan 20 orang atau 67.00 %. Jumlah tanggungan keluarga anggota Pokmas tidak terlalu besar, karena sebagian besar dalam satu rumah tangga rata-rata suami istri bekerja. Sedangkan jika ada yang mempunyai anak lulus sekolah lanjutan mereka juga sudah bekerja karena tidak melanjutkan ke perguruan tinggi.

6.3.3. Tingkat Pendidikan

Pada umumnya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang ikut serta dalam menentukan kualitas sumber daya manusia secara individual. Tidak diingkari bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan responden, maka akan mempertinggi kesadaran dan tanggungjawab dalam diri individu yang bersangkutan. Dalam penelitian ini responden memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi, dari data yang diperoleh diketahui bahwa jumlah responden yang berlatar belakang pendidikan SMP memiliki jumlah paling tinggi sebanyak 16 responden dengan persentase senilai 53,00 % pada UPK reguler dan pada UPK Penguatan sebanyak 15 responden dengan persentase senilai 50.00 % , 10 responden merupakan tamatan SD dengan persentase 33,00 % pada UPK reguler dan penguatan. Sedangkan latar belakang pendidikan responden dengan persentase terendah senilai 14,00 % adalah tamatan SMU sebanyak 4 orang pada UPK reguler sedangkan pada UPK penguatan sebanyak 5 orang senilai 17.00 %. Dari jumlah dan presentase pendidikan responden tersebut maka dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki latar belakang pendidikan yang rendah dan tergolong memiliki kualitas sumberdaya yang rendah pula. Secara lengkap tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 41 berikut ini:

Tabel 41. Tingkat Distribusi Tingkat Pendidikan Responden Anggota Kelompok UPK “Gempar” Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, 2007.

Tingkat Pendidikan	Program UPK			
	Reguler		Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
Tamat SD	10	33.00	10	33.00
Tamat SMP	16	53.00	15	50.00
Tamat SMU	4	14.00	5	17.00
Diploma 1	0	0.00	0	0.00
Diploma 3	0	0.00	0	0.00
Total	30	100.00	30	100.00

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

6.3.4. Pendapatan

Pendapatan penduduk miskin diperoleh dari selisih antara penerimaan dengan total biaya keluaran per bulan. Pendapatan tersebut dapat meningkat jika biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang diperoleh, sebaliknya pendapatan dapat berkurang jika penerimaan menurun atau biaya yang dikeluarkan meningkat.

Dalam penelitian kali ini diketahui bahwa masing-masing anggota Pokmas UPK “Gempar” rata-rata memiliki 2 jenis pendapatan yaitu pendapatan utama dan sampingan pada UPK reguler sedangkan pada UPK penguatan hanya ada pendapatan utama saja. Pendapatan utama diperoleh dari pekerjaan utamanya seperti menjadi guru dan pendapatan sampingannya diperoleh dari pekerjaan sampingannya antara lain seperti menjahit. Berikut ini disajikan tabulasi pendapatan masing-masing anggota Pokmas dalam kurun waktu 1 bulan.

Tabel 42. Rata-rata Pendapatan Berdasarkan Jenis Usaha Anggota Pokmas UPK “Gempar” Program Reguler dan Program Penguatan di Desa Pandanrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu

Jenis Usaha	Rata-rata Pendapatan UPK		Selisih
	Program Reguler	Program Penguatan	
	Jumlah (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)	
Petani	542,857.14	600,000.00	57,142.86
Pedagang Sayur	612,500.00	750,000.00	137,500.00
Pedagang Pakaian	600,000.00	825,000.00	225,000.00
Pedagang Pracangan/PKL	477,000.00	675,000.00	198,000.00
Usaha Jasa	550,000.00	630,000.00	80,000.00
Rata-rata Pendapatan	2,782,357.14	3,480,000.00	697,642.86

Sumber: Analisis Data Primer tahun 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa rata-rata selisih antara total pendapatan UPK program reguler dan UPK program penguatan setiap bulannya tanpa memperhitungkan modal pinjaman, menunjukkan bahwa pendapatan rata-rata pada UPK program penguatan lebih tinggi dibandingkan pendapatan UPK program reguler yang di peroleh setiap bulannya.

Dengan adanya pemberian pinjaman dalam bentuk modal dana usaha bergulir (*revolving fund*) rata-rata sebesar Rp.500.000,00 dengan bunga 1,5 % per bulan senilai Rp.7.500,00 selama 10 bulan. Untuk setiap anggota dapat mengembalikan pinjaman dan bunganya sebesar Rp.57.500,00. per bulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa rata-rata anggota telah memiliki pinjaman sebelum adanya program Gerdu-Taskin, namun dengan adanya pemberian pinjaman modal usaha ini anggota Pokmas UPK “Gempar” seperti membuat lubang ke dua, sehingga pinjaman modal usaha yang diterima dipergunakan untuk menutupi hutang sebelumnya atau dengan istilah “gali lubang tutup lubang”

Untuk mengetahui hubungan antara modal sosial (*social capital*) sebagai variabel bebas dengan peningkatan pendapatan sebagai variabel tak bebas pada program Gerdu-Taskin digunakan cara analisis korelasi.

6.3.5. Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y). Setelah persamaan regresi diketahui yaitu:

$$Y_{Reg} = a + b_{ModalSosi} X_{ModalSosi} + b_{Jml.Tangg.Kell} + X_{Jml.Tangg.Kell} + b_{Tk.Penddkn} X_{Tk.Penddkn} \dots (4.4)$$

$$Y_{Penguatan} = a + b_{ModalSosi} X_{ModalSosi} + b_{Jml.Tangg.Kell} + X_{Jml.Tangg.Kell} + b_{Tk.Penddkn} X_{Tk.Penddkn} \dots (4.5)$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) pada program reguler

$Y_{Penguatan}$ = Variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) pada program Penguatan

a = Nilai Intercep (konstan) atau harga Y bila X = 0

b = Koefisien Regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel

X = Variabel bebas (Modal Sosial)

a. Hipotesis :

Ho : tidak terdapat peranan modal sosial terhadap tingkat pendapatan penduduk miskin.

Ha : terdapat peranan modal sosial terhadap tingkat pendapatan penduduk miskin

b. Kriteria Pengujian Hipotesis :

Ho diterima bila jumlah q hitung lebih kecil dari q tabel.

Analisis korelasi menggambarkan hubungan antara variabel bebas (X) terhadap variabel tak bebas (Y), nilai korelasi yang dinyatakan dengan R dari analisis data diketahui nilainya sebesar 0,901 pada UPK reguler dan 0,868 pada UPK penguatan yang berarti hubungan antara semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas sangat erat/sangat kuat.

Untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh dari variabel bebas modal sosial (X) terhadap variabel tak bebas Tingkat Pendapatan (Y), maka akan digunakan analisis korelasi dan regresi.

Tabel 43. Hasil Perhitungan Korelasi Dan Regresi

Variabel	UPK Program									
	Regular					Penguatan				
	B	Beta	t	Sig.t	Keterangan	B	Beta	t	Sig.t	Keterangan
Modal Sosial	12310.483	0.590	3.244	0.003	Signifikan	17779.702	0.359	3.095	0.003	Signifikan
Jumlah Tngg.Kell	68183.030	0.396	3.667	0.001	Signifikan	21540.368	0.457	3.821	0.001	Signifikan
Tk. Pendidikan	4054.463	0.017	0.093	0.926	Signifikan	17107.167	0.280	2.406	0.024	Signifikan
Konstanta	-164246		-0.883	0.385	Signifikan	-447497		-3.095	0.005	Signifikan
t tabel	= 2.056					= 2.056				
Multiple R	= 0.901					= 0.868				
R Square	= 0.790					= 0.726				
Adjusted R.Square	= 0.811					= 0.754				
F hitung	= 37.303					= 26.559				
Sig. F	= 0.000					= 0.000				
F tabel	= 2.98					= 2.98				

Sumber: Data primer diolah, 2007

Dengan memasukkan angka konstanta dan koefisien regresi pada variabel analisis yang digunakan dalam penelitian ini, maka persamaan sebagai berikut:

$$Y_{Reg} = -164246 + 12310.483X_1 + 68183.030X_2 + 4054.463X_3$$

$$Y_{Pngua\ tan} = -447497 + 17779.702X_1 + 21540.368X_2 + 17107.167X_3$$

Keterangan :

Y_{Reg} = Tingkat Pendapatan Program Reguler

$Y_{Pngua\ tan}$ = Tingkat Pendapatan Program Penguatan

a = Intercept atau titik potong

$b_1 b_2 b_3$ = koefisien regresi

X_1 = Variabel Kepercayaan

X_2 = Variabel Jaringan Sosial

X_3 = Variabel Norma

Berdasarkan tanda dan nilai koefisien regresi dari persamaan diatas, dapat diketahui sifat hubungan variabel bebas (modal sosial) X_1, X_2, X_3 , terhadap variabel tak bebas (tingkat pendapatan) Y , yaitu:

1. Jika $\beta_1 = 12310.483$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_1 (Modal Sosial) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Pendapatan Program Reguler) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Reg} sebesar 12310.483 satuan bila X_1 turun sebesar 1 % dengan anggapan X_2, X_3 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_1 = 17779.702$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_1 (Kepercayaan) terhadap variabel $Y_{Pngua\ tan}$ (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi kenaikan dalam $Y_{Pngua\ tan}$ sebesar 17779.702 satuan bila X_1 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_2, X_3 tetap dan konstan.
2. Jika $\beta_2 = 68183.030$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_2 (Jaringan Sosial) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Kolektibilitas Program Reguler) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Reg} sebesar 68183.030 satuan bila X_2 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_3 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_2 = 21540.368$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_2 (Jaringan Sosial) terhadap variabel $Y_{Pngua\ tan}$ (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi kenaikan dalam $Y_{Pngua\ tan}$ sebesar 21540.368 satuan bila X_2 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_3 tetap dan konstan.
3. Jika $\beta_3 = 4054.463$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_3 (Norma) terhadap variabel Y_{Reg} (Tingkat Kolektibilitas Program Reguler) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Reg} sebesar 4054.463 satuan bila X_3 naik

sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_2 tetap dan konstan. Dan jika $\beta_3 = 17107.167$ ini menunjukkan besarnya kontribusi variabel X_3 (Norma) terhadap variabel Y_{Pnguat} (Tingkat Kolektibilitas Program Penguatan) akan terjadi kenaikan dalam Y_{Pnguat} sebesar 17107.167 satuan bila X_3 naik sebesar 1 % dengan anggapan X_1, X_2 tetap dan konstan. Dan semakin besar nilai konstanta yaitu mendekati angka 0, maka akan semakin tinggi kontribusi variabel X.

Nilai koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) memiliki nilai positif (berbanding lurus). Hal ini dapat diartikan bahwa jika nilai dari ketiga variabel bebas tersebut semakin besar, maka nilai variabel tak bebas akan semakin besar pula. Begitu pula sebaliknya. ini menunjukkan semakin tinggi nilai dari perhitungan dengan menggunakan skala Likert maka akan semakin mempengaruhi tingkat pendapatan dari perhitungan tingkat kolektibilitas dengan menggunakan sistem korelasi dan regresi.

Dari hasil perhitungan diatas diperoleh koefisien determinasi (R^2) pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing sebesar 0.811 dan 0.754 atau dapat dikatakan bahwa 81.1% dan 75.4% perubahan variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) disebabkan oleh perubahan variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial, Jumlah tanggungan keluarga, Tk. Pendidikan) secara bersama-sama. Sedangkan sisanya sebesar 18.9% dan 24.6% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan regresi tersebut.

Sedangkan koefisien korelasi yang diperoleh pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing adalah sebesar 0.901 dan 0.868, atau dapat diartikan bahwa variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial, Jumlah tanggungan keluarga, Tk. Pendidikan) secara bersama-sama mempengaruhi variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) sebesar 90.1% dan 86.8% yang menunjukkan kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas X_1, X_2, X_3 terhadap variabel tak bebas Y.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa variabel bebas X_1, X_2, X_3 (Modal Sosial, Jumlah tanggungan keluarga, Tk. Pendidikan) memberikan kontribusi yang besar terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan).

6.3.6. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis-hipotesis yang diajukan, maka dilakukan pengujian hipotesis secara bersama-sama menggunakan uji F dan secara parsial dengan menggunakan uji t, seperti diuraikan dibawah ini:

1. Uji Serempak (F-Test)

A. Uji Serempak (F-Test) pada UPK Program Reguler

Diduga Tingkat Pendapatan dipengaruhi oleh Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga dan Tingkat Pendidikan.

Untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif atau tidak terhadap variabel tergantung, dapat diketahui dengan menggunakan alat uji F, yaitu dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , namun terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap H_0 , dimana:

1). $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga dan Tingkat Pendidikan) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan).

2). $H_1 : \text{mungkin ada } \beta_1 \neq 0$

Artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga dan Tingkat Pendidikan) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan).

Dengan menggunakan $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0.05 maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.98. sedangkan hasil F_{hitung} sebesar 37.303 berhubung F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga) terhadap variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) mempunyai pengaruh yang positif.

B. Uji Serempak (F-Test) pada UPK Program Penguatan

Diduga Tingkat Pendapatan dipengaruhi oleh Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga dan Tingkat Pendidikan.

Untuk melihat apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif atau tidak terhadap variabel tergantung, dapat diketahui dengan menggunakan alat uji F, yaitu dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , namun terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap H_0 , dimana:

1). $H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

Artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan).

2). $H_1 : \text{mungkin ada } \beta_1 \neq 0$

Artinya ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan).

Dengan menggunakan $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0.05 maka diperoleh F_{tabel} sebesar 2.98. sedangkan hasil F_{hitung} sebesar 26.559 berhubung F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} , maka H_0 ditolak, yang berarti secara bersama-sama variabel bebas (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga) terhadap variabel tak bebas (Tingkat Pendapatan) mempunyai pengaruh yang positif.

2. Uji t-Student (t-Test)

Uji t-Student bertujuan untuk menguji apakah masing-masing variabel bebas (Modal Sosial) secara parsial (X_1, X_2, X_3) mempunyai pengaruh terhadap variabel tak bebas tingkat Kolektibilitas (Y). Dari hasil perhitungan yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$ pada taraf signifikan $\alpha = 0.05$ untuk tes 2 ujung menunjukkan nilai 1.706. kemudian apabila $t_{hitung} > t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, kesimpulan H_0 ditolak. Sedangkan dari hasil perhitungan Uji t untuk masing-masing variabel bebas pada program reguler dan penguatan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44. Hasil Uji t-Test

No	Variabel	UPK Program Reguler			UPK Program Penguatan		
		Nilai t-hit	Nilai t-tab	Keterangan	Nilai t-hit	Nilai t-tab	Keterangan
1	Modal Sosial (X1)	3.244	1.706	Signifikan	3.319	1.706	Signifikan
2	Jumlah Tanggungan Keluarga (X2)	3.667	1.706	Signifikan	3.821	1.706	Signifikan
3	Tingkat Pendidikan (X3)	0.093	1.706	Signifikan	2.406	1.706	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2007

Dari tabel diatas diketahui bahwa guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_1 (Modal Sosial) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df=26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel ($t_{\alpha, n-1}$) sebesar 1.706, sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar 3.244 pada program reguler dan 3.319 pada program penguatan karena nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel}(t_{\alpha, n-1})$, maka X_1 secara parsial memberikan pengaruh yang positif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam peningkatan modal sosial dapat berakibat pada peningkatan tingkat pendapatan RTM tersebut.

Guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_2 (Jumlah Tanggungan Keluarga) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel ($t_{\alpha, n-1}$) sebesar 1.706. sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar 3.667 pada program reguler dan 3.821 pada program penguatan karena nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel}(t_{\alpha, n-1})$, maka X_2 secara parsial memberikan pengaruh yang positif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam jumlah tanggungan keluarga akan berakibat meningkatkan tingkat pendapatan RTM tersebut.

Guna mengetahui pengaruh antara variabel bebas X_3 (Tingkat Pendidikan) terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) pada program reguler dan penguatan dilakukan dengan menggunakan t-Test 2 ujung, $df = 26$ dan taraf signifikan sebesar 0,05, maka diperoleh nilai tabel ($t_{\alpha, n-1}$) sebesar 1.706. sedangkan dari perhitungan dengan menggunakan program statistical Microstat diperoleh t_{hitung} sebesar 0.093 pada program reguler karena nilai t_{hitung} lebih kecil

dari $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, maka X_3 secara parsial memberikan pengaruh yang negatif terhadap Y. Sedangkan pada program penguatan diperoleh t_{hitung} sebesar 2.406 karena nilai t_{hitung} lebih besar dari $t_{tabel}(t_{\alpha}, n-1)$, maka X_3 secara parsial memberikan pengaruh yang positif terhadap Y. Dengan demikian, jika ada perbaikan dalam peningkatan tingkat pendidikan akan berakibat meningkatkan tingkat pendapatan RTM tersebut.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dengan terpenuhinya syarat-syarat pengujian yang diajukan. Dengan demikian terhadap masing-masing hipotesis yang telah ditetapkan dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel bebas X (Modal Sosial, Jumlah Tanggungan Anggota Keluarga, Tk. Pendidikan) secara partial ataupun bersama-sama mempunyai hubungan dan pengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y (Tingkat Pendapatan) pada program Gerdu-Taskin.

Secara rinci dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini adalah:

1. Kinerja keuangan mikro yang dilihat dari tingkat pendapatan (variabel Y) pada UPK program reguler dan penguatan dipengaruhi sebesar 81.1% dan 75.4% oleh variabel bebas (X_1, X_2, X_3), sedangkan sisanya 18.9% dan 24.6% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar 3 variabel yang diteliti. Yang berarti setiap 100% perubahan pada variabel bebas, akan diikuti oleh perubahan tingkat kolektibilitas pada masing-masing program sebesar 81.1% dan 75.4%.
2. Koefisien korelasi atau Multiple R yang diperoleh pada UPK program reguler dan penguatan masing-masing sebesar 0.901 dan 0.868 menyatakan bahwa kondisi hubungan antara modal sosial terhadap tingkat pendapatan secara bersama-sama sebesar 90.10% dan 86.80% yang menunjukkan kuatnya hubungan antara keseluruhan variabel bebas (modal sosial) terhadap variabel tak bebas (tingkat pendapatan).
3. Modal Sosial (X_1), secara parsial tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Pendapatan dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 3.244 di UPK reguler ini menunjukkan bahwa lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 3.319, variabel Jumlah tanggungan Anggota Keluarga (X_2) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 3.667 di UPK reguler ini menunjukkan lebih rendah dari pada di UPK penguatan yaitu sebesar 3.821 sedangkan untuk variabel Tingkat Pendidikan (X_3) dilihat dari uji t_{hitung} yaitu sebesar 0.093 di UPK reguler dan

2.406 di UPK penguatan. Ini dapat menjelaskan bahwa modal sosial menjadi kebutuhan utama dari kebutuhan lain, modal sosial yang tinggi akan menciptakan hubungan-hubungan yang bersifat kerjasama, bila mereka ada kesempatan untuk ikut dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungannya secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam segala aktifitas, serta terciptanya peluang usaha dalam kegiatan ekonomi. Tanggungan keluarga yang besar mempunyai pengaruh terhadap jumlah pendapatan yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga anggota dalam kesehariannya yang akhirnya berdampak pada tingkat pendapatan. Jika tanggungan keluarga besar maka kebutuhan pokok rumah tangga besar sehingga porsi dari pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pokok juga besar. Anggota yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi mempunyai kemauan tinggi untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi dengan menciptakan peluang usaha sebagai salah satu cara untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi akan membentuk jiwa yang bertanggungjawab dan lebih paham terhadap tujuan dari program-program pemerintah. Sehingga anggota yang mempunyai pendidikan lebih tinggi diharapkan akan mendukung dan melaksanakan suatu program sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Selisih pendapatan antara program reguler dengan program penguatan sangat kecil ini disebabkan karena sistem pemberian pinjaman tidak sesuai sasaran artinya mereka yang memperoleh program reguler seharusnya memperoleh pinjaman lagi sebagai tambahan modal dari program penguatan namun pelaksanaannya pinjaman pada program penguatan diberikan pada anggota baru. Bila dilihat dari kurva produksi seharusnya pada program reguler yang masih akan menuju taraf pertumbuhan tidak tercapai akibat tidak adanya tambahan modal kerja berupa modal finansial, sehingga anggota tidak dapat meningkatkan produktivitas, tidak mencapai kemandirian dan tidak dapat meningkatkan pada kondisi kehidupan yang lebih layak (kesejahteraan). Pengentasan kemiskinan melalui program Gerdu-Taskin yang diatasi melalui peningkatan modal sosial yang tertambat pada struktur sosial mikro saja akan berdampak kurang efektif. Jaringan pemasaran dan kerjasama yang lebih luas dengan struktur sosial yang lebih luas akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah dilakukan pembahasan masalah dengan membandingkan antara keadaan sebenarnya dengan landasan teori yang digunakan, maka dalam bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai bahan pertimbangan bagi institusi dimasa yang akan datang.

Dari hasil pembahasan seperti tertera di awal dapat disimpulkan dan di sarankan sebagai berikut:

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil analisis terhadap data yang diperoleh dari 60 anggota Pokmas UPK “Gempar” baik pada program reguler maupun pada program penguatan, dengan menggunakan data sekunder dan primer yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mendalam serta diskusi kelompok terfokus maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan penelitian, sebagai berikut:

1. Secara umum tingkat pengetahuan anggota Pokmas UPK “Gempar” terhadap peran UPK sebagai sumber pembiayaan mikro cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat pengetahuan anggota tentang struktur kelompok, tujuan kelompok, fungsi tugas, dan kekompakan kelompok.
2. Berdasarkan hasil penelitian, peran Modal Sosial terhadap kinerja keuangan mikro cukup baik. Hal ini terlihat dari tingkat kepercayaan, kemauan bekerjasama dan serta norma yang berlaku dalam kerjasama yang terjalin antara anggota Pokmas dengan UPK “Gempar”. Lebih jauh peran ini juga dapat terlihat dari tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh anggota Pokmas yang meningkat yaitu sebesar 82.60% pada program reguler dan 90.90% pada program penguatan. Artinya tingkat kolektibilitas lebih dipengaruhi oleh Modal Sosial yaitu segala hal yang berkaitan dengan kerjasama dalam masyarakat dan ditopang norma yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban anggota sebagai peminjam untuk mengembalikan pinjaman. Ini sesuai dengan hiraki tindakan kolektif menurut

Lawang menunjuk pada tindakan yang terorganisir bersama-sama orang miskin dalam suatu kelompok dengan atau tanpa fasilitas dari pemerintah. Dengan dasar asumsi bahwa kerja sama dalam kelompok lebih efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan keswadayaan.

3. Berdasarkan peran Modal Sosial terhadap kinerja keuangan mikro dalam peningkatan pendapatan penduduk miskin masih kurang baik. Hal ini terlihat dari pemanfaatan jasa UPK “Gempar” oleh anggota Pokmas ternyata mampu meningkatkan pendapatan walaupun masih sangat rendah namun mulai menunjukkan adanya peningkatan, baik dari sisi produksi, barang dagangan maupun pelayanan. Jasa keuangan mikro yang diberikan UPK “Gempar” telah dirasakan manfaatnya oleh anggota Pokmas.

7.2 Saran

1. Pelayanan yang diberikan oleh UPK “Gempar” hendaknya sesuai petunjuk teknik operasional (PTO) yang telah dirancang oleh Pemerintah yang telah disesuaikan dengan kondisi penduduk miskin. Perlunya penataan kembali susunan pengurus UPK “Gempar” sesuai dengan keinginan anggota Pokmas agar pelaksanaan program yang direncanakan dapat lebih ditingkatkan lagi, mengingat potensi dari kelompok tersebut sudah baik dari segi struktur, kekompakan, fungsi tugas dan tujuan. Ini merupakan upaya peningkatan kemampuan lembaga keuangan mikro (*microfinance*) agar memberikan hasil yang optimal.
2. Perlunya program berkelanjutan dari sistem keuangan yang diprakarsai oleh pemerintah dalam memenuhi keterbatasan akses ke sumber-sumber keuangan dengan memberikan bantuan pinjaman permodalan dengan persyaratan dan prosedur yang mudah, layanan cepat dan tepat sesuai kebutuhan, serta pembinaan secara berkelanjutan sesuai bidang yang diperlukan untuk masing-masing Pokmas agar dapat lebih berpartisipasi aktif dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan dan guna mendorong usaha ekonomi produktif Pokmas dalam meningkatkan usahanya

agar modal sosial yang ada dapat terbentuk dan berkembang seiring dengan adanya peningkatan pendapatan

3. Diharapkan jaringan sosial dan sumber daya yang menjadi elemen penting social capital dapat berfungsi optimal dan turut mempertimbangkan dan mengembangkan nilai-nilai modal sosial (*social capital*) yang telah ada dalam lingkungan Pokmas. Dari 3 nilai modal sosial (*social capital*), tingginya faktor modal sosial kesesuaian pendapat dapat dijadikan modal dasar dalam memotivasi anggota untuk lebih berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan pembangunan dan pencapaian tujuan demi kemajuan Pokmas.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous. 2003. *Lima Tahun Kepemimpinan Imam Utomo “Kemiskinan di Jatim Justru Meningkat”* (Tersedia dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0305/27/jatim/335277.htm>).
- Anonymous. 2004. *21 Tahun untuk Entaskan Masyarakat Jawa Timur dari Kemiskinan* (Tersedia dalam <http://www.freelists.org/archives/ppi/11-2004/msg00155.html>).
- Aisyah, Cicik. 2003. *Pengaruh Sistem Pemasaran Terhadap Pendapatan Usahatani Tebu. Studi Kasus di Desa Gunung Ronggo Kec. Tajinan Kab. Malang*. Skripsi. Fakultas Pertanian. Universitas Brawijaya. Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. Rineka Cipta. Jakarta.
- Boon, Paul. 2006. *Fokus Modal Usaha Bagi Kaum Yang Dipinggirkan*. (Tersedia dalam [Http://www.access-indo.or.id](http://www.access-indo.or.id)).
- BRI, 2005. *Seluruh Pekerja BRI sebagai “Public Relation”*. MEDIA Komunikasi Pekerja BRI Unit. (Mmb, Edisi No.29, Th. VII/2005).
- Dowla, Asif. 2006. *The Journal of Socio-Economics 35. 102–122. Department of Economics, St. Mary’s College of Maryland, 18952 E. Fisher Road, St. Mary’s City, MD 20686-3001, USA*
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran* (Terj.). Yogyakarta. Penerbit Qalam.
- Gray et al. 2002. *Pengantar Evaluasi Proyek*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hanani, Nuhfil, Ibrahim, Jabal Tarik dan Purnomo, Mangku. 2003. *Strategi Pembangunan Pertanian*. Lappera Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Pokok – Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonsia. Jakarta. P. 60-65.
- Heriyanto C. Arief. 2000. *Modul Sosiologi Kelas II*.
- Lawang, R.M.Z, 2005. *Kapital Sosial Dalam Persepektif Sosiologik Suatu Pengantar*. FISIP UI PRESS. Jakarta.

- Makkutana, Bahar. (Mahasiswa Program Magister Pembangunan Masyarakat Unhas). 2005. *Membangun Bangsa Dengan Modal Sosial*. (Tersedia dalam <http://www.fajaronline.com>).
- Marquerite S. Robinson. 1993. *Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia 1970-1990, dalam bunga Rampai Pembiayaan Pertanian Pedesaan, Sugianto (Ed)*, Penerbit Institut Bankir Indonesia, Jakarta.
- Mubyarto. 1987. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. LP3ES. Jakarta.
- Mulyadi. 1997. *Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat dan Rekayasa* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Miles, Mathew & Huberman, Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press. Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2006a. *Pedoman Umum. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) Propinsi Jawa Timur*. Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur.
- Pemerintah Propinsi Jawa Timur, 2006b. *Petunjuk Teknis Operasional Penguatan Unit Pengelola Keuangan. Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Ttaskin) Propinsi Jawa Timur*. Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Timur.
- Putnam, Robert. 2002. Social Capital Measurement and Consequences. Download dari <http://www.isuma.net/v02n01/putnam>
- Said, E. Gumbira dan Intan, A. Harizt. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.
- Smith, Adam. 1976. *The Wealth of Nations*.
- Soekartawi. 2002. *Analisis Usahatani*. UI Press. Jakarta.
- Soekartawi et al. 1986. *Ilmu Usahatani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*. UI Pers. Jakarta.
- Sugiyono. 2000. *Metode Penelitian Bisnis*. CV. ALFABETA. Bandung.

- Sulistiani, Ambar teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Impac. Jakarta.
- Tonkiss, F. 2000. "Trust, Social Capital and Economy." Dalam F. Tonkiss dan A. Pasey (eds.). *Trust and Civil Society*. New York: St. Martin's.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. 2005. *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*. (Tersedia dalam [Http://www.fiscal.depkeu.go.id/bapekki/kajian%5wiloejo-1.pdf](http://www.fiscal.depkeu.go.id/bapekki/kajian%5wiloejo-1.pdf).)
- World Bank. 2000. *World Development Report 1999/2000: Entering the 21st Century*. New York: Oxford University Press.
- Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan. Definisi, teori dan Strategi*. Banyumedia Publishing. Jawa Timur.

